

Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.M.Si
Dassucik, S.Pd.M.Si
Dr. Ida Farida, S.H., M.H.



Pengantar **EKONOMI PEMBANGUNAN:**

STRATEGI MENUJU NEGARA BERKEMBANG



PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: STRATEGI MENUJU NEGARA BERKEMBANG

Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.M.Si
Dassucik, S.Pd.M.Si
Dr. Ida Farida, S.H., M.H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202505838, 14 Januari 2025
Pencipta	
Nama	: Lak Ink Nazhat El Hasanah, SE,MSi, Dassucik, S.Pd.M.Si dkk
Alamat	: Sudimoro Kradenan RT.23 RW 11, Trucuk, Kluten, Jawa Tengah, 57467
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Lak Ink Nazhat El Hasanah, SE,MSi, Dassucik, S.Pd.M.Si dkk
Alamat	: Sudimoro Kradenan RT.23 RW 11, Trucuk, Kluten, Jawa Tengah, 57467
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: STRATEGI MENUJU NEGARA BERKEMBANG
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 14 Januari 2025, di Surakarta (solo)
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000845201

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



di. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
dan Industri
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarisingsko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Disclaimer

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.M.Si	Sudimoro Kradenan RT 23 RW 11 , Trucuk, Klaten
2	Dussucik, S.Pd.M.Si	Jl. Gunung Arjuna RT 02 RW 13 Kelurahan Mimbaan , Panji, Situbondo
3	Dr. Ida Farida, S.H., M.H.	Jln. R.E. Martadinata No. 138 Rt. 001 Rw. 003 , Baregbeg, Ciamis

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.M.Si	Sudimoro Kradenan RT 23 RW 11 , Trucuk, Klaten
2	Dussucik, S.Pd.M.Si	Jl. Gunung Arjuna RT 02 RW 13 Kelurahan Mimbaan , Panji, Situbondo
3	Dr. Ida Farida, S.H., M.H.	Jln. R.E. Martadinata No. 138 Rt. 001 Rw. 003 , Baregbeg, Ciamis



PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: STRATEGI MENUJU NEGARA BERKEMBANG

Penulis:

Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.M.Si

Dassucik, S.Pd.M.Si

Dr. Ida Farida, S.H., M.H.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 170, Uk: 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-147-713-2

Cetakan Pertama:

Januari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

Copyright © 2025 By Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau
Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota Ikapi (216/Jte/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang " ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan dasar mengenai konsep, teori, dan tantangan dalam ekonomi pembangunan, baik dalam konteks global maupun nasional.

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di negara berkembang, melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan cakupan yang luas, buku ini menghadirkan pembahasan mulai dari hakikat manusia dalam pembangunan hingga isu-isu global, konsep dasar ekonomi pembangunan, hingga faktor-faktor penentu, hambatan, dan prasyarat pembangunan.

Buku ini terdiri dari sembilan bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami kompleksitas ekonomi pembangunan. Setiap bab dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan fundamental, seperti apa karakteristik pembangunan, apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang, bagaimana struktur ekonomi memengaruhi pertumbuhan, dan bagaimana pendapatan nasional menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan siapa saja yang tertarik mendalami ekonomi pembangunan.

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	vi
Daftar Isi	vii
Bab 1 Hakikat Manusia Dan Karakteristik Pembangunan	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Hakekat Manusia Dalam Kontek Pembangunan.....	5
C. Karakteristik Pembangunan Dan Tantangan Global	11
Bab 2 Permasalahan Pembangunan Global dan Nasional	25
A. Isu-Isu Pembangunan Global.....	25
B. Tantangan Pembangunan Nasional	40
C. Kesimpulan.....	51
Bab 3 Konsep Ekonomi Pembangunan	52
A. Pendahuluan.....	52
B. Definisi Dan Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan	53
C. Teori-Teori Pembangunan.....	57
D. Paradigma Dan Pendekatan Modern Dalam Ekonomi Pembangunan 78	
Bab 4 Ciri Negara Berkembang	82
Bab 5 Faktor Pembangunan	93
Bab 6 Struktur Ekonomi	104
A. Implikasi Struktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Hidup, Dan Kesenjangan Sosial.....	107
B. Kebijakan Struktur Ekonomi	110
Bab 7 Hambatan Pembangunan	114
A. Pendahuluan.....	114
B. Jenis-Jenis Hambatan Pembangunan.....	114

C. Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pembangunan	119
D. Kesimpulan.....	123
Bab 8 Prasyarat Pembangunan	124
A. Pendahuluan.....	124
B. Prasyarat Ekonomi	124
C. Prasyarat Sosial.....	127
D. Prasyarat Politik	129
E. Prasyarat Lingkungan.....	131
F. Kesimpulan.....	133
Bab 9 Pendapatan Nasional Dan Pendapatan Per Kapita	134
A. Pendahuluan.....	134
B. Konsep Pendapatan Nasional.....	134
C. Metode Pengukuran Pendapatan Nasional	137
D. Pentingnya Pendapatan Nasional Dan Pendapatan Per Kapita	140
E. Tantangan Dalam Pengukuran Pendapatan Nasional	142
F. Kesimpulan.....	143
Daftar Pustaka	144
Profil Penulis.....	169

BAB 1 HAKIKAT MANUSIA

DAN KARAKTERISTIK

PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan, dalam konteks apa pun baik sosial, ekonomi, atau politik pada intinya adalah usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan rasional berperan fundamental dalam menentukan arah dan capaian dari pembangunan itu sendiri. Dalam filsafat dan ilmu sosial, manusia sering digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kesadaran diri, kemampuan berpikir, berkomunikasi, serta hidup berdampingan dengan sesama. Kemampuan ini menjadikan manusia tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mendesain, menjalankan, dan mengevaluasi proses pembangunan. Pembangunan telah menjadi salah satu konsep kunci dalam wacana modern, terutama sejak era pasca-perang dunia kedua yang ditandai dengan upaya global untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Pembangunan manusia tidak hanya melibatkan dimensi fisik dan material, tetapi juga menyangkut dimensi mental, moral, dan spiritual. Dalam berbagai kajian pembangunan, perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi terbukti tidak cukup dalam menjawab kompleksitas tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*human-centered development*) semakin relevan dalam menciptakan perubahan yang lebih adil dan inklusif. Melalui paradigma ini, pembangunan bukan hanya soal akumulasi kapital atau kemajuan teknologi, melainkan transformasi sosial

yang mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tulisan ini akan mengkaji keterkaitan antara pembangunan dan manusia dengan pendekatan holistik, mengupas peran sentral manusia dalam proses pembangunan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, di balik narasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sejati harus dilihat sebagai suatu proses yang lebih mendasar, yang tidak hanya berhubungan dengan materi tetapi juga dengan perkembangan manusia secara keseluruhan. Hal ini mengarah pada pertanyaan mendasar: Apa hakekat manusia dalam konteks pembangunan?

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk yang diciptakan dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam konteks hubungan spiritual dengan Tuhan, manusia diciptakan untuk beribadah, untuk taat dan menjaga apa yang diberikanNYA . Perspektif ini mengedepankan dimensi spiritual dan etika, menggarisbawahi peran manusia dalam menjalankan amanah dan mengembangkan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Dari sisi filosofis, hakekat manusia dilihat dari eksistensialisme dan humanisme. Manusia, sebagai makhluk multidimensi, memiliki kompleksitas yang tidak dapat disederhanakan. Secara filosofis, manusia dipandang sebagai entitas yang memiliki kesadaran diri, kebebasan berkehendak, dan kemampuan untuk memaknai eksistensinya (Hardiman, 2023). Sementara itu, dari sudut pandang antropologis, manusia adalah makhluk sosial-budaya yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya dan menciptakan sistem nilai serta norma dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 2020). Adapun hakikat manusia, menurut (Arifin, 2021) mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang, beradaptasi, dan mentransformasi lingkungannya. Pemahaman holistik ini menjadi dasar dalam merumuskan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan (Praseto & Suryono, 2022).

Manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat dari interaksi sosial dan budaya yang membentuk identitas dan perilaku individu. Sedangkan dari perspektif ekonomi, hakekat manusia berkaitan dengan peran manusia sebagai pelaku maupun agen dalam ekonomi yaitu produksi, konsumsi maupun inovasi. Pandangan hakekat manusia dalam hal ini memberikan gambaran

tentang bagaimana manusia berkontribusi dalam perekonomian dan pembangunan serta bagaimana perkembangan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Manusia, sebagai makhluk sosial dan ekonomi, memiliki peran sentral dalam proses pembangunan. Pembangunan sering kali dipahami sebagai proses ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk memahami sepenuhnya bagaimana pembangunan mempengaruhi masyarakat, penting untuk mempertimbangkan hakikat manusia sebagai elemen sentral dalam proses tersebut. Hakikat manusia tidak hanya meliputi aspek biologis dan psikologis tetapi juga sosial dan filosofis yang mendasari interaksi manusia dalam konteks pembangunan. Kebutuhan dan aspirasi manusia menjadi landasan utama dalam merumuskan tujuan dan strategi pembangunan. Menurut Sen (1999), pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh setiap individu. Kebebasan ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan kesempatan ekonomi yang setara.

Karakteristik pembangunan yang berlandaskan pemahaman mendalam tentang hakikat manusia cenderung bersifat inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Menurut studi yang dilakukan oleh Widodo, Utami, & Pratiwi, (2023) pembangunan yang efektif harus mampu mengakomodasi keragaman aspirasi dan kebutuhan manusia, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan daya dukung lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik pembangunan yang berpusat pada manusia harus memenuhi aspek keadilan dan pemerataan (Sari & Rahman, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak hanya ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Menurut Hidayat, (2022). pembangunan di era kontemporer harus mampu merespon tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketimpangan antar negara, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal. Hal ini menuntut adanya kerangka pembangunan yang fleksibel dan adaptif, yang mampu mengintegrasikan perspektif global dengan kearifan lokal dalam

mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Karakteristik pembangunan yang berpusat pada manusia dalam konteks global yang ditandai oleh interconnectedness dan interdependensi, pemahaman tentang hakikat manusia dan karakteristik pembangunan juga perlu mempertimbangkan dimensi transnasional.

Manusia, sebagai makhluk yang kompleks dan multidimensi, memiliki peran sentral dalam proses pembangunan. Hakekat manusia dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi penting, yaitu dimensi individual dan dimensi kolektif. Secara individual, manusia memiliki keinginan untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan pemenuhan potensi dirinya. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, yang dalam konteks pembangunan tercermin dalam partisipasi aktif dalam berbagai aspek sosial dan politik.

Penting untuk memahami bahwa pembangunan yang berpusat pada manusia tidak hanya mengacu pada peningkatan ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan karakter, budaya, dan tatanan sosial yang mendukung kesejahteraan holistik. Sejalan dengan itu, teori pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini harus seimbang dengan kepedulian terhadap keberlangsungan generasi mendatang. Dalam paradigma pembangunan modern, manusia bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam membentuk kebijakan dan strategi pembangunan. Oleh karena itu, proses pembangunan harus menghormati harkat dan martabat manusia, serta mengakui keberagaman nilai, budaya, dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus selalu menempatkan manusia di pusatnya, baik sebagai subjek maupun tujuan akhir. Pandangan ini menekankan bahwa tanpa memahami hakekat manusia yang kompleks dan beragam, pembangunan akan kehilangan arah dan maknanya.

Pemahaman mendalam tentang hakikat manusia menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Buku ini mengeksplorasi keterkaitan antara esensi kemanusiaan dan karakteristik pembangunan yang ideal untuk mencapai kesejahteraan bersama.

B. HAKEKAT MANUSIA DALAM KONTEK PEMBANGUNAN

Secara filosofis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional dan moral yang memiliki kemampuan untuk berpikir, memilih, dan bertindak secara otonom. Pembangunan yang berfokus pada manusia (*human-centered development*) menekankan pentingnya kebebasan individu dan kolektif sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang sosiologis, manusia tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang melingkupinya. Pembangunan, dalam hal ini, adalah proses yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga. Struktur sosial memberikan kerangka bagi perilaku manusia, tetapi pada saat yang sama, manusia memiliki potensi untuk mengubah struktur tersebut melalui tindakan kolektif dan inovasi sosial. Karl Marx, misalnya, mengajukan konsep bahwa pembangunan harus mencakup perubahan dalam relasi sosial, terutama dalam konteks produksi dan distribusi sumber daya. Dalam masyarakat modern, pembangunan tidak boleh hanya dilihat sebagai upaya teknokratis yang mengabaikan kesenjangan sosial dan ketidakadilan struktural.

Manusia memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan, baik melalui inovasi teknologi, budaya, maupun politik. Dalam konteks pembangunan, manusia harus ditempatkan sebagai pelaku utama yang mendorong perubahan sosial. Teori modern tentang pembangunan manusia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tingkatan proses pembangunan, dari perencanaan hingga implementasi. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan. Sebagai agen perubahan, manusia juga dituntut untuk memiliki kesadaran ekologis, etika sosial, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Pembangunan yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan dan keseimbangan alam justru akan merusak basis kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat relevan dalam konteks modern, di mana manusia harus mempertimbangkan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Hakekat manusia dalam pembangunan terletak pada kapasitasnya untuk berpikir kritis, bertindak secara moral, dan menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Pembangunan yang memanusiakan manusia adalah pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi perkembangan spiritual, intelektual, dan sosial

manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa manusia bukan hanya sasaran pembangunan, melainkan juga subjek aktif yang menentukan arah dan tujuan pembangunan itu sendiri. Pada akhirnya, pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang memuliakan manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam menentukan nasibnya.

Menurut Amartya Sen, (2019), pembangunan harus dilihat sebagai upaya memperluas kebebasan substantif yang dimiliki manusia. Kebebasan ini meliputi hak untuk mengembangkan potensi diri, terlibat dalam keputusan yang memengaruhi hidupnya, serta menikmati hasil pembangunan secara adil. Filosofi ini berpijak pada pandangan bahwa manusia bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek utama. Dengan kata lain, tujuan akhir pembangunan adalah pengembangan manusia itu sendiri, bukan sekadar peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya.

Manusia dalam pembangunan merupakan aspek yang fundamental, manusia merupakan aktor utama dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Selain itu, manusia dalam pembangunan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Konsep pembangunan telah mengalami evolusi yang signifikan. Dari yang semula berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, kini pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan (Suryono & Trilaksono, 2022). Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang hakikat manusia menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan potensi manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai objek, manusia menjadi sasaran atau target dari proses pembangunan, di mana berbagai program dan kebijakan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sisi lain, sebagai subjek, manusia adalah pelaku aktif yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembangunan itu sendiri. Dualitas peran ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara manusia dan pembangunan, yang pada akhirnya bermuara pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan utama.

Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kepentingan manusia. Dalam hierarki Maslow kebutuhan dasar manusia diklasifikasikan menjadi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri yang lebih abstrak. Hierarki ini sering

digambarkan sebagai piramida dengan lima tingkatan (lihat gambar 1). Penelitian terbaru oleh Koltko-Rivera, (2006) menambahkan tingkat keenam, yaitu transendensi diri, yang mencerminkan kebutuhan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia dari berbagai hal tersebut menjadikan roda gerak pembangunan. Kebutuhan manusia secara fisiologi berhubungan dengan pangan, sandang dan papan, sedangkan untuk keamanan kebutuhan manusia meliputi pengakuan hak dan kewajiban serta jaminan keamanan. Pada kebutuhan sosial manusia cenderung ingin berpartisipasi dan bersosial dengan manusia lainnya. Adapun kebutuhan yang menyangkut prestasi atau penghargaan manusia cenderung ingin di puji dan dihargai. Adapun kebutuhan aktualisasi terkait dengan pengakuan terhadap pendapat oranglain dan penyesuaian diri terhadap situasi.



Gambar 1.1 Hierarki Maslow

Sumber : (<https://brandadventureindonesia.com>) dalam (Asrori, 2020)

Pemenuhan kebutuhan dasar ini dalam konteks pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan itu sendiri. Sebagai objek pembangunan, manusia diharapkan dapat menikmati peningkatan akses terhadap pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Namun, pendekatan yang melihat manusia semata-mata sebagai objek cenderung menghasilkan pembangunan yang top-down dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, ketika manusia diposisikan sebagai subjek pembangunan, mereka diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai pembangunan partisipatif, memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri

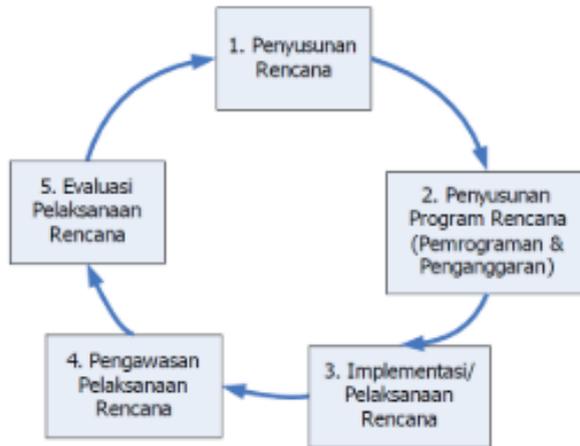
dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pembangunan tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan inisiatif pembangunan dalam jangka panjang.

Manusia sebagai objek pembangunan dapat dilihat pada program transmigrasi di Indonesia pada era Orde Baru. Masyarakat dipindahkan dari daerah padat penduduk ke daerah yang dianggap kurang berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan. Meskipun program ini berhasil dalam beberapa aspek, kritik muncul karena kurangnya pertimbangan terhadap aspirasi dan kebutuhan spesifik masyarakat yang dipindahkan. Di sisi lain, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan pada tahun 2007 merupakan contoh pendekatan yang memposisikan manusia sebagai subjek pembangunan. Program ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Manusia sebagai subyek pembangunan yaitu menempatkan manusia sebagai individu utama atau dengan kata lain dalam pembangunan manusia sebagai aktor utama dalam prosesnya, terdapat partisipasi individu dalam kegiatan suatu negara. Individu tidak hanya menerima program-program dari pemerintah akan tetapi juga ikut serta dalam program tersebut. Contoh manusia sebagai subyek pembangunan adalah:

1. Partisipasi dalam perencanaan kota

Partisipasi secara konsep menempatkan individu tidak hanya sebagai penerima manfaat akan tetapi juga pelaku dalam proses pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilakukan dalam beberapa hal baik bersifat semu (*pseudo participation*) maupun bersifat otentik. (Santoso & Moenek, 2018, Wirawan, Mardiyono, & Nurpratiwi, 2016). Menurut Bintoro, (1995) pembangunan merupakan siklus yang dimulai dari penusunan rancangan sampai evaluasi pelaksanaan rencana (lihat gambar 2) dimana kesemuanya itu menempatkan manusia sebagai subyek dalam pembangunan.



Gambar 1.2. Proses pembangunan (Bintoro, 1995)

2. Pendidikan Kewirausahaan

Integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum perguruan tinggi telah mendorong mahasiswa untuk menjadi subjek pembangunan ekonomi. Para mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja melalui start-up dan usaha kreatif yang mereka rintis (Sumarmo, Sari, & Hikmah, 2020).

3. Gerakan Lingkungan Berbasis Komunitas

Inisiatif yang dimulai dari level grassroots ini telah berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah. gerakan ini menggambarkan adanya keterlibatan manusia dalam proses pembangunan. Fauzi dan Octaviani (2022)

Hakikat manusia dalam konteks pembangunan berarti menjadikan manusia sebagai obyek juga sebagai subyek. Manusia dalam pembangunan merupakan paradigma yang menempatkan manusia sebagai subjek utama sekaligus tujuan akhir dari proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya meningkatkan kapabilitas yaitu Pembangunan Kapabilitas: Fokus pada peningkatan kemampuan dan potensi manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya (A Sen, 2019), kesempatan, dan kualitas hidup manusia secara holistik, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Mereka tidak hanya menerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program

pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Akan tetapi, pembangunan yang berpusat pada manusia harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Inklusivitas yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, pelibatan masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan status, golongan, suku maupun agama.
2. Keberlanjutan yaitu pembangunan yang di lakukan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang, penggunaan faktor produksi baik Sumberdaya Alam (SDA) maupun Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pembangunan dengan bijak.
3. Partisipatif: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan atau Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan.
4. Holistik: Mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang.
5. Adaptif: Mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan teknologi. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung pembangunan manusia (Schwab, 2023)

Uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia dalam pembangunan : *Pertama*, manusia merupakan subjek sekaligus objek utama dalam proses pembangunan. Sebagai subjek, manusia berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penikmat hasil pembangunan. Sementara sebagai objek, manusia menjadi sasaran utama dari upaya-upaya peningkatan kualitas hidup melalui berbagai program pembangunan. Dualitas peran ini menegaskan posisi sentral manusia dalam keseluruhan proses pembangunan. *Kedua*, hakikat manusia dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, manusia dipandang sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Ketiga, pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development) menjadi pendekatan kunci dalam memahami hakikat manusia dalam pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan

hingga evaluasi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia memiliki pengetahuan lokal, kreativitas, dan potensi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. *Keempat*, dalam konteks pembangunan, manusia juga dipandang sebagai makhluk multidimensi yang memiliki berbagai aspek kehidupan yang saling terkait. Pembangunan yang holistik harus memperhatikan tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, politik, dan spiritual manusia. Pengabaian terhadap salah satu dimensi dapat mengakibatkan ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam proses pembangunan, dan *Kelima*, hakikat manusia dalam pembangunan juga terkait erat dengan konsep pemberdayaan. Pembangunan yang sejati harus mampu meningkatkan kapasitas manusia untuk mengenali potensi diri, mengambil keputusan yang tepat, dan bertindak secara mandiri dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau infrastruktur fisik, tetapi juga untuk memperkuat modal sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperluas akses terhadap informasi dan teknologi yang dapat mendukung pengembangan diri manusia secara menyeluruh.

C. KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN GLOBAL

Pembangunan telah menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara di seluruh dunia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta mencapai stabilitas ekonomi dan sosial. Proses pembangunan tidak hanya melibatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks global, pembangunan sering diukur berdasarkan sejumlah indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesetaraan gender. Namun, pembangunan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan cepat teknologi. Globalisasi telah membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, namun di sisi lain juga membawa risiko ketimpangan, krisis lingkungan, dan ketidakstabilan ekonomi di beberapa wilayah. Tantangan-tantangan ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan

kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dengan mempertimbangkan dampak dari isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis energi, kemiskinan yang masih bertahan, serta ketidakadilan distribusi sumber daya. Perkembangan teknologi, khususnya dalam revolusi industri 4.0, juga memunculkan tantangan baru yang menuntut penyesuaian strategi pembangunan di berbagai sektor. Teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan tidak hanya mengubah struktur pasar tenaga kerja, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kesenjangan akses dan dampaknya terhadap kesetaraan sosial. Dalam konteks ini, buku ini akan mengeksplorasi karakteristik utama dari pembangunan modern serta tantangan-tantangan global yang menyertainya. Pembahasan ini akan meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi, dengan fokus pada bagaimana negara-negara dapat merespons tantangan tersebut melalui kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan.

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2020). Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan, adalah proses peningkatan pendapatan per kapita yang berkelanjutan dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan struktural dalam ekonomi. Ini melibatkan peningkatan produksi barang dan jasa, Perubahan komposisi output dari sektor pertanian ke industri dan jasa, Peningkatan produktivitas faktor produksi, Kemajuan teknologi dan inovasi, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Perbaikan distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan ekonomi yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Acemoglu, D., & Robinson, (2019) tujuan pembangunan ekonomi meliputi: 1) Peningkatan pendapatan per kapita, 2) Perbaikan kualitas hidup masyarakat, 3) Pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, 4) Penciptaan lapangan kerja, 5) Peningkatan produktivitas dan inovasi.

Meskipun sering digunakan secara bergantian, perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki perbedaan signifikan, peningkatan pertumbuhan ekonomi berada dalam tujuan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih merupakan peningkatan kuantitatif dalam produksi barang dan jasa pada perekonomian dan biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan fokus utama pada

peningkatan output serta mencakup aspek kuantitatif dari perekonomian yang diukur melalui PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) sedangkan pembangunan ekonomi merupakan proses kualitatif dan kuantitatif yang mencakup perubahan struktural, sosial, institusional serta kualitas hidup masyarakat (Vazquez-Barquero & Rodriguez-Cohard, 2022). Pada definisi ini jelas bahwa fokus utama pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif termasuk faktor lingkungan dengan pengukuran yang digunakan dalam pembangunan melalui berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pengukuran pencapaian dilihat dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Indikator pembangunan selanjutnya adalah Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan suatu populasi, dan indikator sosial-ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan (persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan), Tingkat Pengangguran (Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan), Tingkat Melek Huruf (Persentase populasi yang dapat membaca dan menulis). Angka Harapan Hidup (Rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk), Indeks Kebebasan Ekonomi (Mengukur tingkat kebebasan ekonomi dalam suatu negara).

Konsep dan praktik pembangunan terus berevolusi seiring dengan perubahan global yang pesat. *Interconnectivity* yang semakin meningkat antar wilayah menciptakan peluang bagus sekaligus tantangan dalam mencapai pembangunan yang maju dan berkelanjutan. Konsep pembangunan telah bergeser dari fokus sempit pada pertumbuhan ekonomi menjadi pendekatan yang lebih holistik, mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Praktik pembangunan juga terus beradaptasi, merespons tantangan baru seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan disrupsi teknologi. Perubahan global yang pesat menyebabkan dunia mengalami transformasi cepat dalam berbagai aspek - teknologi, geopolitik, demografi, dan lingkungan. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana kita memahami dan mengejar pembangunan. Globalisasi, didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah menciptakan jaringan kompleks yang menghubungkan ekonomi, masyarakat, dan ekosistem di seluruh dunia. Pergeseran konsep pembangunan memerlukan peluang dan tantangan bagi suatu negara. Peluang yang muncul dapat berupa akses lebih luas ke pengetahuan dan teknologi, Peningkatan efisiensi melalui kolaborasi lintas batas, Potensi untuk mempercepat inovasi

dan berbagi praktik terbaik serta peluang ekonomi baru melalui pasar global. Adapun tantangan yang muncul ketika terjadi pergeseran pembangunan ke arah yang lebih kontemporer adalah Kesenjangan yang semakin lebar antara yang "terhubung" dan "tidak terhubung", Risiko ketidakstabilan ekonomi akibat guncangan global, Masalah keamanan siber dan privasi data, Potensi hilangnya identitas budaya lokal.

Pembangunan maju dan berkelanjutan: Konsep ini menekankan perlunya keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Tantangannya adalah merancang strategi pembangunan yang dapat memanfaatkan peluang interkoneksi global sambil memitigasi risikonya. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pembangunan perlu terus mengevaluasi dan mengadaptasi pendekatan mereka. Ini melibatkan analisis mendalam tentang dampak interkoneksi global, pengembangan kerangka kerja yang fleksibel, dan kolaborasi lintas sektor dan batas negara. Pernyataan tersebut menangkap esensi dari kompleksitas dan dinamisme lanskap pembangunan kontemporer. Ini menyoroti pentingnya pendekatan adaptif dan kolaboratif dalam mengejar pembangunan yang maju dan berkelanjutan di era global yang saling terhubung.

Berbicara mengenai karakteristik pembangunan kontemporer dapat dilihat sebagai berikut :

1. Berkelanjutan (*sustainability*),

Karakteristik ini dalam pembangunan kontemporer berarti memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan, pembangunan berkelanjutan memerlukan transformasi sistemik dalam cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan berinteraksi dengan lingkungan alam. Ini berarti bahwa kebijakan dan praktik pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak lintas generasi dan lintas sektor dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem, masyarakat, dan ekonomi (J.D Sachs, 2019). Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang telah menjadi fokus global dalam beberapa dekade terakhir. Karakteristik ini menyeimbangkan antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi

saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan sosial dan pelestarian lingkungan, Biggs et al. (2021) menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam mengelola keberlanjutan, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Contoh studi kasus pembangunan berkelanjutan adalah Costa Rica. Costa Rica telah menjadi model global untuk pembangunan berkelanjutan. Negara ini telah berhasil menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan. Menurut UNDP, (2020) Costa Rica telah mencapai 99% produksi listrik dari sumber energi terbarukan dan berkomitmen untuk menjadi negara karbon netral pada tahun 2050.

2. Inklusivitas dan partisipasi.

Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, dari tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Partisipatif berarti melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan sedangkan inklusif berarti memastikan semua kelompok termasuk yang terpinggirkan terlibat dan mendapat manfaat dari adanya pembangunan. Konsep ini bertujuan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan, memastikan keberlanjutan program pembangunan serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Adapun mekanisme implementasi dari konsep ini sebagai karakteristik pembangunan adalah a) forum warga dan konsultasi publik, b) Pembentukan komite pembangunan berbasis masyarakat, c) penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi (e-Governance). Karakteristik pembangunan ini memiliki manfaat diantaranya peningkatan efektifitas dan efisiensi program pembangunan, penguatan modal sosial dan kohesi masyarakat serta pemberdayaan kelompok marginal. Tantangan pengembangan partisipatif dan inklusi dalam pembangunan adalah mengatasi kesenjangan kekuasaan dalam masyarakat, membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif, menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Karakteristik pembangunan ini merupakan karakteristik berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Menurut Gupta & Vegelin,

(2016) inklusivitas sosial adalah komponen kunci dari pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa manfaat pembangunan terdistribusi secara adil dan tidak ada kelompok yang tertinggal. Pembangunan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal dan rentan. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan peluang ekonomi yang merata. Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. Contoh studi kasus pembangunan inklusif adalah di Afrika. Rwanda telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pembangunan inklusif pasca-genosida. Menurut laporan Djiofack & Niyibizi, (2021) Rwanda telah berhasil mengurangi kemiskinan dari 60% pada tahun 2001 menjadi 38% pada tahun 2017. Negara ini juga telah mencapai kesetaraan gender dalam parlemen, dengan 61% kursi parlemen diduduki oleh perempuan pada tahun 2020. Pendekatan partisipatif dan inklusif bukan hanya sebuah metode, tetapi juga sebuah filosofi pembangunan yang mengakui bahwa masyarakat adalah aktor utama dalam proses pembangunan, bukan hanya penerima manfaat pasif.

3. Inovasi dan Teknologi

Karakteristik pembangunan ini merupakan karakteristik pembangunan berkelanjutan yang memerlukan inovasi dan teknologi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Schwab (2016) berpendapat bahwa Revolusi Industri Keempat telah mengubah lanskap pembangunan, dengan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Era digital telah membuka peluang baru untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan efisiensi, akses informasi yang lebih luas, dan penciptaan model bisnis baru. Namun, ini juga menimbulkan tantangan baru terkait kesenjangan digital dan kebutuhan akan keterampilan baru di pasar tenaga kerja. Adanya kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang masih menjadi permasalahan serius, seperti yang terlihat dalam akses internet yang tidak merata di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas dan investasi dalam sumber daya manusia menjadi aspek krusial dalam strategi

pembangunan nasional. Schot & Steinmueller, (2018) menekankan pentingnya inovasi transformatif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan tidak hanya inovasi teknologi, tetapi juga inovasi sosial dan kelembagaan. Estonia telah menjadi pionir dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembangunan nasional. Menurut Kattel & Mergel, (2019) inisiatif e-governance Estonia telah mengubah penyediaan layanan publik, meningkatkan efisiensi, dan mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi.

4. *Resilience*

Karakteristik pembangunan yang mengedepankan pentingnya ketahanan dalam menghadapi berbagai guncangan dan krisis. Resiliensi dalam konteks pembangunan mengacu pada kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan dan tekanan, baik yang berasal dari faktor alam maupun manusia. Karakteristik ini semakin dianggap krusial dalam perencanaan dan implementasi pembangunan berkelanjutan, terutama di era yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan cepat. Folke et al. (2021) dalam artikelnya di jurnal *Ecology and Society* menekankan bahwa resiliensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bagaimana sistem sosial-ekologis dapat berkembang di tengah perubahan. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan adaptif dan transformatif dalam manajemen resiliensi. Marchese et al. (2020) dalam *Sustainability Science* mengusulkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan konsep resiliensi, keberlanjutan, dan adaptasi dalam konteks pembangunan perkotaan. Mereka berpendapat bahwa pendekatan terpadu ini penting untuk menghadapi tantangan kompleks di masa depan. Bene et al. (2022) dalam *World Development* menyoroti peran resiliensi dalam konteks pembangunan pasca-pandemi COVID-19. Mereka menekankan pentingnya membangun "resiliensi transformatif" yang tidak hanya memungkinkan pemulihan, tetapi juga perubahan positif jangka panjang. Beberapa aspek penting dari resiliensi sebagai karakteristik pembangunan meliputi:

- a. Adaptabilitas: Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi.
- b. Ketahanan: Kekuatan untuk bertahan menghadapi tekanan dan guncangan.

- c. Transformabilitas: Kapasitas untuk berubah dan berkembang menjadi lebih baik.
- d. Inklusivitas: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan.
- e. Keberlanjutan: Memastikan pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya membangun sistem yang tangguh terhadap krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial (Hynes et al., 2020). Karakteristik pembangunan yang tangguh melibatkan diversifikasi ekonomi, penguatan sistem kesehatan dan perlindungan sosial, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa konsep manusia dalam pembangunan semakin relevan di era pasca-pandemi COVID-19, hal menekankan pentingnya memperkuat sistem kesehatan dan perlindungan sosial sebagai fondasi pembangunan manusia yang tangguh. Pendekatan ini membutuhkan perencanaan jangka panjang dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

- a. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan dianggap lebih efektif dan berkelanjutan (Mansuri & Rao, 2024). Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Partisipasi aktif masyarakat juga dipandang sebagai kunci untuk memperkuat tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang mulai bergeser ke arah kontemporer ini memberikan tantangan global tersendiri pada sebuah negara. Isu global yang merupakan tantangan yang hampir dialami semua negara didunia adalah **adanya perubahan iklim**. Tantangan ini merupakan salah satu isu global yang paling mendesak dan mempengaruhi hampir semua aspek pembangunan. Karakteristik pembangunan modern harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim ini. Sebagai contoh, banyak negara kini beralih ke energi terbarukan dan teknologi rendah karbon dalam upaya mitigasi perubahan iklim (IPCC, 2022). Implementasi kebijakan lingkungan yang efektif masih menghadapi

tantangan, terutama di negara-negara berkembang yang masih bergantung pada sumber daya fosil. Urbanisasi yang cepat menjadi ciri khas pembangunan global kontemporer, dengan lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di daerah perkotaan. Hal ini menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kemacetan, polusi, dan ketimpangan sosial. Konsep smart city muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah perkotaan, menggabungkan teknologi dan perencanaan yang berpusat pada manusia (Yigitcanlar, Kankanamge, & Vella, 2021). Namun, implementasinya masih terbatas dan sering kali tidak merata, terutama di kota-kota negara berkembang. Globalisasi ekonomi telah membawa pertumbuhan dan peluang baru, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan yang semakin melebar antara dan di dalam negara. Karakteristik pembangunan global saat ini mencakup upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Contohnya adalah munculnya konsep ekonomi sirkular dan bisnis sosial yang bertujuan mengatasi masalah lingkungan dan sosial sambil tetap menghasilkan keuntungan ekonomi (Geissoderfer, Pieroni, Pigosso, & K.Soufani, 2020). Namun, transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan masih menghadapi hambatan struktural dan resistensi dari berbagai pihak.

Tantangan global lainnya adalah adanya pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu telah mengungkapkan kerentanan sistem global dan mempercepat tren tertentu dalam pembangunan. Karakteristik baru muncul dalam bentuk penekanan pada ketahanan sistem kesehatan, digitalisasi yang dipercepat, dan pergeseran dalam pola kerja global. Sebagai contoh, banyak negara kini berinvestasi dalam penguatan sistem kesehatan publik dan mengembangkan kapasitas produksi vaksin domestik (Nuzzo, Mullen, Snyder, Cicero, & Inglesby, 2019). Distribusi vaksin yang tidak merata antara negara kaya dan miskin menunjukkan bahwa permasalahan ketimpangan global masih belum teratasi sepenuhnya. Karakteristik pembangunan kontemporer mencerminkan respons terhadap tantangan global yang kompleks. Keberlanjutan, inklusivitas, inovasi teknologi, dan resiliensi telah muncul sebagai pilar utama dalam upaya pembangunan modern. Studi kasus dari Rwanda, Costa Rica, dan Estonia menunjukkan bagaimana karakteristik ini dapat diimplementasikan dalam konteks yang berbeda-beda. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak ada pendekatan "satu ukuran untuk semua" dalam pembangunan.

Setiap negara perlu mengadaptasi strategi pembangunan mereka sesuai dengan kondisi lokal, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip global ini. Memahami hakikat manusia sebagai makhluk yang kompleks dan multidimensi sangat penting dalam merancang pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan yang berpusat pada manusia harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan, partisipasi, holistik, dan adaptif. Dengan pendekatan ini, kita dapat berharap untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan harmonis di masa depan. Meskipun konsep pembangunan berbasis manusia telah banyak diadopsi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi merupakan beberapa isu yang perlu dihadapi. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang hakikat manusia dan karakteristik pembangunan yang ideal, kita dapat merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan oleh (A Sen, 2019), pembangunan sejati harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia, bukan sekadar peningkatan angka-angka ekonomi.

Berbeda dengan negara maju, negara sedang berkembang memiliki tantangan global yang klasik akan tetapi memiliki keseriusan tersendiri sehingga pemanganan dalam menghadapi masalah perlu di perhatikan dari berbagai aspek. Tantangan di global di negara berkembang diantaranya adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, perubahan dan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat (penyebaran penyakit menular, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan yang rendah dan kurangnya tenaga kerja terampil, keterbatasan infrastruktur dan teknologi serta akses informasi, juga ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang tak terbarukan dan krisis politik dan ketidakstabilan pemerintah. Semua tantangan ini berkontribusi terhadap kesulitan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Bagaimana solusi menghadapi tantangan global di negara sedang berkembang?.

1. Peran teknologi dan inovasi

Salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan global di negara berkembang adalah melalui adopsi inovasi teknologi. Teknologi dapat memainkan peran penting dalam berbagai bidang:

- a) Pendidikan: Peningkatan akses ke pendidikan melalui platform digital dan pembelajaran daring dapat membantu mempercepat pemerataan pendidikan.
- b) Kesehatan: Penggunaan teknologi kesehatan seperti telemedicine dan sistem informasi kesehatan dapat memperluas akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil.
- c) Pertanian: Aplikasi teknologi pada pertanian seperti *precision farming* dan irigasi cerdas dapat membantu meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan.
- d) Energi terbarukan: Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta membantu negara berkembang mengurangi dampak perubahan iklim.

Namun, tantangan dalam mengadopsi teknologi termasuk keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap internet, yang masih menjadi masalah di banyak negara berkembang.

2. Penguatan lembaga pemerintah dan institusi ekonomi

Solusi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh negara sedang berkembang adalah memperkuat lembaga pemerintahan dan institusi ekonomi. Penguatan kelembagaan menjadikan efisiensi dalam setiap kegiatan ekonomi. Negara berkembang perlu memperkuat lembaga pemerintahan dan institusi ekonomi untuk menangani tantangan global dengan lebih efektif. Stabilitas politik, transparansi, dan penegakan hukum yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. Selain itu, reformasi kebijakan yang mendukung inklusivitas, seperti kebijakan perpajakan yang adil dan transparan, distribusi sumber daya yang merata, serta pemberdayaan kelompok marginal, sangat penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial.

3. Kolaborasi Global dan Dukungan Internasional

Negara berkembang sering kali membutuhkan bantuan dari negara maju dan organisasi internasional dalam bentuk:

- a) Transfer teknologi: Negara maju dapat berbagi teknologi mutakhir dengan negara berkembang.

- b) Pembiayaan: Investasi asing langsung (FDI) dan bantuan pembangunan internasional dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- c) Perjanjian internasional: Kolaborasi dalam menangani isu perubahan iklim dan isu-isu lintas batas lainnya memerlukan komitmen global yang kuat, di mana negara berkembang juga harus diikutsertakan secara aktif.

Namun, penting bagi negara berkembang untuk tidak bergantung secara penuh pada bantuan internasional. Upaya untuk memperkuat kapasitas dalam negeri melalui investasi lokal, pengembangan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi juga harus menjadi prioritas.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Negara berkembang harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui: Peningkatan akses pendidikan berkualitas. Peningkatan sumberdaya berkualitas melalui pemberdayaan sumber daya yang berkualitas berupa pendidikan formal maupun non formal serta kemudahan dalam mengakses pendidikan tersebut dapat meningkatkan kapasitas Sumberdaya manusia sehingga lebih memiliki *value*, sehingga dapat memberikan solusi dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya adalah Pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar global serta Peningkatan kualitas kesehatan yang memungkinkan masyarakat untuk produktif.

5. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Negara berkembang juga perlu mengadopsi model pembangunan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan ekonomi hijau. Dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan meminimalkan dampak lingkungan, negara-negara ini dapat berkembang tanpa merusak ekosistem yang mereka miliki. Konsep ini mengedepankan dua pendekatan yang saling berkaitan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan berkelanjutan dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan geberasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. terdapat tiga pilar dalam konsep ini yaitu **Ekonomi**: Pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. **Sosial**: Menjamin keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup dan **Lingkungan**: Memastikan kelestarian

lingkungan dengan menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi polusi, dan mengelola sumber daya alam secara bijak.

Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Prinsip utama ekonomi hijau adalah: **Efisiensi Sumber Daya**: Memaksimalkan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang efisien untuk mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan. **Emisi Rendah**: Mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi ke energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan serta **Inklusivitas Sosial**: Menciptakan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merugikan lingkungan. Ekonomi hijau adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi hijau, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tetap berlanjut tanpa merusak lingkungan, sekaligus menciptakan inklusi sosial. Kedua konsep ini sejalan dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan sosial, dan menjaga ekosistem.

Melalui integrasi ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan, negara-negara dapat menciptakan model ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan rendah karbon, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk menghadapi tantangan global, negara berkembang harus mengadopsi pendekatan **multidimensi** yang mencakup teknologi, reformasi institusi, kolaborasi internasional, pemberdayaan manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi yang terintegrasi dan dukungan dari berbagai pihak, negara berkembang dapat mengatasi tantangan global secara efektif dan mencapai kemajuan yang lebih besar di masa depan.

Hakekat manusia dan karakteristik pembangunannya memberikan sebuah pandangan bagaimana manusia sebagai aktor dapat berperan dalam pembangunan, dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian setiap masalah-masalah-masalah pembangunan. Manusia sebagai pelaku ekonomi baik dari sisi konsumen, produsen dan regulator berpartisipasi dalam pengembangan diri dan negara sehingga pembangunan yang mensejahterakan dalam sebuah negara terwujud.

BAB 2 PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

GLOBAL DAN NASIONAL

Era globalisasi yang semakin kompleks, isu-isu pembangunan global menjadi fokus utama bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi pembangunan di seluruh dunia. Pembangunan global tidak lagi dapat dipandang sebagai proses yang terisolasi dalam batas-batas negara, melainkan sebagai suatu fenomena yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam skala global (Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G, Mazzucato, M., Messner, D, & Nakicenovic, N Rockström, 2019) Tantangan-tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pandemi global telah memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan kolaboratif dan holistik dalam mengatasi permasalahan pembangunan kontemporer tersebut.

A. ISU-ISU PEMBANGUNAN GLOBAL

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Global

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang telah lama menjadi fokus perhatian para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pembangunan. Dalam dekade terakhir, pemahaman kita tentang kemiskinan telah berkembang jauh melampaui definisi sederhana tentang kekurangan pendapatan. Teori-teori kontemporer mengakui bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi sosial-politik (Alkire, Kanagaratman, & Suppa, 2021). Teori ini menekankan pentingnya memahami kemiskinan tidak hanya dari segi moneter, tetapi juga dari berbagai dimensi

kesejahteraan manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan multidimensi dapat mengungkapkan pola-pola deprivasi yang tidak terlihat jika hanya menggunakan indikator pendapatan. Pendekatan ini telah diadopsi oleh berbagai organisasi internasional dan pemerintah nasional dalam upaya mereka untuk memahami dan mengatasi kemiskinan secara lebih komprehensif.

Teori lain yang mendapat perhatian adalah pendekatan kapabilitas yang dipopulerkan oleh Amartya Sen. Teori ini berfokus pada kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi yang mereka nilai dalam hidup. Baru-baru ini, Robeyns, (2020) mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan mengusulkan kerangka kerja kapabilitas yang lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kemiskinan tidak hanya sebagai kurangnya sumber daya, tetapi juga sebagai keterbatasan dalam pilihan dan kesempatan yang tersedia bagi individu. Teori-teori kemiskinan juga harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Penelitian terkini oleh Wollburg, Hallegatte, & Mahler, (2023). menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki potensi untuk mendorong jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Teori-teori baru tentang kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perkembangan teori tentang kemiskinan semakin disesuaikan dengan perkembangan zaman, adanya perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah memunculkan perspektif baru dalam teori kemiskinan. Roberts & Hernandez, (2019) mengeksplorasi bagaimana kesenjangan digital dapat menciptakan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan eksklusi sosial. Mereka berpendapat bahwa akses terhadap teknologi dan keterampilan digital harus dimasukkan sebagai dimensi penting dalam pemahaman kontemporer tentang kemiskinan. Teori-teori ini menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan tradisional, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan era digital.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global dan nasional. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem selama beberapa

dekade terakhir, masalah ini tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Menurut laporan Bank Dunia, sekitar 9,2% populasi dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020, dengan pendapatan kurang dari \$2,15 per hari (World Bank, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa upaya global untuk mengatasi kemiskinan masih memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih intensif. Di tingkat nasional, banyak negara menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketidakstabilan politik seringkali memperparah situasi kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Ravallion, (2020) menunjukkan bahwa kemajuan dalam pengentasan kemiskinan seringkali tidak merata, dengan beberapa kelompok masyarakat yang tetap terpinggirkan meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi kemiskinan global, membalikkan sebagian besar kemajuan yang telah dicapai dalam dekade terakhir. Laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) memperkirakan bahwa pandemi telah mendorong lebih dari 100 juta orang kembali ke dalam kemiskinan ekstrem (United Nations Development, 2021). Dampak ekonomi yang disebabkan oleh lockdown, gangguan rantai pasokan, dan hilangnya pekerjaan telah memperlihatkan kerentanan sistem sosial-ekonomi global dan pentingnya membangun ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, diperlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Banerjee, Duflo, & Kremer, (2020) menekankan pentingnya intervensi berbasis bukti dalam program pengentasan kemiskinan, seperti transfer tunai bersyarat, program pemberdayaan ekonomi, dan investasi dalam infrastruktur dasar. Selain itu, fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan strategi kunci dalam memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 tentang Tanpa Kemiskinan, memerlukan komitmen global yang lebih kuat dan kerjasama internasional yang erat. Hickel, (2020) berpendapat bahwa untuk benar-benar mengatasi kemiskinan global, diperlukan reformasi struktural dalam sistem ekonomi global, termasuk peninjauan ulang

kebijakan perdagangan internasional dan penghapusan hutang negara berkembang. Hanya dengan pendekatan holistik dan berkeadilan, kita dapat berharap untuk menciptakan dunia di mana kemiskinan bukan lagi menjadi realitas bagi jutaan orang. Hal ini menekankan pentingnya dua aspek utama dalam upaya pengentasan kemiskinan global yaitu *Aspek pertama* pendekatan holistik yang mengacu pada strategi komprehensif dan multidimensi dalam mengatasi kemiskinan. Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait dengan berbagai faktor seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan kebijakan sosial-politik. Dengan memahami dan menangani semua aspek ini secara bersamaan, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Aspek kedua yaitu berkeadilan dimana aspek ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ini berarti memastikan bahwa sumber daya dan peluang didistribusikan secara adil, menghapuskan diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pendekatan yang berkeadilan juga melibatkan pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Pendekatan holistik dan berkeadilan ini menyiratkan bahwa upaya-upaya parsial atau yang hanya berfokus pada satu aspek saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan secara global. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan adil untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.

Selain kemiskinan isu permasalahan global dan nasional selanjutnya adalah ketimpangan. Ketimpangan telah menjadi isu global yang semakin mendesak dalam diskursus global dan nasional dalam selama dekade terakhir, dengan implikasi yang meluas baik di tingkat internasional maupun nasional. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi sumber daya dan kesempatan yang tidak merata di antara individu, kelompok, dan negara. Teori ketimpangan menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap disparitas ini, serta dampaknya terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik (Piketty & Saez, 2020). Dalam konteks global, ketimpangan antar negara telah mengalami perubahan signifikan, dengan beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan pesat

sementara yang lain tertinggal. Sementara itu, di tingkat nasional, banyak negara menghadapi tantangan dalam mengatasi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang semakin melebar. bFenomena ini ditandai oleh kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin, baik dalam hal pendapatan maupun kekayaan. Menurut laporan World Inequality Report 2022, 10% populasi terkaya di dunia menguasai 76% dari total kekayaan rumah tangga global, sementara 50% populasi termiskin hanya memiliki 2% (Channel, Piketty, Saez, & Zucman, 2022). Kesenjangan yang ekstrem ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan politik di berbagai negara.

Ketimpangan di tingkat nasional, memiliki dampak yang sangat nyata terhadap kohesi sosial dan pembangunan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Ostry, Berg, & Tsangarides, (2019) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan kurang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk berkurangnya mobilitas sosial, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta menurunnya permintaan agregat akibat konsentrasi kekayaan pada segelintir individu. Di Indonesia, meskipun telah terjadi penurunan indeks Gini dari 0,41 pada tahun 2011 menjadi 0,38 pada tahun 2021, ketimpangan masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional (BPS, 2022). Pandemi COVID-19 telah memperparah ketimpangan yang ada, dengan dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok rentan. Laporan dari International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa krisis akibat pandemi telah menyebabkan hilangnya jam kerja setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu pada tahun 2020, dengan dampak terbesar dirasakan oleh pekerja di sektor informal dan mereka yang berada di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (International Labour Organization, 2021). Selain itu, penutupan sekolah dan transisi ke pembelajaran jarak jauh telah memperlebar kesenjangan pendidikan antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin, yang berpotensi memperburuk ketimpangan di masa depan.

Era globalisasi dan kemajuan teknologi ketimpangan terjadi pada teori ketimpangan dimensi baru yaitu ketimpangan digital. Pada era ini

harus mempertimbangkan dimensi baru dari ketidaksetaraan. Adanya ketimpangan yang muncul sebagai bentuk ketimpangan yang signifikan, mempengaruhi akses individu dan komunitas terhadap informasi, peluang ekonomi, dan partisipasi sosial-politik (Dijk, 2020). Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lingkungan semakin diakui sebagai faktor yang dapat memperburuk ketimpangan, dengan dampak yang tidak proporsional terhadap komunitas yang rentan dan negara-negara berkembang. Menghadapi kompleksitas dan persistensi ketimpangan, para peneliti dan pembuat kebijakan terus mengembangkan pendekatan baru untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Salah satu arah yang menjanjikan adalah fokus pada "ketimpangan kesempatan" daripada hanya hasil akhir (Roemer & Trannoy, 2016). Pendekatan ini menekankan pentingnya menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi sebagai fondasi untuk masyarakat yang lebih adil. Selain itu, ada pengakuan yang semakin besar terhadap pentingnya kebijakan yang bersifat inklusif dan partisipatif dalam mengatasi akar penyebab ketimpangan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi solusi. Upaya untuk mengatasi ketimpangan global semakin kompleks karena adanya interkoneksi global dan dampak perubahan iklim. Negara-negara berkembang paling rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan, memiliki sumber daya yang lebih terbatas untuk mengatasi permasalahan seperti ketimpangan tersebut. menyebabkan terciptanya siklus yang sulit diputus, di mana ketimpangan yang ada semakin memperdalam kerentanan terhadap krisis di masa depan. Upaya untuk mengatasi ketimpangan memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan kebijakan fiskal, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi. Piketty & Saez, (2020) menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan progresif dan peningkatan investasi publik dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai langkah kunci untuk mengurangi ketimpangan. Transparansi kepemilikan aset dan penguatan hak-hakpekerja untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di tingkat global, kerjasama internasional dalam mengatasi penghindaran pajak dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, seperti yang digariskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), menjadi semakin penting dalam upaya mengurangi ketimpangan antar negara.

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan secara global maupun nasional merupakan tantangan kompleks baik skala global maupun nasional yang memerlukan perhatian serius dan tindakan kolektif, baik di tingkat nasional maupun global. Mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya penting untuk mewujudkan keadilan sosial, tetapi juga crucial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika ketimpangan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat, kita dapat berharap untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur bagi semua.

2. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan

Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan global yang mendesak dan terkoordinasi. Peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, dan peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi memiliki dampak luas pada ekosistem, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Laporan terbaru dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menekankan perlunya pengurangan emisi gas rumah kaca yang cepat dan substansial untuk membatasi pemanasan global hingga $1,5^{\circ}\text{C}$ di atas tingkat pra-industri (IPCC, 2022). Transisi menuju ekonomi rendah karbon menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan. Di satu sisi, diperlukan investasi besar dalam teknologi bersih, infrastruktur yang tangguh terhadap iklim, dan praktik berkelanjutan di semua sektor. Di sisi lain, transisi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang. Namun, penting untuk memastikan bahwa transisi ini adil dan inklusif, terutama bagi komunitas dan pekerja yang bergantung pada industri berbasis bahan bakar fosil (Hepburn et al., 2020). Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Peningkatan suhu global, naiknya permukaan air laut, dan peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi merupakan bukti nyata dari dampak aktivitas manusia terhadap sistem iklim Bumi (IPCC, 2021). Kegiatan antropogenik, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, telah menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang pada gilirannya mengakibatkan pemanasan global dan perubahan pola iklim (Pierre Friedlingstein et al, 2022)

Keberlanjutan lingkungan menjadi semakin penting dalam konteks perubahan iklim. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia saat ini dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Transisi menuju ekonomi rendah karbon dan praktik pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat global (Sachs, 2023). Namun, implementasi kebijakan dan tindakan yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksetaraan global, konflik kepentingan, dan kurangnya kemauan politik. Keberlanjutan lingkungan juga mencakup perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Hilangnya habitat dan eksploitasi berlebihan telah menyebabkan penurunan populasi spesies yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengancam keseimbangan ekosistem dan jasa lingkungan yang penting bagi kesejahteraan manusia. Diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan konservasi, restorasi ekosistem, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis keanekaragaman hayati ini

Di tingkat nasional, negara-negara menghadapi dilema antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi risiko signifikan dari dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut dan perubahan pola curah hujan. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim tercermin dalam komitmennya terhadap Perjanjian Paris dan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketergantungan pada bahan bakar fosil dan deforestasi yang terus berlanjut. Inovasi teknologi dan perubahan perilaku masyarakat memainkan peran kunci dalam mengatasi krisis iklim. Pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik pertanian berkelanjutan merupakan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (IRENA and ILO, 2022). Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku dan mendukung kebijakan yang proaktif (Otto et al., 2020)

Kerjasama internasional menjadi semakin penting dalam mengatasi perubahan iklim sebagai masalah global. Kerangka kerja seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB dan Perjanjian Paris memberikan landasan untuk aksi kolektif. Namun, kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam hal sumber daya dan kapasitas untuk mengatasi perubahan iklim tetap menjadi tantangan signifikan. Pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas merupakan area kunci yang memerlukan perhatian lebih besar dari komunitas internasional untuk memastikan respons yang adil dan efektif terhadap krisis iklim global (Gupta & Vegelin, 2016)

3. Urbanisasi dan Migrasi Internasional

Urbanisasi terus menjadi tren global yang dominan, dengan proporsi penduduk perkotaan dunia diproyeksikan mencapai 68% pada tahun 2050 (Rudy P.Tambunan, Chotib, Syarifah F.Syaukat, 2014). Pertumbuhan perkotaan yang cepat, terutama di negara-negara berkembang, menghadirkan tantangan yang kompleks dalam hal penyediaan infrastruktur, layanan dasar, dan pekerjaan yang layak. Namun, kota-kota juga merupakan pusat inovasi dan produktivitas ekonomi, menawarkan peluang untuk pembangunan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Urbanisasi merupakan fenomena global yang telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Proses ini ditandai dengan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, serta pertumbuhan dan ekspansi wilayah perkotaan. Teori urbanisasi telah berkembang seiring waktu, mencakup berbagai perspektif dari bidang sosiologi, geografi, ekonomi, dan perencanaan kota.

Salah satu teori utama yang menjelaskan urbanisasi adalah "Teori Modernisasi". Teori ini berpendapat bahwa urbanisasi merupakan konsekuensi alami dari pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Orum, Gottdiener, & Johnstone, (2019) berpendapat, modernisasi mendorong pergeseran dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi industri dan jasa, yang terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota-kota menjadi pusat inovasi, produktivitas, dan peluang ekonomi, menarik migrasi dari daerah pedesaan. Faktor-faktor yang mendorong urbanisasi sangat beragam dan saling terkait. Chen, Sui, Liu, Liu, & Y. Huang, (2020) mengidentifikasi lima faktor utama: (1) peluang ekonomi, (2) akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, (3) infrastruktur dan

fasilitas modern, (4) perubahan iklim dan degradasi lingkungan di daerah pedesaan, dan (5) globalisasi. Peluang ekonomi, khususnya, telah menjadi pendorong utama urbanisasi di negara-negara berkembang, di mana kesenjangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan sering kali signifikan.

Namun, urbanisasi juga membawa tantangan besar. Patel, King, Phelps, & Sanderson, (2017) menekankan bahwa pertumbuhan perkotaan yang cepat dan tidak terencana dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan, polusi, pemukiman kumuh, dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, konsep "urbanisasi berkelanjutan" telah muncul sebagai respons terhadap tantangan ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan kota yang terintegrasi, infrastruktur hijau, dan kebijakan inklusif untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan memberikan manfaat bagi semua penduduk sambil meminimalkan dampak lingkungan. Melihat ke masa depan, Zhang & Li, (2023) berpendapat bahwa teknologi akan memainkan peran kunci dalam membentuk trajektori urbanisasi. Konsep "kota pintar" yang memanfaatkan *Internet of Things (IoT)*, kecerdasan buatan, dan analisis data besar berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan perkotaan, kualitas hidup warga, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa adopsi teknologi harus disertai dengan kebijakan yang menjamin keadilan dan inklusivitas digital untuk mencegah melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi di daerah perkotaan.

Migrasi internasional telah menjadi isu yang semakin penting dan sering diperdebatkan dalam agenda pembangunan global. Konflik, perubahan iklim, dan kesenjangan ekonomi mendorong perpindahan penduduk lintas batas negara dalam skala besar. Sementara migrasi dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi negara asal dan tujuan, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal integrasi, perlindungan hak-hak migran, dan pengelolaan arus migrasi yang kompleks (IOM, 2020). Urbanisasi dan migrasi internasional telah menjadi fenomena global yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Kedua proses ini saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global. Teori-teori yang menjelaskan dinamika ini terus berkembang seiring dengan perubahan pola dan karakteristik pergerakan manusia di era globalisasi

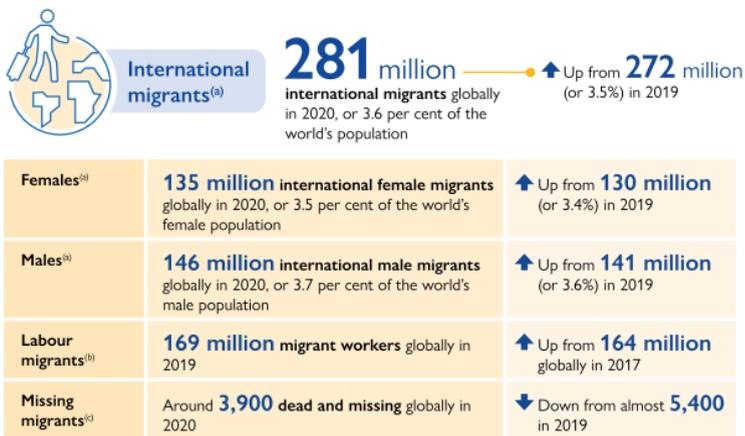
Castles & Miller, (1998). Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami urbanisasi dan migrasi internasional adalah "Teori Jaringan Migrasi" yang dikembangkan oleh Massey, (1993) dan terus diperbarui hingga saat ini. Teori ini menekankan peran jaringan sosial dalam memfasilitasi dan mempertahankan arus migrasi. Menurut teori ini, migran awal membentuk jembatan sosial yang mengurangi biaya dan risiko migrasi bagi calon migran berikutnya. Hal ini menciptakan efek bola salju yang mempercepat urbanisasi di daerah tujuan dan depopulasi di daerah asal (S. Vertovec, 2021). Dalam konteks global, "Teori Sistem-Dunia" yang diperkenalkan oleh Wallerstein (1974) dan diperbarui oleh Sassen, (2018) memberikan perspektif makro tentang bagaimana urbanisasi dan migrasi internasional terkait dengan ketidaksetaraan struktural dalam sistem ekonomi global. Teori ini berpendapat bahwa penetrasi kapitalisme global ke negara-negara berkembang menciptakan populasi yang tercerabut dari cara hidup tradisional dan siap untuk bermigrasi ke pusat-pusat urban global. Kota-kota global seperti New York, London, dan Tokyo menjadi magnet bagi migran internasional, menciptakan tantangan dan peluang baru dalam tata kelola urban (Sassen, 2018).

Di tingkat nasional, "Teori Transisi Mobilitas" yang dikemukakan oleh Zelinsky, (1971) dan diperbarui oleh de Haas, (2021) menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pola urbanisasi dan migrasi berubah seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Teori ini menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan, urbanisasi didorong oleh migrasi internal dari desa ke kota. Namun, seiring dengan peningkatan pembangunan, migrasi internasional menjadi semakin penting, dengan negara-negara beralih dari pengirim migran menjadi penerima migran. Pemahaman ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dalam menavigasi tantangan demografis dan ekonomi yang muncul dari perubahan pola mobilitas. Selanjutnya "Teori Migrasi Lingkungan" yang dikembangkan oleh Black et al.,(2011) dan diperbarui oleh Hoffmann et al., (2020) menyoroti peran perubahan lingkungan dalam mendorong urbanisasi dan migrasi internasional. Teori ini berpendapat bahwa degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam dapat menjadi faktor pendorong yang kuat bagi migrasi, baik internal maupun internasional. Hal ini menciptakan kategori baru "migran lingkungan"

atau "pengungsi iklim" yang memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem, teori ini menjadi semakin relevan dalam memahami dinamika urbanisasi dan migrasi kontemporer (Hoffmann et al., 2020)

Migrasi internasional telah menjadi fenomena global yang kompleks dan multidimensi, mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Teori-teori migrasi internasional berusaha menjelaskan pola, penyebab, dan konsekuensi dari perpindahan manusia lintas batas negara. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah "Teori Sistem Migrasi" yang dikembangkan oleh Mabogunje, (1970) dan terus diperbarui oleh para peneliti kontemporer Bakewell, (2014). Teori ini menekankan bahwa migrasi internasional terjadi dalam konteks sistem yang saling terhubung, di mana faktor-faktor di negara asal dan tujuan berinteraksi untuk membentuk arus migrasi. Faktor-faktor yang mendorong migrasi internasional dapat dikategorikan menjadi faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*). Faktor pendorong meliputi kondisi di negara asal yang mendorong orang untuk bermigrasi, seperti konflik, kemiskinan, dan kurangnya peluang ekonomi. Di sisi lain, faktor penarik adalah kondisi di negara tujuan yang menarik migran, seperti peluang kerja yang lebih baik, standar hidup yang lebih tinggi, dan stabilitas politik. (Czaika & Reinprecht, 2020) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa faktor-faktor ini semakin kompleks di era globalisasi, dengan teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk aspirasi dan keputusan migrasi. "*New Economics of Labor Migration*" (NELM) yang dikembangkan oleh Stark & Bloom, (1985) dan diperbarui oleh (Oded Stark, 2018) menawarkan perspektif yang lebih nuansa. Teori ini berpendapat bahwa keputusan migrasi tidak hanya dibuat oleh individu, tetapi juga oleh unit keluarga atau rumah tangga sebagai strategi untuk mendiversifikasi risiko ekonomi, pentingnya remitansi dalam ekonomi migrasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pembangunan di negara asal. Studi terbaru oleh Clemens et al. (2023) menunjukkan bahwa remitansi dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan di negara-negara berkembang.

Teori jaringan sosial dalam migrasi, yang dipopulerkan oleh D. S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, & Adela Pellegrino, (1993) dan diperbarui oleh Garip & Asad, (2015) menekankan peran penting koneksi interpersonal dalam memfasilitasi dan mempertahankan arus migrasi. Jaringan migran, yang terdiri dari ikatan keluarga, persahabatan, dan komunitas, dapat menurunkan biaya dan risiko migrasi serta meningkatkan kemungkinan migrasi internasional. Penelitian terbaru oleh Vullnetari, (2020) menunjukkan bagaimana jaringan sosial transnasional telah berevolusi di era digital, memungkinkan migran untuk mempertahankan ikatan yang kuat dengan negara asal mereka sambil berintegrasi di negara tujuan. Dalam konteks global yang semakin tidak pasti, teori-teori baru seperti "Environmental Migration Theory" yang dikembangkan oleh Piguet, (2013) dan diperbarui oleh Rigaud, et al, (2021) menjadi semakin relevan. Teori ini meneliti bagaimana perubahan lingkungan dan iklim dapat menjadi pendorong utama migrasi internasional di masa depan. Studi terbaru oleh Cattaneo, C., et al, (2019) menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan peristiwa cuaca ekstrem, dapat mengakibatkan perpindahan massal dan menciptakan kategori baru "pengungsi iklim". Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner dalam memahami dan mengelola migrasi internasional di abad ke-21. Data migrasi menurut IOM, (2022) menunjukkan kenaikan 3,6 persen dari tahun sebelumnya, berbagai faktor penyebab migrasi internasional perlu kebijakan efektif dalam pengelolaannya.



Gambar 2.1 Data Migrasi Internasional (IOM, 2022)

Kebijakan yang efektif untuk mengelola urbanisasi dan migrasi memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, perbaikan tata kelola kota, dan pengembangan sistem migrasi yang aman, teratur, dan reguler. Kerjasama internasional dan regional juga penting untuk mengatasi akar penyebab migrasi paksa dan memaksimalkan potensi positif darimobilitas manusia (OECD, 2020).

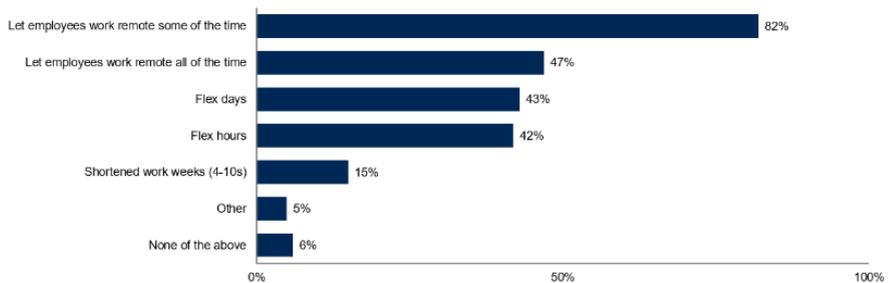
4. Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap Tenaga Kerja

Revolusi industri keempat, yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi digital lainnya, sedang mengubah lanskap pekerjaan secara global. Otomatisasi dan digitalisasi mengancam banyak pekerjaan tradisional, terutama yang melibatkan tugas-tugas rutin dan berulang. Namun, pada saat yang sama, teknologi baru juga menciptakan peluang kerja baru dalam bidang-bidang seperti analisis data, pengembangan perangkat lunak, dan ekonomi platform. Selain itu, perkembangan teknologi juga mengubah sifat pekerjaan itu sendiri, dengan meningkatnya prevalensi pekerjaan jarak jauh, ekonomi gig, dan bentuk-bentuk pekerjaan fleksibel lainnya. Sementara ini dapat menawarkan fleksibilitas dan peluang baru bagi banyak pekerja, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan sosial, hak-hak pekerja, dan keamanan kerja dalam ekonomi digital. Diperlukan kerangka regulasi yang inovatif untuk memastikan bahwa manfaat dari transformasi digital ini didistribusikan secara adil dan berkelanjutan (UNCTAD, 2021). Beberapa dekade ini, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap dunia kerja secara signifikan. Digitalisasi, pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan serba otomatis menghadirkan kemudahan, peluang sekaligus tantangan bagi tenaga kerja global. *World Economic Forum*, 2023) melaporkan bahwa hingga tahun 2025, 85 juta pekerjaan mungkin akan tergantikan oleh pergeseran pembagian kerja antara manusia dan mesin, sementara 97 juta peran baru mungkin akan muncul yang lebih sesuai dengan pembagian kerja baru antara manusia, mesin, dan algoritma

Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi adalah peningkatan produktivitas. Automasi dan AI telah memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi dan layanan mereka.

Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengangguran teknologi. Benedikt & Osborne, (2016) memperkirakan bahwa sekitar 47% pekerjaan di Amerika Serikat berisiko tinggi untuk diotomatisasi dalam dua dekade mendatang. Meskipun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa teknologi juga menciptakan pekerjaan baru, seperti yang terjadi dalam revolusi industri sebelumnya. Perubahan teknologi juga telah mengubah sifat pekerjaan itu sendiri. Munculnya ekonomi gig dan platform kerja digital telah menciptakan bentuk pekerjaan yang lebih fleksibel namun juga lebih tidak stabil. Pesatnya perkembangan teknologi juga menuntut pekerja untuk terus memperbarui keterampilan mereka. Menurut penelitian (Manyika et al., 2017), hingga 375 juta pekerja (14% dari angkatan kerja global) mungkin perlu beralih kategori pekerjaan dan mempelajari keterampilan baru karena otomatisasi dan AI pada tahun 2030.

Di sisi lain, teknologi juga telah membuka peluang baru bagi tenaga kerja. Pekerjaan jarak jauh dan kolaborasi virtual yang dimungkinkan oleh teknologi digital telah meningkatkan fleksibilitas dan akses ke peluang kerja global. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren ini, dengan banyak perusahaan yang mengadopsi model kerja hybrid atau sepenuhnya remote. Menurut (Arlington, 2020), sebuah survey yang dilakukan Gartner.Inc menunjukkan bahwa 48% karyawan kemungkinan akan bekerja secara remote setidaknya sebagian waktu pasca pandemi, dibandingkan dengan 30% sebelum pandemi. Lihat gambar 2.2



Gambar 2.2 *Company leader intentions regarding flexible working after COVID-19 (survey gartner, 2020)*

Menghadapi perubahan ini, pemerintah dan organisasi perlu mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi masa depan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan ulang, pengembangan kebijakan yang mendukung pembelajaran seumur hidup, dan penciptaan jaring pengaman sosial yang kuat untuk pekerja yang terkena dampak negatif dari perubahan teknologi. World Economic Forum, (2023) menekankan pentingnya upskilling dan reskilling tenaga kerja global, dengan memperkirakan bahwa 44% keterampilan inti pekerja akan berubah dalam lima tahun ke depan.

Kesenjangan keterampilan menjadi tantangan utama dalam menghadapi transformasi teknologi ini. Banyak pekerja berisiko tertinggal karena tidak memiliki keterampilan digital dan kognitif tingkat tinggi yang semakin dibutuhkan di pasar kerja modern. Ini menekankan pentingnya pendidikan seumur hidup dan pelatihan ulang untuk memastikan bahwa angkatan kerja dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomi yang berubah cepat. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk memastikan transisi yang adil menuju ekonomi digital (ILO, 2019)

B. TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat hambatan-hambatan struktural yang perlu diatasi. Secara nasional, empat aspek krusial yang sering menjadi hambatan utama adalah ketergantungan ekonomi dan hutang luar negeri, korupsi dan tata kelola yang lemah, serta infrastruktur yang tidak memadai dan Kesenjangan gender dan sosial. Masing-masing faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap trajektori pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut.

1. Ketergantungan Ekonomi dan Hutang Luar Negeri

Teori ketergantungan ekonomi, yang berakar pada pemikiran strukturalis Amerika Latin pada tahun 1950-an dan 1960-an, tetap relevan dalam memahami dinamika ekonomi global kontemporer. Teori ini berpendapat bahwa ketidaksetaraan global yang ada saat ini berakar pada sejarah kolonialisme dan imperialisme, yang telah menciptakan hubungan ekonomi yang tidak seimbang antara negara maju (pusat) dan negara

berkembang (pinggiran). Dalam konteks modern, ketergantungan ini sering dimanifestasikan melalui pola perdagangan yang tidak menguntungkan dan akumulasi hutang luar negeri (Vernengo & Pérez Caldentey, 2020). Salah satu aspek utama dari ketergantungan ekonomi adalah ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Banyak negara berkembang masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan komoditas pertanian, yang harganya sangat fluktuatif di pasar global. Penelitian oleh Akyüz & Gore, (1996) menunjukkan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas cenderung mengalami volatilitas ekonomi makro yang lebih tinggi dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih lambat. Ketergantungan ini membuat negara-negara berkembang rentan terhadap guncangan eksternal dan membatasi kemampuan mereka untuk mendiversifikasi ekonomi mereka ke sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

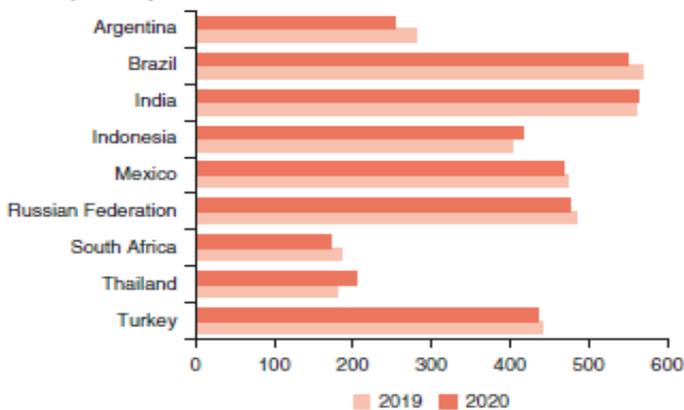
Hutang luar negeri menjadi komponen penting dalam teori ketergantungan ekonomi modern. M. Ahyan Kose, Peter Nagle, Franziska Ohnsorge, & Naotaka Sugawa, (2021) menganalisis tren hutang global dan menemukan bahwa rasio hutang terhadap PDB di negara-negara berkembang telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, mencapai level tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Hutang ini sering digunakan untuk membiayai defisit anggaran dan proyek-proyek pembangunan, tetapi juga dapat menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Pembayaran bunga yang tinggi dapat mengalihkan sumber daya dari investasi produktif, sementara persyaratan pinjaman sering kali membatasi ruang kebijakan pemerintah (Stiglitz & Rashid, 2020)

Krisis COVID-19 telah memperburuk situasi hutang di banyak negara berkembang. Laporan Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa pandemi telah membalikkan kemajuan pengurangan kemiskinan selama dua dekade dan meningkatkan kerentanan fiskal di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sebagai respons, beberapa ekonom dan pembuat kebijakan telah menyerukan reformasi arsitektur keuangan global. Misalnya, Kevin P Gallagher & Richard Kozul-Wright, (2021) mengusulkan pendekatan baru untuk restrukturisasi hutang dan pembiayaan pembangunan yang lebih selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, beberapa negara telah berhasil mengurangi ketergantungan ekonomi mereka melalui strategi

pembangunan yang inovatif. Lin, J. Y., & Wang, (2023) menganalisis kasus-kasus sukses di Asia Timur, di mana negara-negara seperti Korea Selatan dan China telah berhasil mentransformasi ekonomi mereka melalui kebijakan industri yang ditargetkan dan investasi dalam modal manusia. Mereka berpendapat bahwa negara-negara berkembang lainnya dapat belajar dari pengalaman ini, dengan menekankan pentingnya pengembangan kapasitas domestik, diversifikasi ekonomi, dan negosiasi yang lebih baik dalam hubungan ekonomi internasional.

Ketergantungan ekonomi terhadap negara maju dan lembaga keuangan internasional telah lama menjadi karakteristik negara berkembang. Hutang luar negeri, yang seringkali diambil untuk mendanai proyek pembangunan atau menutupi defisit anggaran, dapat menjadi beban berat dalam jangka panjang. Menurut Kentikelenis & Babb, (2019), kebijakan penyesuaian struktural yang sering menyertai pinjaman dari lembaga seperti IMF dan Bank Dunia seringkali memiliki dampak negatif terhadap sektor publik dan kesejahteraan sosial. Negara-negara peminjam sering terjebak dalam siklus hutang yang sulit diputus, di mana sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk membayar bunga hutang alih-alih investasi dalam pembangunan.

Banyak negara berkembang masih bergantung pada ekspor komoditas primer dan impor barang manufaktur, menciptakan ketidakseimbangan perdagangan yang kronis. Situasi ini sering kali diperburuk oleh beban hutang luar negeri yang besar. Menurut laporan (World Bank, 2022), rasio hutang terhadap PDB negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat dari 54% pada 2019 menjadi 62% pada 2021, sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri ini membatasi kemampuan negara untuk berinvestasi dalam pembangunan jangka panjang dan membuat mereka rentan terhadap guncangan eksternal (M. Ahyan Kose et al., 2021). Ketergantungan ekonomi suatu negara menyebabkan adanya keterbatasan sebuah negara dalam memberlakukan kebijakan-kebijakan dalam peningkatan ekonominya. Untuk itu ketergantungan ekonomi terutama pada pinjaman luar negeri perlu dikaji ulang sehingga meminimalisir ketergantungan tersebut. Indonesia termasuk negara dengan ketergantungan ekonomi terutama terhadap hutang luar negeri termasuk dalam sepuluh besar secara global. lihat gambar 2.3



Gambar 2.3. Top 10 low and middle income Borrowers 2019 -2020
 Sumber : World Bank, 2022)

2. Korupsi dan Tata Kelola yang Lemah

Korupsi dan tata kelola yang buruk merupakan hambatan serius bagi pembangunan di banyak negara berkembang. Korupsi dan tata kelola yang lemah merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat. Ketika sistem tata kelola dalam suatu organisasi atau pemerintahan tidak berjalan dengan baik, hal ini membuka celah bagi praktik-praktik korupsi untuk tumbuh subur. Sebaliknya, korupsi yang mengakar dalam suatu sistem akan semakin melemahkan tata kelola yang ada, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, namun juga masih menjadi tantangan bagi banyak negara maju.

Dampak dari korupsi dan tata kelola yang lemah sangatlah luas dan merusak. Pada tingkat makro, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sementara pada tingkat mikro, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial, di mana akses terhadap sumber daya dan kesempatan menjadi terbatas hanya bagi mereka yang memiliki koneksi atau kemampuan untuk membayar suap. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menimbulkan ketidakstabilan sosial-politik.

Pratikno dan Lay (2021) mengemukakan bahwa korupsi tidak hanya menggerogoti sumber daya yang seharusnya digunakan untuk

pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Hal ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum, ketidakefisienan birokrasi, dan distorsi dalam alokasi sumber daya. Upaya-upaya reformasi sering kali terhambat oleh elit politik dan ekonomi yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo.

Korupsi dan tata kelola yang buruk tetap menjadi hambatan signifikan bagi pembangunan di banyak negara berkembang. Transparency International, (2023) melaporkan bahwa dua pertiga negara di dunia memiliki skor di bawah 50 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, dengan negara-negara berkembang mendominasi peringkat bawah. Korupsi tidak hanya mengalihkan sumber daya dari investasi produktif tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat reformasi kebijakan yang diperlukan. Studi oleh Saidi, Labidi, & Ochi, (2023) menunjukkan bahwa perbaikan dalam kualitas tata kelola berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara Afrika Sub-Sahara.

Upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup reformasi sistem hukum dan peradilan, penguatan lembaga-lembaga pengawas independen, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat sipil. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari para pemimpin, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks global, kerja sama internasional juga memainkan peran penting dalam memerangi korupsi lintas batas. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) telah menyediakan kerangka hukum internasional untuk mengatasi masalah ini. Namun, implementasi efektif dari konvensi tersebut masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti blockchain dan big data analytics membuka peluang baru dalam upaya pencegahan dan deteksi korupsi, meskipun penerapannya masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait aspek privasi dan keamanan data.

3. Infrastruktur yang Tidak Memadai

Infrastruktur merupakan fondasi fisik dan organisasi yang diperlukan untuk beroperasinya suatu masyarakat atau perusahaan (Fulmer, 2009).

Ini mencakup berbagai fasilitas dan sistem yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, sistem air bersih, pembuangan limbah, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Menurut World Bank, (2023) infrastruktur juga meliputi layanan sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Infrastruktur dapat dibagi menjadi dua kategori utama: infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*). Infrastruktur keras mengacu pada aset fisik yang nyata seperti jalan raya, bandara, dan jaringan listrik. Sementara itu, infrastruktur lunak meliputi institusi yang diperlukan untuk memelihara standar ekonomi, kesehatan, budaya, dan sosial suatu negara, seperti sistem pendidikan, sistem perawatan kesehatan, sistem pemerintahan, penegakan hukum, dan sistem keuangan (Torrise, 2009).

Pentingnya infrastruktur dalam pembangunan ekonomi dan sosial telah lama diakui oleh para ekonom dan pembuat kebijakan. Aschauer, (1989) dalam penelitiannya yang berpengaruh menemukan bahwa investasi dalam infrastruktur publik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, studi oleh Calderón & Servén, (2004) menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas infrastruktur berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan berkorelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, sistem transportasi yang efisien dapat mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi polusi. Demikian pula, akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat dan produktivitas. Namun, meskipun perannya sangat penting, banyak negara masih menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi, dan perubahan iklim semakin mempersulit upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur (OECD, 2018). Hal ini sering kali mengakibatkan kondisi infrastruktur yang tidak memadai di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang.

Infrastruktur yang tidak memadai dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana fasilitas dan sistem yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya investasi, pemeliharaan yang buruk, perencanaan yang tidak tepat, atau ketidakmampuan untuk mengikuti pertumbuhan populasi dan perkembangan teknologi. Salah satu indikator infrastruktur yang tidak memadai adalah kondisi fisik yang buruk atau ketinggalan zaman. Misalnya, jalan-jalan yang rusak, jembatan yang tidak aman, atau sistem air yang sering mengalami kebocoran.

Selain kondisi fisik, infrastruktur yang tidak memadai juga dapat dilihat dari ketidakmampuannya untuk memenuhi permintaan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas yang parah di kota-kota besar menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi tidak mampu menangani volume kendaraan yang ada. Di banyak negara berkembang, kurangnya akses ke listrik yang andal merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut data World Bank, (2021) sekitar 733 juta orang masih tidak memiliki akses ke listrik. Infrastruktur yang tidak memadai juga dapat bermanifestasi dalam bentuk distribusi yang tidak merata. Sering kali terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses ke infrastruktur dasar. Studi oleh S. G. Banerjee, Moreno, Sinton, Primiani, & Seong, (2017) menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, penduduk pedesaan memiliki akses yang jauh lebih rendah ke air bersih, sanitasi, listrik, dan internet dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Dampak dari infrastruktur yang tidak memadai dapat sangat luas dan merugikan. Dari segi ekonomi, hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, peningkatan biaya operasional, dan hambatan dalam perdagangan dan investasi. Sebuah laporan oleh McKinsey & Company, (2016) memperkirakan bahwa dunia perlu menginvestasikan rata-rata \$3,7 triliun per tahun dalam infrastruktur hingga 2035 untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan. Secara sosial, infrastruktur yang tidak memadai dapat memperburuk ketimpangan, menghambat akses ke layanan dasar, dan menurunkan kualitas hidup. Misalnya, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai masih menjadi masalah serius di banyak negara berkembang, menyebabkan masalah kesehatan yang serius dan mempengaruhi produktivitas. Selain

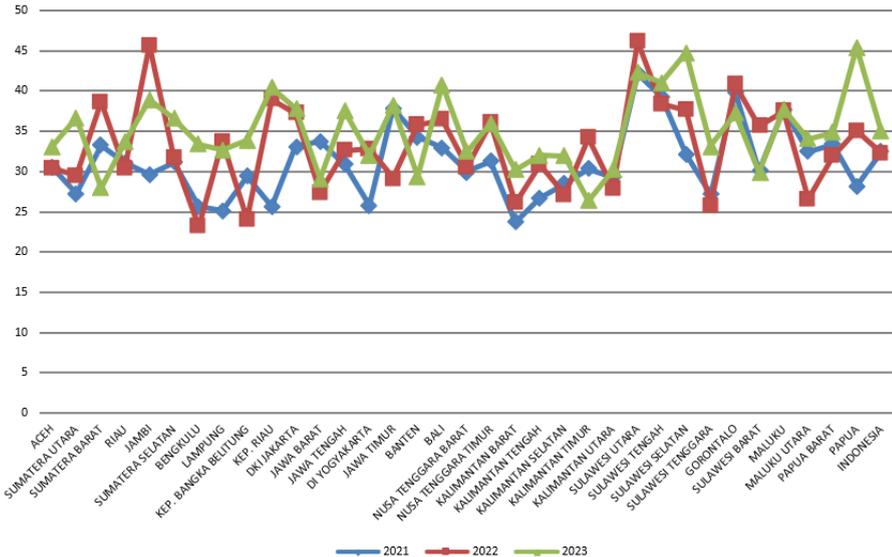
itu, infrastruktur yang buruk juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim, seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan infrastruktur selama bencana banjir atau badai yang parah.

Kekurangan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu bottleneck utama dalam pembangunan ekonomi negara berkembang. Thacker et al., (2019) menyoroti bahwa kesenjangan infrastruktur tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Investasi dalam infrastruktur, terutama di bidang transportasi, energi, dan telekomunikasi, sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Namun, keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis sering kali menjadi kendala dalam implementasi proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Kekurangan infrastruktur tetap menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di negara berkembang. Gobal Intfrastucture Hub, (2021) memperkirakan kesenjangan investasi infrastruktur global sebesar \$15 triliun hingga 2040, dengan sebagian besar kebutuhan berada di negara-negara berkembang. Infrastruktur yang buruk, terutama dalam transportasi, energi, dan telekomunikasi, meningkatkan biaya bisnis, menghambat produktivitas, dan membatasi akses ke layanan dasar. Namun, investasi infrastruktur yang tepat dapat menjadi katalis pertumbuhan; misalnya, Calderón-Garcidueñas et al., (2020) menemukan bahwa peningkatan stok infrastruktur sebesar 1% di Afrika dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0,7% dalam jangka panjang.

4. Ketimpangan Gender dan Sosial

Ketimpangan gender dan sosial tetap menjadi tantangan signifikan di banyak negara berkembang, menghambat potensi pembangunan manusia dan ekonomi. Laporan Kesenjangan Gender (World Economic Forum, 2023) menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, diperlukan rata-rata 131 tahun untuk mencapai kesetaraan gender secara global. Di negara-negara berkembang, perempuan sering menghadapi hambatan dalam akses pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan formal, dan partisipasi politik. Selain itu, ketimpangan sosial yang lebih luas, termasuk disparitas pendapatan dan kesempatan berdasarkan etnis atau status sosial ekonomi,

tetap menjadi masalah persisten. Ketiadaan keseimbangan gender merujuk pada ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak. Ini termasuk ketidaksetaraan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Dampak ketimpangan gender dapat terjadi diberbagai bidang baik ekonomi, kesehatan serta pendidikan. Di bidang ekonomi, Perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan pendapatan yang setara. Menurut laporan World Economic Forum, (2023), kesenjangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi global. Dampak dibidang kesehatan mencakup Akses yang tidak merata ke layanan kesehatan menyebabkan perbedaan signifikan dalam kesehatan perempuan dan anak-anak, sedangkan di bidang pendidikan, dibanyak negara, terutama di daerah pedesaan dan tertinggal, perempuan masih menghadapi hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam pendidikan perempuan, masih ada tantangan dalam partisipasi perempuan di sektor formal dan pengambilan keputusan. Data menunjukkan bahwa perempuan menduduki lebih sedikit posisi kepemimpinan dibandingkan laki-laki.



Gambar 2.4. Proporsi Perempuan di posisi manajerial d Indonesia 2021-2023. Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Adapun ketiadaan keseimbangan sosial mencakup ketidakadilan dalam akses terhadap kekayaan, pendidikan, dan peluang sosial lainnya. Kesenjangan ini sering kali berkaitan dengan faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, etnis, dan lokasi geografis. Dampak global adanya ketimpangan sosial meliputi:

- a. Kesejahteraan, adanya ketidak seimbangan sosial berkontribusi terhadap kemiskinan dan marginalisasi kelompok tertentu, memperburuk kualitas hidup dan akses ke layanan dasar. Ketidakseimbangan sosial sering kali menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata. Kelompok yang terpinggirkan sering kali tetap terjebak dalam siklus kemiskinan, menghambat akses mereka ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas mengakibatkan individu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan kualitas hidup mereka. Kelompok yang kurang beruntung sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan, makanan bergizi, dan lingkungan yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi harapan hidup
- b. Konflik, ketidakseimbangan sosial dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Ketidakpuasan dan frustrasi dari kelompok yang terpinggirkan dapat menyebabkan protes, kekerasan, dan ketidakstabilan, yang merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dan sosial. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan yang signifikan dalam kualitas hidup masyarakat. Ketiadaan keseimbangan gender dan sosial adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan holistik dan komitmen jangka panjang. Pentingnya reformasi kelembagaan dalam peangannan ketimpangan gender dan sosial serta, peningkatan kapasitas pemerintah juga kerjasama internasional yang lebih adil akan mempermudah dalam menghadapi tantangan tersebut. Negara-negara berkembang perlu mengembangkan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, dan penguatan institusi. Sementara itu,

komunitas internasional dapat berperan dalam menyediakan dukungan teknis dan finansial yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Beberapa kebijakan publik dalam upaya mengatisipasi tantangan seperti ketimpangan gender dan sosial dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan inklusif dan berfokus pada pemberdayaan perempuan serta kelompok yang terpinggirkan. Adapun upaya untuk mengurangi ketidakseimbangan gender adalah :

- a. Kebijakan kuota gender, Beberapa negara, seperti Rwanda dan Norwegia, menerapkan kuota untuk perempuan dalam posisi politik. Ini meningkatkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
- b. Program pendidikan untuk perempuan, Program seperti "Girl Rising" di berbagai negara bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, membantu mereka menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
- c. Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Berbasis Gender, Negara-negara seperti Spanyol dan Prancis telah mengesahkan undang-undang yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan.
- d. Inisiatif kesehatan reproduksi, Program kesehatan reproduksi yang komprehensif, seperti yang diterapkan di negara-negara Skandinavia, memberikan akses kepada perempuan untuk layanan kesehatan yang penting, termasuk kontrasepsi dan perawatan prenatal.

Program-program kebijakan publik yang dapat mengurangi ketidakseimbangan sosial diantaranya adalah :

- a. Program jaminan sosial, Negara-negara seperti Brasil dengan program Bolsa Família memberikan bantuan keuangan kepada keluarga berpendapatan rendah, yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan.
- b. Kebijakan akses pendidikan, Beberapa negara telah menerapkan pendidikan gratis dan wajib untuk anak-anak, seperti yang dilakukan di Finlandia, untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan.
- c. Reformasi pajak progresif, Kebijakan pajak yang progresif, di mana orang yang berpenghasilan lebih tinggi membayar proporsi yang lebih besar, dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Contohnya adalah kebijakan pajak di negara-negara Nordic.

- d. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, Inisiatif seperti program pelatihan keterampilan di India membantu kelompok-kelompok terpinggirkan untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja.

C. KESIMPULAN

Kompleksitas permasalahan pembangunan global dan nasional menuntut pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan global maupun nasional tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor maupun satu aktor saja. Tantangan seperti kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan geopolitik memerlukan solusi inovatif yang mempertimbangkan keunikan konteks lokal maupun dinamika global. Kita harus mengakui bahwa tidak ada solusi universal yang dapat diterapkan secara seragam untuk mengatasi masalah-masalah ini, yang berarti tidak ada "*one-size-fits-all*" solusi, mengakui keberagaman kondisi di berbagai negara dan wilayah. Sebaliknya, diperlukan strategi adaptif yang menggabungkan kebijakan berbasis bukti, teknologi tepat guna, dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan yang fleksibel, menggabungkan kebijakan berbasis bukti, teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat serta penekanan pentingnya pendekatan *bottom-up* dan *top-down* penanganan masalah-masalah global dan nasional.

Pemahaman terhadap keterkaitan antara isu-isu pembangunan global dan nasional, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan serta menekankan hubungan antara masalah lokal dan global, emnunjukkan bahwa solusi harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Melalui kerjasama internasional yang diperkuat, reformasi kelembagaan yang progresif, dan investasi dalam modal manusia, kita dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan inklusif di masa depan. Tantangan-tantangan ini bukan hanya hambatan, tetapi juga peluang untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, dengan pandangan optimis, melihat tantangan sebagai peluang untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Penekanan pada keberlanjutan dan generasi mendatang memberikan perspektif jangka panjang pada pembahasan.

BAB 3 KONSEP EKONOMI

PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Akhir perang dunia kedua membawa dampak dalam pengembangan perekonomian terutama di negara jajahan, permasalahan ekonomi pasca perang seperti tidak meratanya pendapatan sampe peningkatan angka kemiskinan merupakan hal yang harus ditangani agar negara bisa bertahan. Hal ini menjadi urgent bagi peneliti untuk melihat permasalahan yang menjadi indikator dalam penyelesaian masalah di negara sedang berkembang. Ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang sangat penting, terutama bagi negara-negara berkembang. Globalisasi yang terus berubah, pemahaman tentang konsep dasar ekonomi pembangunan menjadi menarik untuk dipelajari karena dapat membantu merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Ekonomi pembangunan tidak hanya mengupas tentang dunia ekonomi akan tetapi juga tentang pertumbuhan material sebuah negara, akan tetapi juga tentang sosial dan politik ekonomi sehingga pemahaman tentang ekonomi pembangunan menjadi urgent dalam upaya pengentasan masalah-maslah yang muncul di era globalisasi seperti perubahan iklim, ketimpangan dan keberlanjutan pembangunan. Tantangan yang kompleks termasuk ketimpangan sosial, pengangguran, dan degradasi lingkungan yang dihadapi negara-negara berkembang menjadikan pemahaman tentang ekonomi pembangunan menjadi suatu kebutuhan yang penting terutama bagi pemangku kebijakan.

Strategi transformasi negara-negara sedang berkembang menjadi lebih makmur cenderung bervariasi, teori dan metode diciptakan untuk memandu praktisi, akademisi dan pemangku kebijakan dalam menentukan praktik dan kebijakan yang dapat digunakan dan di terapkan baik ditingkat domestik maupun internasional. Salah satu pohon ilmu dari ekonomi ini memberikan

berbagai analisis ekonomi dinamis yang di dasarkan pada pengembangan teori dari berbagai tokoh ekonomi Pembangunan serta pengembangan fenomena ekonomi yang dialami di berbagai negara. Dinamisasi dan keluasan ilmu ekonomi memberikan cakupan-cakupan ekonomi yang lebih beragam. Bagian dari buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar ekonomi pembangunan. Cakupan yang luas dalam ekonomi pembangunan dapat digunakan dalam penyelesaian masalah ekonomi sehingga dapat memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyajian teori-teori, indikator, dan analisis isu-isu kritis, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi. Sehingga materi ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti, mahasiswa, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempelajari konsep dasar ekonomi pembangunan, diharapkan individu dan institusi dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP EKONOMI PEMBANGUNAN

Ekonomi pembangunan (*development economics*) adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang proses dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara berkembang. Ekonomi pembangunan berbeda dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro, di mana fokus ekonomi pembangunan adalah pada isu-isu spesifik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ekonomi pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi pembangunan membutuhkan pendekatan interdisipliner untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan pembangunan yang kompleks. Secara lebih komprehensif, ekonomi pembangunan mempelajari aspek-aspek perekonomian negara berkembang, dari pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, hingga pengelolaan sumber daya alam, dengan pendekatan yang mengkombinasikan analisis mikroekonomi dan makroekonomi, serta

mengambil tingkat keadilan sosial dan lingkungan hidup menjadi perhatian utama" (Rodrik, 2020).

Ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu yang paling mutakhir, sekaligus salah satu yang paling menarik dan menantang. Ekonomi pembangunan mempelajari salah satu tantangan utama zaman kita, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara-negara berpendapatan rendah, dan transformasi ekonomi tersebut menjadi negara-negara modern berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, ekonomi pembangunan adalah tentang ekonomi negara-negara berkembang yang penduduknya menghadapi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang tinggi. Menurut Todaro & Smith, (2020) ekonomi pembangunan berfokus pada studi tentang bagaimana negara-negara di dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang dapat mengubah dan meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kelembagaan mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi sebagian besar penduduknya. Ekonomi pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional. Acemoglu, D., & Robinson, (2019) mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai studi tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan ekonomi di negara-negara miskin atau berkembang. Mereka menekankan pentingnya memahami interaksi antara ekonomi, politik, dan kelembagaan dalam proses pembangunan, ia menegaskan bahwa negara-negara dengan institusi yang inklusif dan tata kelola yang baik cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik, Dengan Kelembagaan (*institutions*) dan tata kelola yang baik (*good governance*) telah diidentifikasi sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi. Beberapa definisi lain menyebutkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan suatu pengetahuan tentang bagaimana negara-negara termiskin di dunia dapat meningkatkan standar hidup penduduknya (Sachs, 2021). Definisi ini menekankan pada faktor-faktor ekonomi pembangunan seperti geografi, teknologi dan institusi sebagai pendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan Stiglitz, (2019) mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai pembelajaran tentang bagaimana negara-negara dapat mengembangkan ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan mempertimbangkan isu-isu seperti ketimpangan, partisipasi, dan keadilan dalam proses pembangunan.

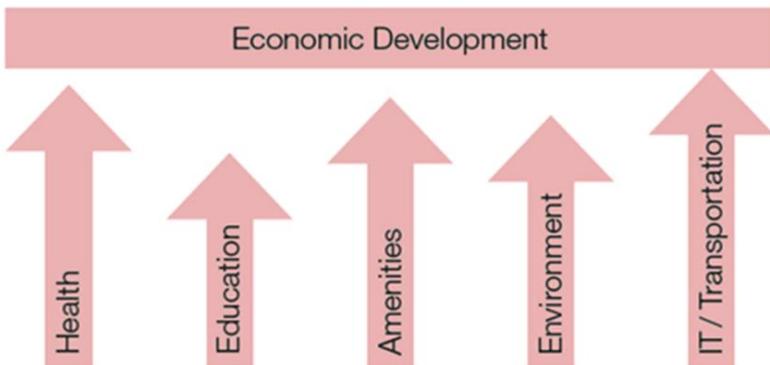
Berbeda dengan definisi sebelumnya, Collier, (2020) melihat ekonomi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana negara sedang berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi mereka. Pemahaman tentang pentingnya faktor-faktor kelembagaan dan politik dalam mendorong pembangunan inklusif sangat diperlukan. Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan usaha-usaha serta hambatan yang dihadapi, ekonomi pembangunan juga membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diambil yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan usaha-usaha serta hambatan yang dihadapi, ekonomi Pembangunan juga membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diambil yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Perbedaan antara ekonomi pembangunan dengan cabang ilmu ekonomi lainnya, seperti ekonomi makro dan mikro, terletak pada fokus yang berbeda. Ekonomi makro fokus pada analisis agregat, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sementara ekonomi mikro fokus pada analisis tingkat individu atau perusahaan. Sedangkan ekonomi pembangunan secara umum dapat dikatakan sebagai cabang ilmu ekonomi yang integratif dan holistik, yang mengambil tingkat keadilan sosial dan lingkungan hidup dalam melakukan analisis ekonomi.

Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi dua hal yang hampir sama namun berbeda. Ahli ekonomi Arsyad, (2010b) mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai studi ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi di negara sedang berkembang dan kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih pada usaha yang dilakukan dalam perekonomian untuk pengembangan kegiatan ekonomi sehingga terjadi peningkatan perekonomian negara dari sisi infrastruktur,

pertumbuhan ekonomi, taraf hidup dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator seperti produk domestik bruto (GDP) atau produk nasional bruto (GNP), sementara pengurangan kemiskinan dapat dipantau melalui indikator seperti jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerataan distribusi pendapatan dapat dicapai dengan melakukan reformasi fiskal dan moneter, serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya alam penting untuk mencegah degradasi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas-fasilitas umum, dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara dengan kata lain aspek ekonomi pembangunan meliputi penentuan sejauh mana pertumbuhan penduduk yang cepat membantu atau menghambat pembangunan, transformasi struktural ekonomi, dan peran pendidikan dan perawatan kesehatan dalam pembangunan.

Ruang lingkup ekonomi Pembangunan secara umum yang di dapat dari definisi-definisi tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi pembangunan memiliki fokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan dengan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010). Adapun pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan kesejahteraan ekonomi, standar hidup individu dan masyarakat dengan memperhatikan pilar-pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan perolehan hasil pertumbuhan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Sheikh, 2024).



Gambar 3.1. Pilar Pembangunan Ekonomi

Sumber : Dayananda Sagar University - School of Commerce & Management Studies (PGP), 2024

Sebagai pengantar ekonomi pembangunan, fokus dalam penjabaran ini ada pada konsep pembangunan ekonomi dan teori-teori pembangunan ekonomi. Meskipun ekonomi pembangunan berkepentingan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, tetapi minatnya tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi, karena cakupannya yang lebih luas daripada ekonomi tradisional. Ekonomi pembangunan didasarkan pada pemahaman bahwa pertumbuhan tanpa pembangunan tidak akan menjadi negara makmur. Sehingga studi tentang pembangunan ekonomi juga membahas struktur dan proses ekonomi, politik, dan sosial yang diperlukan untuk peningkatan taraf hidup yang cepat dan berskala besar bagi penduduk negara-negara berkembang. Cakupan pembahasan dalam ekonomi Pembangunan ini pada dasarnya bersifat lintas disiplin, tidak hanya menggunakan ilmu ekonomi, tetapi juga pendekatan mulai dari ilmu politik hingga filsafat, antropologi, sejarah budaya, dan pengembangan sektor swasta.

Beberapa aspek ekonomi pembangunan meliputi penentuan sejauh mana pertumbuhan penduduk yang cepat membantu atau menghambat pembangunan, transformasi struktural ekonomi, dan peran pendidikan dan perawatan kesehatan dalam pembangunan. Topik-topik tersebut juga mencakup perdagangan internasional, globalisasi, pembangunan berkelanjutan, dampak epidemi, seperti HIV, dan dampak bencana terhadap pembangunan ekonomi dan manusia. Adapun ekonom pembangunan terkemuka meliputi Jeffrey Sachs, Hernando de Soto Polar, dan peraih Nobel Simon Kuznets, Amartya Sen, dan Joseph Stiglitz.

C. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

Teori merupakan pendapat, cara dan aturan melakukan sesuatu, teori pada dasarnya merupakan suatu ikhtisar fakta yang jelas dan ilmiah. Ekonomi pembangunan sebagai subdisiplin ilmu ekonomi yang memiliki perhatian utama pada pemahaman tentang bagaimana ekonomi suatu negara tumbuh dan berkembang (Szentes, 2005). Hal ini berarti ekonomi pembangunan memiliki perhatian terhadap sumber dan perluasan ekonomi. Eksplorasi sumber dan

perluasan ekonomi dilakukan melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), input produksi (modal, tenaga kerja, dan tanah), dampak pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi (sektor pertanian, manufaktur, dan jasa), dan, pada tingkat yang lebih rendah, peran negara. Pemahaman ekonomi pembangunan ini merupakan inti dari teori ekonomi pembangunan klasik dan neoklasik. Di sisi lain, aliran Marxis dan neo-Marxis melihat ekonomi pembangunan dari sisi uang dan peningkatan kesejahteraan penduduk dan planet dengan melihat pendapatan nasionalnya.

Teori utama pembangunan utama berasal dari pemikiran klasik, neoklasik dan keynesian. Teori pembangunan klasik dan neoklasik menekankan pada pentingnya akumulasi modal, spesialisasi, dan perdagangan bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini antara lain Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus.

1. Teori Klasik

a. Adam Smith

Kontribusi Adam Smith terhadap ekonomi pembangunan, terutama diartikulasikan dalam karya seminalnya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” (1776), membentuk kerangka kerja dasar untuk memahami kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori pembangunan ekonomi Smith didasarkan pada konsep peningkatan skala pengembalian melalui pembagian kerja, yang ia pandang sebagai pendorong utama pertumbuhan produktivitas dan kemajuan ekonomi (Kurz, 2016). Mekanisme ini beroperasi melalui tiga jalur yang berbeda: peningkatan ketangkasan pekerja, penghematan waktu dari spesialisasi tugas, dan peningkatan potensi inovasi teknologi yang muncul dari perhatian yang terfokus pada proses produksi tertentu.

Inti dari teori pembangunan Smith adalah peran akumulasi modal dan perluasan pasar. Ia mengemukakan bahwa pembagian kerja dibatasi oleh luasnya pasar, yang menunjukkan sebuah siklus yang memperkuat diri sendiri di mana pertumbuhan pasar memungkinkan spesialisasi yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan perluasan pasar lebih lanjut. Perspektif ini revolusioner pada masanya, karena menunjukkan bagaimana perilaku yang mementingkan diri sendiri, melalui mekanisme pasar, dapat berkontribusi pada kemakmuran

masyarakat secara keseluruhan. Analisis Smith tentang proses ini menekankan pentingnya perdagangan domestik dan internasional dalam mendorong pembangunan ekonomi, dengan menyatakan bahwa perluasan pasar melalui perdagangan sangat penting untuk mewujudkan manfaat spesialisasi (Evensky, 2015)

Kerangka kerja institusional memainkan peran penting dalam teori pembangunan Smith. Ia menekankan bahwa kemajuan ekonomi membutuhkan institusi hukum dan politik yang tepat yang melindungi hak milik, menegakkan kontrak, dan mempertahankan pasar yang kompetitif (Rosenberg, 1960). Smith sangat kritis terhadap merkantilisme dan praktik monopoli, dengan alasan bahwa hal tersebut menghambat pembangunan ekonomi dengan membatasi perdagangan dan persaingan. Advokasinya untuk “sistem kebebasan alamiah yang jelas dan sederhana” merupakan artikulasi awal tentang pentingnya kualitas kelembagaan dalam pembangunan ekonomi, sebuah tema yang terus beresonansi dalam ekonomi pembangunan kontemporer (North, 1990)

Teori Smith juga menggabungkan pemahaman yang canggih tentang hubungan antara pertanian, manufaktur, dan perdagangan dalam proses pembangunan. Tidak seperti kaum fisiokrat, yang memandang pertanian sebagai satu-satunya sumber kekayaan, Smith mengakui adanya saling ketergantungan antara berbagai sektor ekonomi dan kontribusi kolektif mereka terhadap kemakmuran nasional. Dia menguraikan perkembangan alamiah pembangunan ekonomi, dimulai dari pertanian, bergerak melalui manufaktur, dan berpuncak pada perdagangan luar negeri, meskipun dia menekankan bahwa urutan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor institusional dan historis (Hollander, 1973)

b. David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) merupakan salah satu ekonom klasik paling berpengaruh yang memberikan kontribusi fundamental terhadap perkembangan pemikiran ekonomi modern. Teori distribusi pendapatan Ricardo yang dipaparkan dalam magnum opus-nya "*On the Principles of Political Economy and Taxation*" (1817) menjelaskan bagaimana pendapatan nasional terdistribusi di antara tiga kelas sosial utama: pemilik tanah (landowners), kapitalis, dan buruh. Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan populasi dan akumulasi modal akan mendorong

kultivasi tanah yang kurang produktif, mengakibatkan kenaikan harga sewa tanah dan penurunan tingkat keuntungan (Kurz & Salvadori, 2019). Salah satu kontribusi paling signifikan dari Ricardo adalah teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Berbeda dengan teori keunggulan absolut Adam Smith, Ricardo mendemonstrasikan bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan semua pihak bahkan ketika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi komoditas apapun. Teori ini didasarkan pada konsep *opportunity cost* dan spesialisasi, di mana setiap negara seharusnya fokus memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan komparatif relatif (Maneschi, 2018). Ricardo mengilustrasikan teorinya menggunakan contoh klasik perdagangan antara Inggris dan Portugal dalam produksi wine dan kain:

Tabel 3.1. Ilustrasi keunggulan komparatif

Negara	Jam Kerja untuk Wine	Jam Kerja untuk Kain
Inggris	120	100
Portugal	80	90

Tabel 3.1 menunjukkan ilustrasi keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, kondisi awal berdasarkan ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa Inggris dalam berproduksi membutuhkan 120 jam untuk wine dan 100 jam untuk kain sedangkan Portugal membutuhkan 80 jam untuk wine dan 90 jam untuk kain. Jika dilihat dari komposisi tersebut, Analisis Keunggulan Absolut menunjukkan Portugal lebih efisien dalam produksi wine (80 < 120 jam), Portugal lebih efisien dalam produksi kain (90 < 100 jam, sehingga Portugal memiliki keunggulan absolut untuk kedua produk. Untuk analisis keunggulan komparatif, dilihat dari perhitungan maka didapat sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Rasio Biaya Opportunity Cost: Inggris: $120/100 = 1.2$ (artinya: setiap unit wine = 1.2 unit kain) sedangkan Portugal: $80/90 = 0.89$ (artinya: setiap unit wine = 0.89 unit kain)
- 2) Interpretasi Rasio : Di Inggris, 1 unit wine = 1.2 unit kain, Di Portugal, 1 unit wine = 0.89 unit kain yang berarti Portugal lebih efisien dalam memproduksi wine relatif terhadap kain dan Inggris relatif lebih efisien dalam memproduksi kain dibanding wine

Hasil perhitungan merekomendasikan suatu spesialisasi pada pralah satu produk yang memeberikan keuntungan bagi negaranya misalnya Portugal sebaiknya fokus memproduksi wine dan Inggris sebaiknya fokus memproduksi kain kemuan kedua negara tersebut melakukan perdagangan sehingga Portugal bisa menukar wine denngan kain dari Inggris, menghemat sumber daya yang seharusnya digunakan untuk produksi kain serta menggunakannya untuk untuk memproduksi lebih banyak wine, sedangkan untuk Inggris dapat menukar kain dengan wine dari Portugal, menghemat sumber daya yang seharusnya digunakan untuk produksi wine kemudian menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi lebih banyak kain

Perdagangan menguntungkan meskipun satu negara kurang efisien dalam memproduksi semua barang, yang penting adalah biaya opportunity cost relatif, bukan biaya absolut, Spesialisasi dan perdagangan meningkatkan total produksi global serta untuk kedua negara bisa mendapatkan lebih banyak barang melalui perdagangan. Teori ini menjadi dasar kebijakan perdagangan bebas dan mendorong spesialisasi internasional, menjelaskan pola perdagangan global serta menjustifikasi manfaat globalisasi ekonomi. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa meskipun Portugal memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kedua barang, tetap ada manfaat dari perdagangan internasional berdasarkan keunggulan komparatif.

Ricardo juga mengembangkan teori nilai kerja (labor theory of value) yang menyatakan bahwa nilai tukar suatu komoditas ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa dalam ekonomi modern, harga pasar dapat menyimpang dari nilai kerja karena faktor-faktor seperti kelangkaan dan fluktuasi permintaan-penawaran. Kontribusi Ricardo dalam hal ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan teori nilai dan harga dalam ekonomi politik (Chōgorō Maide, 2016).

Model pertumbuhan ekonomi Ricardo didasarkan pada interaksi dinamis antara akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan produktivitas tanah yang menurun (diminishing returns). Ia memprediksi bahwa ekonomi akan mencapai keadaan stasioner (stationary state) ketika akumulasi modal berhenti karena tingkat keuntungan telah jatuh ke tingkat minimum. Prediksi ini, meskipun tidak sepenuhnya terbukti dalam sejarah ekonomi modern, tetap memberikan wawasan berharga tentang batasan-batasan pertumbuhan ekonomi dan pentingnya inovasi teknologi (O'Brien, 2020).

Pengaruh pemikiran Ricardo terhadap perkembangan teori ekonomi sangat luas dan bertahan hingga saat ini. Metodologi analisisnya yang ketat dan penggunaan model abstrak untuk menjelaskan fenomena ekonomi kompleks telah menjadi standar dalam analisis ekonomi modern. Teori-teorinya tentang sewa, nilai, perdagangan internasional, dan distribusi pendapatan terus menjadi rujukan penting dalam diskusi kebijakan ekonomi kontemporer dan pengembangan teori ekonomi (Evensky, 2021)

c. Robert Thomas Malthus

Thomas Robert Malthus (1766-1834) merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi klasik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori ekonomi pembangunan melalui karyanya yang berjudul "*An Essay on the Principle of Population*" (1798). Dalam karya tersebut, Malthus mengemukakan teori yang kemudian dikenal sebagai "Prinsip Pertumbuhan Penduduk", yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (*geometris*), sementara pertumbuhan sumber daya pangan mengikuti deret hitung (*aritmetis*). Perbedaan laju pertumbuhan ini, menurut Malthus, akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan bahan pangan yang berujung pada kemiskinan dan kelaparan (Pressman, 2006). Thomas Malthus memberikan perspektif yang lebih pesimistis dengan teorinya tentang pertumbuhan populasi dan keterbatasan sumber daya. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan populasi yang eksponensial akan selalu melebihi pertumbuhan produksi pangan yang linear, yang pada akhirnya mengarah pada kemiskinan dan kelaparan. Meskipun prediksi Malthus belum sepenuhnya terbukti, teorinya tetap relevan dalam diskusi tentang keberlanjutan pembangunan. Malthus mengembangkan argumentasinya dengan menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menghasilkan tekanan pada sumber daya yang terbatas, terutama lahan pertanian. Ia menegaskan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat, kebutuhan akan pangan juga meningkat, namun produktivitas pertanian tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk tersebut karena adanya hukum hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*). Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "*Malthusian trap*", di mana peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti oleh pertumbuhan

penduduk yang lebih cepat, sehingga pada akhirnya pendapatan per kapita akan kembali ke tingkat subsisten (Hodgson, 2009)

Teori Malthus dalam konteks pembangunan ekonomi, Malthus menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui *preventive checks* dan *positive checks*. *Preventive checks* merujuk pada penundaan pernikahan dan pembatasan kelahiran secara moral, sementara *positive checks* mengacu pada faktor-faktor yang meningkatkan mortalitas seperti kelaparan, penyakit, dan perang. Malthus berpendapat bahwa tanpa adanya mekanisme pengendalian ini, masyarakat akan mengalami *overpopulation* yang berujung pada kemiskinan kronis. Pemikiran ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan kependudukan dan pembangunan ekonomi di berbagai negara (Winch, 2013). Meskipun teori Malthus mendapat kritik keras karena tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam produksi pangan, kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi pembangunan tetap relevan hingga saat ini. Teorinya memberikan kerangka analitis untuk memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk, sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi. Malthus juga berkontribusi pada pengembangan konsep permintaan efektif dan teori sewa tanah, yang kemudian memengaruhi pemikiran ekonom-ekonom berikutnya seperti David Ricardo dan John Maynard Keynes. Dampak pemikiran Malthus terhadap teori ekonomi pembangunan kontemporer dapat dilihat dari munculnya neo-Malthusianisme yang mengaplikasikan prinsip-prinsip Malthus dalam konteks modern, terutama terkait isu keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan global. Para ekonom pembangunan kontemporer menggunakan kerangka analisis Malthus untuk mengkaji hubungan antara pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dikemukakan lebih dari dua abad lalu, teori Malthus tetap memberikan wawasan berharga dalam memahami tantangan pembangunan ekonomi di era modern (Coale & Hoover, 2015)

Para ekonom klasik menekankan pentingnya akumulasi modal dan tabungan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi harus sebagian diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Kontribusi penting lainnya dari ekonom klasik adalah penekanan pada pentingnya institusi dan kerangka hukum yang mendukung aktivitas ekonomi. Smith khususnya menekankan pentingnya perlindungan hak milik dan penegakan kontrak sebagai prasyarat untuk fungsi pasar yang efektif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Teori Neoklasik

a. Robert Merton Solow

Robert Merton Solow (1924-sekarang) merupakan ekonom terkemuka yang mengembangkan model pertumbuhan neo-klasik yang revolusioner, yang kemudian dikenal sebagai "Model Pertumbuhan Solow". Melalui artikelnya yang berjudul "*A Contribution to the Theory of Economic Growth*" (1956), Solow menghadirkan kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Model ini memenangkan Hadiah Nobel dalam Ilmu Ekonomi pada tahun 1987 dan menjadi landasan fundamental dalam teori pertumbuhan ekonomi modern. Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan output dalam jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh input tradisional seperti modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemajuan teknologi yang bersifat eksogen (Acemoglu, 2009).

Model Solow dibangun di atas asumsi-asumsi neo-klasik yang mencakup fungsi produksi dengan skala hasil konstan, substitusi sempurna antara faktor-faktor produksi, dan produktivitas marjinal yang semakin menurun untuk setiap input. Dalam modelnya, Solow memperkenalkan konsep "*steady state*", yaitu kondisi di mana perekonomian mencapai keseimbangan jangka panjang dengan tingkat modal per tenaga kerja yang konstan. Pada kondisi *steady state*, pertumbuhan output per kapita hanya dapat terjadi melalui kemajuan teknologi, karena akumulasi modal menghadapi kendala produktivitas marjinal yang semakin menurun. Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada akumulasi modal tidak dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa adanya peningkatan teknologi (Barro & Sala-i-Martin, 2004).

Kontribusi penting lainnya dari Model Solow adalah pengenalan konsep "pertumbuhan berimbang" (*balanced growth*) dan "konvergensi". Model ini memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat tabungan yang lebih tinggi akan cenderung memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dalam *steady state*. Namun, negara-negara dengan tingkat modal per tenaga kerja yang lebih rendah akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan negara-negara kaya, fenomena yang dikenal sebagai "konvergensi bersyarat". Prediksi ini telah mendorong berbagai studi empiris tentang konvergensi ekonomi antarnegara dan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan pembangunan di negara berkembang.

Solow dalam perkembangan selanjutnya memperluas modelnya dengan memasukkan variabel kualitas sumber daya manusia dan penelitian empiris tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan "*growth accounting*", Solow menemukan bahwa sebagian besar pertumbuhan produktivitas tidak dapat dijelaskan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, melainkan oleh faktor residual yang kemudian dikenal sebagai "Total Factor Productivity" (TFP) atau "Solow residual". Temuan ini menegaskan pentingnya kemajuan teknologi dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang kemudian menginspirasi pengembangan teori pertumbuhan endogen oleh generasi ekonom berikutnya (Aghion, P & Howitt, 2009).

Model Pertumbuhan Solow telah memberikan kontribusi fundamental terhadap pemahaman kita tentang proses pembangunan ekonomi dan tetap relevan hingga saat ini. Meskipun model ini mendapat kritik karena memperlakukan kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen, kerangka analisisnya telah menjadi dasar bagi pengembangan teori pertumbuhan modern dan kebijakan pembangunan ekonomi. Implikasi kebijakan dari Model Solow menekankan pentingnya investasi dalam modal fisik dan manusia, serta peran crucial dari inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi kontemporer, model ini terus memberikan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara dapat mencapai dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Jones & Vollrath, 2013).

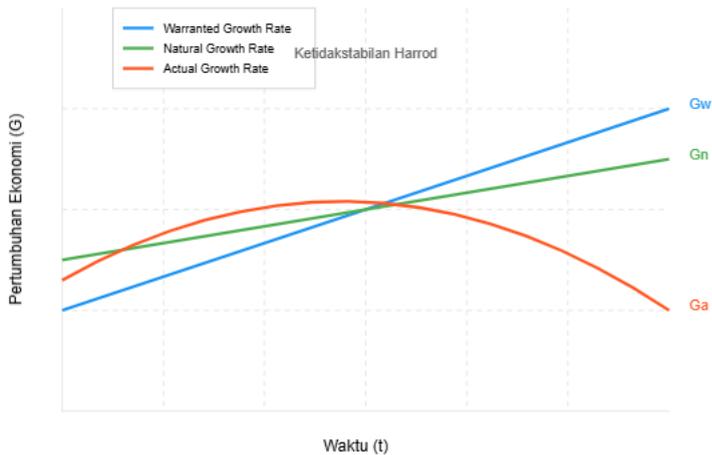
b. Harrod Domar

Model Harrod-Domar merupakan sintesis pemikiran yang dikembangkan secara terpisah oleh Sir Roy Harrod (1939) dan Evsey Domar (1946) yang kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi modern. Model ini muncul sebagai upaya untuk memperluas analisis Keynesian ke dalam perspektif jangka panjang, dengan fokus utama pada hubungan dinamis antara investasi, pertumbuhan output, dan kesempatan kerja. Harrod dan Domar mengidentifikasi peran ganda investasi dalam perekonomian: pertama, sebagai komponen permintaan agregat yang menciptakan pendapatan (multiplier effect), dan kedua, sebagai faktor yang meningkatkan kapasitas produksi melalui pembentukan modal (*capacity effect*). Keseimbangan pertumbuhan dalam model ini dicapai ketika peningkatan permintaan agregat seimbang dengan peningkatan kapasitas produksi (Sen, 1970).

Model Harrod-Domar memperkenalkan tiga konsep kunci dalam analisis pertumbuhan ekonomi: tingkat pertumbuhan terjamin (*warranted growth rate/Gw*), tingkat pertumbuhan aktual (*actual growth rate/Ga*), dan tingkat pertumbuhan alamiah (*natural growth rate/Gn*). Tingkat pertumbuhan terjamin didefinisikan sebagai laju pertumbuhan yang membuat pengusaha puas dengan keputusan investasi mereka, di mana kapasitas produksi terpakai sepenuhnya. Tingkat pertumbuhan aktual merupakan laju pertumbuhan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian, sementara tingkat pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan maksimum yang dimungkinkan oleh peningkatan populasi dan kemajuan teknologi. Keseimbangan pertumbuhan yang stabil tercapai ketika ketiga tingkat pertumbuhan ini sama ($Gw = Ga = Gn$), namun kondisi ini sulit dicapai karena tidak ada mekanisme otomatis yang menjamin konvergensi ketiga tingkat pertumbuhan tersebut (Easterly, 2001)

Salah satu kontribusi penting model Harrod-Domar adalah identifikasi "masalah ketidakstabilan" dalam proses pertumbuhan ekonomi. Model ini menunjukkan bahwa penyimpangan dari jalur pertumbuhan seimbang cenderung memperbesar diri sendiri (*self-magnifying*) dari waktu ke waktu, fenomena yang dikenal sebagai "*knife-edge problem*". Jika tingkat pertumbuhan aktual menyimpang dari

tingkat pertumbuhan terjamin, perekonomian akan mengalami siklus ekspansi atau kontraksi yang berkelanjutan. Kondisi ini menyoroti pentingnya intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Model ini juga menekankan peran crucial dari rasio modal-output dan tingkat tabungan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi (Jones, 2002).



Gambar 3.2. Model Pertumbuhan Harrod Domar

Gambar 2 mengilustrasi model pertumbuhan Harrod-Domar. Grafik menunjukkan hubungan dinamis antara tiga komponen pertumbuhan utama yang diplot pada koordinat kartesius dengan sumbu X merepresentasikan waktu (t) dan sumbu Y merepresentasikan tingkat pertumbuhan ekonomi (G). Ketiga komponen tersebut divisualisasikan dengan tiga garis berbeda warna yang menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi: Garis Biru menunjukkan *Warranted Growth Rate* (G_w) (garis lurus menurun dari kiri atas ke kanan bawah) yang mempresentasikan tingkat pertumbuhan yang diinginkan atau "terjamin" yaitu laju pertumbuhan di mana kapasitas produksi terpakai sepenuhnya, adapun kemiringan negatif mengindikasikan kecenderungan penurunan efisiensi modal seiring waktu.

Garis hijau menunjukkan *Natural Growth Rate* (G_n) yang digambarkan sebagai garis lurus dengan kemiringan moderat, merepresentasikan tingkat pertumbuhan maksimum yang dimungkinkan oleh pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi yang relatif lebih

stabil dibandingkan komponen lainnya dan berfungsi sebagai "*ceiling*" atau batas atas pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk Garis Orange menunjukkan *Actual Growth Rate* (G_a) yaitu kurva non-linear yang berfluktuasi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Fluktuatif artinya ketidakstabilan inherent dalam model Harrod-Domar. Penyimpangan dari G_w cenderung membesar seiring waktu atau sering disebut *knife-edge problem*. Penyimpangan ini terlihat dari divergensi antara G_a dan G_w dari jalur pertumbuhan seimbang sehingga terjadi instabilitas yang semakin besar. Gap antara G_n dan G_w menunjukkan potensi pertumbuhan yang belum terealisasi sedangkan fluktuasi G_a disekitar G_w mengilustrasikan siklus bisnis jangka pendek. Konvergensi dan divergensi antara ketiga tingkat pertumbuhan menggambarkan dinamika stabilitas ekonomi. Adapun area di mana ketiga kurva berpotongan menunjukkan "*sweet spot*" pertumbuhan optima, Jarak antara kurva mengindikasikan besarnya intervensi kebijakan yang diperlukan dan tren jangka panjang menggambarkan tantangan dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Model Harrod-Domar memberikan implikasi penting bagi strategi pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Model ini menyarankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan tertentu, suatu negara harus mampu menghasilkan tingkat tabungan dan investasi yang memadai. Hubungan ini diekspresikan dalam persamaan fundamental Harrod-Domar: $g = s/v$, di mana g adalah tingkat pertumbuhan output, s adalah rasio tabungan-pendapatan nasional, dan v adalah rasio modal-output. Persamaan ini menjadi dasar bagi strategi "financial gap" dalam pembangunan ekonomi, yang menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya domestik dan bantuan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi pembangunan (Thirlwall, 2011).

Meskipun model Harrod-Domar mendapat kritik karena asumsi-asumsinya yang kaku, seperti rasio modal-output yang tetap dan tidak adanya substitusi antara modal dan tenaga kerja, kontribusinya terhadap teori dan kebijakan pembangunan ekonomi tetap signifikan. Model ini telah menginspirasi pengembangan berbagai model pertumbuhan selanjutnya, termasuk model pertumbuhan neo-klasik Solow-Swan. Dalam konteks kontemporer, wawasan dari model Harrod-Domar tetap

relevan untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan peran investasi dalam pembangunan, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi kendala sumber daya modal (Lin, 2012).

c. Paul Romer

Paul Michael Romer (1955-sekarang), pemenang Nobel Ekonomi 2018, mengembangkan teori pertumbuhan endogen yang secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan model neo-klasik tradisional yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen, Romer melalui artikelnya "*Endogenous Technological Change*" (1990) mendemonstrasikan bahwa inovasi teknologi adalah hasil endogen dari investasi yang disengaja dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta akumulasi modal manusia. Teori ini menekankan bahwa ide dan pengetahuan, sebagai barang non-rival yang dapat digunakan secara simultan oleh banyak agen ekonomi, merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Romer, 1990).

Romer mengidentifikasi tiga sektor utama dalam perekonomian dalam kerangka teoritis yaitu: sektor penelitian yang menghasilkan ide-ide baru, sektor barang antara yang menggunakan ide-ide tersebut untuk memproduksi input produksi, dan sektor barang akhir yang menggunakan input dan tenaga kerja untuk menghasilkan output final. Model ini menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki karakteristik *increasing returns to scale*, yang berarti produktivitas marginal pengetahuan tidak menurun seiring dengan akumulasinya. Konsekuensinya, investasi dalam R&D dan modal manusia dapat menghasilkan eksternalitas positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa dibatasi oleh hukum hasil yang semakin berkurang (Aghion & Howitt, 2009).

Kontribusi penting lainnya dari model Romer adalah penjelasannya tentang peran *spillover effect* dalam proses inovasi. Ketika sebuah perusahaan melakukan inovasi, pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan tersebut tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan lain, menciptakan efek positif bagi seluruh perekonomian. Namun, karena karakteristik non-rival dan *partially excludable* dari pengetahuan, pasar cenderung menghasilkan investasi R&D yang suboptimal dari perspektif sosial. Hal ini memberikan justifikasi untuk

intervensi pemerintah dalam bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual, subsidi penelitian, dan investasi dalam pendidikan tinggi (Jones, 2019).

Model Romer memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi strategi pembangunan ekonomi. Pertama, model ini menekankan pentingnya investasi dalam modal manusia dan R&D sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, model ini menunjukkan bahwa ukuran pasar dan integrasi ekonomi internasional dapat memengaruhi tingkat inovasi karena memungkinkan penyebaran biaya tetap R&D di pasar yang lebih besar. Ketiga, model ini menyoroti pentingnya kebijakan yang mendorong transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Keempat, model ini menggarisbawahi peran crucial dari institusi dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mendorong inovasi (Acemoglu & Robinson, 2012).

Relevansi teori Romer semakin meningkat di era ekonomi berbasis pengetahuan saat ini. Model ini memberikan kerangka analitis untuk memahami fenomena seperti revolusi digital, ekonomi platform, dan peran increasing returns dalam pertumbuhan perusahaan teknologi. Dalam konteks pembangunan ekonomi global, teori ini menjelaskan mengapa kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang cenderung persisten, dan mengapa kebijakan yang berfokus pada akumulasi modal fisik saja mungkin tidak cukup untuk mendorong konvergensi ekonomi. Implikasi penting lainnya adalah pentingnya investasi dalam infrastruktur digital, sistem pendidikan yang berkualitas, dan ekosistem inovasi yang mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Stiglitz & Greenwald, 2014).

3. Teori Modern

a. Walt Whitman Rostow

Walt Whitman Rostow (1916-2003), melalui karyanya yang berpengaruh "*The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*" (1960), mengembangkan teori modernisasi yang menjelaskan proses pembangunan ekonomi melalui serangkaian tahapan linear yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Rostow mengidentifikasi lima tahapan pertumbuhan ekonomi: masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. Teori ini menawarkan

kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami transformasi sosial-ekonomi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, dengan penekanan khusus pada peran teknologi, institusi, dan nilai-nilai sosial dalam proses pembangunan. Kontribusi Rostow tidak hanya memberikan perspektif historis tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga menyediakan blueprint strategis bagi negara-negara berkembang dalam merencanakan trajektori pembangunan mereka (Meier & Seers, 2020).

Tahap pertama, masyarakat tradisional, dicirikan oleh dominasi sektor pertanian subsisten, teknologi primitif, dan struktur sosial yang hierarkis. Pada tahap ini, produktivitas sangat terbatas karena ketergantungan pada metode produksi tradisional dan keterbatasan mobilitas sumber daya. Tahap kedua, prakondisi tinggal landas, ditandai dengan munculnya sektor industri modern dalam skala terbatas, peningkatan tabungan dan investasi, serta pembentukan institusi keuangan modern. Transisi ini memerlukan perubahan fundamental dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi, termasuk pembentukan negara nasional yang efektif dan munculnya kelompok entrepreneur yang dinamis. Rostow menekankan bahwa tahap ini sering kali dipicu oleh "gangguan eksternal" yang menantang struktur tradisional dan mendorong modernisasi (Preston, 2012).

Tahap ketiga, tinggal landas (take-off), merupakan periode krusial di mana hambatan-hambatan terhadap pertumbuhan berkelanjutan akhirnya dapat diatasi. Karakteristik utama tahap ini meliputi peningkatan drastis dalam tingkat investasi (dari sekitar 5% menjadi lebih dari 10% dari pendapatan nasional), pertumbuhan pesat sektor-sektor industri modern, dan munculnya kerangka politik, sosial, dan institusional yang mendukung industrialisasi berkelanjutan. Rostow mengidentifikasi bahwa tahap take-off biasanya berlangsung selama dua hingga tiga dekade, di mana pertumbuhan menjadi kondisi normal dalam perekonomian. Pengalaman historis menunjukkan bahwa Inggris mencapai tahap ini sekitar tahun 1783-1802, Amerika Serikat pada 1843-1860, dan Jepang pada 1878-1900 (Szirmai, 2015).

Tahap keempat, menuju kedewasaan, ditandai dengan penerapan teknologi modern di seluruh sektor ekonomi, diversifikasi industri, peningkatan urbanisasi, dan profesionalisasi manajemen. Pada tahap ini, perekonomian menunjukkan kemampuan untuk bergerak melampaui industri-industri original yang mendorong take-off dan untuk menyerap serta mengaplikasikan teknologi canggih secara efisien. Inovasi teknologi menjadi lebih terspesialisasi dan kompleks, sementara struktur tenaga kerja berubah signifikan dengan peningkatan proporsi pekerja terampil dan profesional. Rostow memperkirakan bahwa tahap ini biasanya tercapai sekitar 60 tahun setelah dimulainya take-off, meskipun tempo perubahan dapat bervariasi antar negara (Cypher & Dietz, 2022).

Tahap final, masa konsumsi tinggi, merepresentasikan puncak pembangunan ekonomi di mana fokus masyarakat beralih dari produksi ke konsumsi dan kesejahteraan. Karakteristik utama tahap ini meliputi dominasi sektor jasa, konsumsi barang-barang tahan lama secara massal, dan peningkatan pengeluaran untuk kesejahteraan sosial. Meskipun teori Rostow mendapat kritik karena determinisme teknologinya dan asumsi linearitas dalam proses pembangunan, kontribusinya dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi tetap relevan hingga saat ini. Teori ini memberikan wawasan penting tentang peran krusial akumulasi modal, perubahan teknologi, dan transformasi institusional dalam proses pembangunan, serta menyoroti pentingnya menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (Chang, 2018).

b. Arthur Lewis

Sir William Arthur Lewis (1915-1991), pemenang Nobel Ekonomi 1979, memberikan kontribusi fundamental dalam teori pembangunan ekonomi melalui artikelnya yang monumental "*Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*" (1954). Lewis mengembangkan model perekonomian dualistik yang menjelaskan proses transformasi struktural di negara berkembang, di mana terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional (subsisten) ke sektor modern (kapitalis). Model ini, yang kemudian dikenal sebagai "Model Lewis", menjelaskan bagaimana surplus tenaga kerja di sektor tradisional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi sektor modern, dengan asumsi

bahwa upah di sektor modern ditetapkan di atas tingkat subsisten untuk menarik pekerja dari sektor tradisional (D. Gollin, 2014).

Model Lewis dibangun di atas premis adanya dualisme ekonomi yang tajam antara sektor tradisional yang dicirikan oleh produktivitas marjinal tenaga kerja yang mendekati nol, dan sektor modern yang memiliki produktivitas tinggi serta berorientasi pada akumulasi modal. Dalam kerangka analisisnya, Lewis menjelaskan bahwa proses pembangunan ekonomi terjadi melalui ekspansi bertahap sektor modern yang secara gradual menyerap surplus tenaga kerja dari sektor tradisional. Keuntungan yang diperoleh sektor modern direinvestasikan untuk ekspansi lebih lanjut, menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Proses ini berlanjut hingga tercapai titik balik Lewis (*Lewis turning point*), yaitu ketika surplus tenaga kerja di sektor tradisional habis terserap, yang mengakibatkan peningkatan upah riil di kedua sektor (Fields, 2019)

Lewis memberikan perhatian khusus pada peran akumulasi modal dan reinvestasi keuntungan dalam mendorong pertumbuhan sektor modern. Ia berargumen bahwa tingkat upah di sektor modern cenderung tetap selama masih tersedia surplus tenaga kerja, memungkinkan pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar yang dapat direinvestasikan. Kunci dari model ini adalah asumsi bahwa pengusaha di sektor modern akan menginvestasikan kembali keuntungan mereka daripada mengonsumsinya, sehingga menciptakan ekspansi berkelanjutan dalam kapasitas produksi dan kesempatan kerja. Lewis juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di sektor tradisional untuk mendukung proses transformasi struktural, meskipun fokus utama modelnya adalah pada dinamika sektor modern (Ranis & Fei, 2021).

Salah satu aspek penting dari model Lewis adalah analisisnya tentang distribusi pendapatan dalam proses pembangunan. Model ini menunjukkan bahwa selama fase surplus tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi cenderung menguntungkan pemilik modal karena upah riil tetap konstan sementara produktivitas meningkat. Namun, setelah mencapai titik balik Lewis, peningkatan upah riil mulai terjadi, yang mengarah pada distribusi manfaat pertumbuhan yang lebih merata. Lewis juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menghambat

proses transformasi struktural, termasuk ketidakcukupan akumulasi modal, pertumbuhan populasi yang terlalu cepat, dan kegagalan sektor modern untuk menciptakan cukup lapangan kerja (Todaro & Smith, 2020)

Model Lewis telah memberikan kerangka analitis yang berharga untuk memahami proses pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang, meskipun beberapa asumsinya telah dikritik sebagai terlalu sederhana. Relevansinya tetap signifikan dalam konteks kontemporer, terutama untuk memahami transformasi struktural di negara-negara berkembang yang masih menghadapi dualisme ekonomi. Kontribusi Lewis tidak hanya terbatas pada teori pembangunan ekonomi, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang hubungan antara industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur tenaga kerja. Dalam era globalisasi saat ini, model Lewis masih relevan untuk menganalisis perpindahan tenaga kerja internasional dan dinamika pembangunan ekonomi global.

c. Karl Gunnar Myrdal

Karl Gunnar Myrdal (1898-1987), pemenang Nobel Ekonomi 1974, memberikan kontribusi revolusioner terhadap teori pembangunan ekonomi melalui karyanya yang monumental "*Economic Theory and Underdeveloped Regions*" (1957) dan "*Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*" (1968). Myrdal mengembangkan teori kausasi kumulatif yang menjelaskan bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah dan antarnegara cenderung melebar seiring waktu melalui proses yang saling menguatkan. Berbeda dengan pandangan neo-klasik yang menekankan kecenderungan ekuilibrium dan konvergensi, Myrdal berargumen bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kekuatan pasar cenderung meningkatkan ketimpangan mengurangi ketimpangan, baik dalam konteks regional maupun internasional (S. Kim, 2008)

Konsep sentral dalam teori Myrdal adalah prinsip kausasi kumulatif (*cumulative causation*), yang menjelaskan bagaimana suatu perubahan dalam sistem sosial-ekonomi memicu serangkaian perubahan sekunder yang cenderung memperkuat perubahan awal melalui proses lingkaran setan (*vicious circle*) atau lingkaran berkah (*virtuous circle*). Dalam konteks pembangunan regional, Myrdal mengidentifikasi dua efek yang saling berlawanan: efek pembiakan (*spread effects*) yang positif dan efek

pengurasan (backwash effects) yang negatif. Efek pembiakan terjadi ketika pertumbuhan di pusat pembangunan memberikan dampak positif pada daerah sekitarnya melalui difusi teknologi, peningkatan permintaan, dan penciptaan peluang ekonomi. Sebaliknya, efek pengurasan merujuk pada bagaimana pertumbuhan di pusat dapat merugikan daerah pinggiran melalui brain drain, pengurasan modal, dan pemusatan aktivitas ekonomi (Setterfield, 2010)

Myrdal memberikan perhatian khusus pada peran institusi dan faktor-faktor non-ekonomi dalam proses pembangunan. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai proses perubahan sosial yang kompleks, di mana faktor-faktor ekonomi, sosial, institusional, dan budaya saling terkait dan saling memengaruhi. Dalam analisisnya tentang negara-negara Asia dalam "Asian Drama", Myrdal mengembangkan konsep "*soft state*" untuk menggambarkan lemahnya kapasitas institusional, korupsi, dan ketidakefektifan kebijakan publik yang menghambat pembangunan. Ia berargumen bahwa reformasi institusional dan penguatan tata kelola merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Myrdal juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam analisis pembangunan yang mempertimbangkan interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi (Streeten, 1981)

Dalam konteks kebijakan pembangunan, Myrdal mengadvokasi peran aktif negara dalam mengatasi kegagalan pasar dan mengurangi ketimpangan regional maupun internasional. Ia berargumen bahwa intervensi kebijakan diperlukan untuk memperkuat efek pembiakan dan mengurangi efek pengurasan, misalnya melalui investasi infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Myrdal juga mengkritik asumsi-asumsi teori perdagangan internasional konvensional dan berargumen bahwa perdagangan bebas cenderung menguntungkan negara-negara maju dengan mengorbankan negara berkembang. Ia menekankan pentingnya kebijakan industrial yang terencana dan proteksi selektif untuk mendukung industrialisasi di negara berkembang (Chang & Grabel, 2021)

Kontribusi Myrdal terhadap teori pembangunan ekonomi tetap relevan dalam konteks kontemporer, terutama dalam memahami persistensi ketimpangan global dan regional serta peran institusi dalam

pembangunan. Analisisnya tentang kausasi kumulatif memberikan kerangka teoretis yang berguna untuk memahami bagaimana ketimpangan dapat terus melebar melalui mekanisme yang saling menguatkan, sementara penekanannya pada faktor-faktor non-ekonomi dan institusional memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas proses pembangunan. Dalam era globalisasi dan transformasi digital saat ini, perspektif Myrdal tentang pentingnya kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi ketimpangan dan mendorong pembangunan inklusif menjadi semakin relevan (Reinert, 2021)

Teori-teori ekonomi pembangunan mencerminkan tren dalam teori ekonomi yang secara umum telah bergeser dari kepercayaan pada kebebasan ke pendekatan yang lebih intervensionis. Perring, (2023) memberikan contoh karya dari Jeffrey Sachs, yang awalnya sebagai tokoh ekonomi pembangunan pada teori pembangunan neoliberal pada akhir tahun 1990 lebih berhati-hati terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal, ia juga mengusulkan adanya bantuan luar negeri untuk memenuhi kesenjangan biaya pada negara sedang berkembang untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Apa yang ditunjukkan oleh karya Sachs dan ketokohnya juga menunjukkan bahwa teori-teori ekonomi pembangunan tidak didominasi kaum neoliberalisme. Akan tetapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia, diantaranya adalah :

1. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan yang dikembangkan oleh pemikir Amerika Latin seperti Raúl Prebisch dan Andre Gunder Frank memandang pembangunan dari perspektif sistemik global. Mereka mengargumentasikan bahwa negara-negara berkembang tetap tersubordinasi dalam sistem ekonomi kapitalis internasional, mengalami eksploitasi struktural oleh negara-negara metropolis (Frank, 1967). Teori ini menjelaskan mengapa ketimpangan global tetap bertahan melalui mekanisme pertukaran yang tidak setara dan struktur ekonomi yang eksploitatif.

2. Teori Institusional

Teori institusional, yang dikembangkan oleh Douglas North dan Daron Acemoglu, menekankan peran kelembagaan dalam mendorong pembangunan ekonomi (North, 1990, Acemoglu, D., & Robinson, 2012). Mereka berargumen bahwa kualitas institusi baik institusi politik maupun

ekonomi menjadi faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan. Institusi inklusif yang mendorong partisipasi, inovasi, dan perlindungan hak properti diyakini mampu menciptakan insentif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kelembagaan dan tata pemerintahan memiliki peran krusial dalam kerangka konseptual ekonomi pembangunan. North (2020) menjelaskan bahwa kualitas institusi menentukan efektivitas proses pembangunan ekonomi. Institusi yang inklusif, transparan, dan akuntabel mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi inovasi, investasi, dan alokasi sumber daya yang efisien. Hal ini meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, sistem perpajakan, pasar tenaga kerja, serta mekanisme perlindungan hak properti. Kegagalan kelembagaan dapat menghambat proses pembangunan dan menciptakan distorsi ekonomi.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan muncul sebagai respons terhadap tantangan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh model pembangunan konvensional. Menurut laporan Brundtland (1987), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Teori ini mengintegrasikan tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagai kerangka holistik dalam memahami proses pembangunan.

Ekonomi pembangunan menempatkan sustainability dan inklusivitas sebagai prinsip utama. Pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang. *United Nations Development Programme* (UNDP, 2023) menegaskan bahwa pembangunan inklusif mensyaratkan adanya distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata, memberikan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. Pendekatan ini mengintegrasikan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kerangka pembangunan nasional.

D. PARADIGMA DAN PENDEKATAN MODERN DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma komprehensif yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan yang holistik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam Laporan Brundtland pada 1987 dan telah mengalami perkembangan signifikan dalam dekade terakhir. Menurut United Nations (2022), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pendekatan sistemik yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini meliputi strategi mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan energi terbarukan, serta model produksi dan konsumsi yang efisien. Akan tetapi implementasi dari ekonomi berkelanjutan keberhasilannya tergantung pada kemampuan negara dalam merancang kebijakan yang terintegrasi dan bersifat lintas sektor.

Tantangan utama dalam implementasi pembangunan berkelanjutan adalah kompleksitas koordinasi antarpemangku kepentingan dan kebutuhan transformasi fundamental dalam sistem ekonomi. World Bank (2023) mengidentifikasi bahwa negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan. Diperlukan inovasi kelembagaan, investasi teknologi hijau, serta mekanisme pendanaan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif. Pendekatan ekonomi lingkungan menjadi instrumen kritis dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Konsep valuasi ekonomi lingkungan memungkinkan pengukuran dampak ekonomi dari sumber daya alam dan jasa ekosistem. Menurut Stern (2021), valuasi ekonomi lingkungan membantu pembuat kebijakan memahami trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan, serta merancang instrumen ekonomi seperti pajak karbon, insentif konservasi, dan mekanisme perdagangan emisi.

Selain itu, Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan ekosistem yang komprehensif, mempertimbangkan kompleksitas

interaksi antara sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keseimbangan ekologis tidak sekadar menjadi pertimbangan marginal, melainkan fundamental dalam arsitektur pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mensyaratkan redesain total model produksi dan konsumsi, mengintegrasikan prinsip sirkular ekonomi, efisiensi sumber daya, serta mitigasi dampak lingkungan dalam setiap tahapan proses ekonomi. Mekanisme Insentif dan Transformasi Kelembagaan Implementasi pembangunan berkelanjutan membutuhkan mekanisme insentif yang mendorong transformasi kelembagaan. Acemoglu, D., & Robinson, (2019b) mengidentifikasi bahwa sistem insentif ekonomi berperan kritis dalam mendorong adopsi praktik berkelanjutan. Hal ini meliputi kebijakan perpajakan hijau, skema perdagangan karbon, insentif fiskal bagi inovasi teknologi rendah emisi, serta kerangka regulasi yang mendorong tanggung jawab lingkungan korporasi. Transformasi kelembagaan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan membutuhkan desain mekanisme konkret yang menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

2. Pembangunan Inklusif dan Pemerataan

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan strategis yang bertujuan menjamin distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh kelompok sosial dalam proses pembangunan, termasuk kelompok marginal dan rentan. Konsep ini menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. Strategi pembangunan inklusif meliputi beberapa intervensi kunci, seperti peningkatan akses pendidikan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, perlindungan sosial, serta penciptaan lingkungan usaha yang mendukung partisipasi pelaku ekonomi skala mikro dan kecil. Todaro, Michael P & Smith, (2021) mengidentifikasi bahwa keberhasilan pembangunan inklusif mensyaratkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat pedesaan, dan penyandang disabilitas.

Indikator keberhasilan pembangunan inklusif dapat diukur melalui berbagai dimensi, di antaranya tingkat kemiskinan, ketimpangan

pendapatan, akses layanan dasar, serta partisipasi ekonomi. *World Economic Forum*, (2023) mencatat bahwa negara-negara dengan tingkat pembangunan inklusif tinggi cenderung memiliki stabilitas sosial-politik yang lebih baik, inovasi yang berkelanjutan, serta daya saing ekonomi yang kompetitif.

3. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan menempatkan individu sebagai subjek utama proses pembangunan, bukan sekadar objek intervensi pembangunan. Kerangka ini mengintegrasikan prinsip-prinsip universalitas, partisipasi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi ke dalam strategi pembangunan. United Nations Human Rights (2022) menegaskan bahwa pendekatan berbasis HAM bertujuan memberdayakan masyarakat untuk mengakses hak-hak fundamental mereka dalam konteks pembangunan. Implementasi pendekatan berbasis HAM mensyaratkan transformasi kelembagaan yang memperhatikan aspek keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan. Hal ini meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum, serta mekanisme perlindungan hak-hak fundamental masyarakat. Desain kelembagaan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini mensyaratkan penguatan kapasitas masyarakat sipil, transparansi kelembagaan, serta penciptaan ruang dialog yang inklusif dan setara. United Nations Human Rights, (2023) mengidentifikasi bahwa perlindungan HAM dalam pembangunan memerlukan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok marginal. Hal ini meliputi perlindungan hak perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya melalui intervensi hukum yang transformatif dan kontekstual.

Tantangan utama pendekatan berbasis HAM adalah kompleksitas harmonisasi antara kerangka hukum internasional, kebijakan nasional, dan konteks lokal. Adanya komitmen politik, kesadaran publik, serta kapasitas kelembagaan dalam mentransformasikan prinsip-prinsip HAM menjadi praktik pembangunan yang konkret dan bermakna merupakan keberhasilan dalam implementasi pendekatan ini.

4. Transformasi Struktural Ekonomi

Transformasi struktural ekonomi merupakan proses fundamental perpindahan tenaga kerja dan sumber daya dari sektor produktivitas rendah menuju sektor produktivitas tinggi. Konsep ini menjadi inti dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut World Bank, (2023) transformasi struktural dicirikan oleh pergeseran kontribusi sektor ekonomi, di mana porsi sektor pertanian menurun sementara sektor industri dan jasa mengalami peningkatan signifikan. Dinamika transformasi struktural melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk inovasi teknologi, pengembangan modal manusia, serta perubahan kelembagaan. Todaro & Smith, (2020) menekankan bahwa keberhasilan transformasi struktural bergantung pada kemampuan negara dalam menciptakan ekosistem inovasi, mendorong investasi di sektor produktif, serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung diversifikasi ekonomi.

Tantangan utama transformasi struktural adalah ketidaksetaraan akses sumber daya, keterbatasan kapasitas institusional, serta resistensi terhadap perubahan dan negara-negara berkembang memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasi hambatan struktural, termasuk melalui kebijakan industrial, investasi pendidikan, serta penguatan konektivitas ekonomi global. Transformasi struktural ekonomi pada era kontemporer sangat ditopang oleh inovasi teknologi dan redesain sistem produksi. Revolusi industri 4.0 membuka ruang transformasi fundamental dalam arsitektur ekonomi, mencakup otomatisasi, kecerdasan artifisial, serta sistem produksi yang terintegrasi. Hal ini mensyaratkan investasi masif dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan teknologis. Transformasi struktural ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik dan pergeseran kekuatan ekonomi global. World Bank, (2023) mencatat bahwa proses transformasi struktural pada abad ke-21 ditandai oleh ketidakpastian, interkonektivitas global, serta pergeseran rantai nilai internasional. Negara-negara dituntut untuk mengembangkan strategi adaptif, membangun ketangguhan ekonomi, serta mampu merespon perubahan struktural secara responsif dan antisipatif.

BAB 4 CIRI NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Definisi ini sering merujuk pada kriteria seperti pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, standar hidup, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan (Todaro & Smith, 2020). Menurut World Bank, negara berkembang adalah negara yang memiliki Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang lebih rendah dan sering menghadapi tantangan signifikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar (World Bank, 2021).

Menurut Sari & Gunawan (2021), negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang relatif rendah, yang ditandai dengan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Dikuatkan oleh Pratama (2022), negara berkembang adalah negara yang berupaya meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup warganya melalui reformasi struktural, peningkatan akses pendidikan, dan investasi pada sektor kesehatan. Sedangkan Menurut Lestari & Suryani (2023), negara berkembang mengacu pada negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuasi dan berusaha mencapai stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi ekonomi.

Mengidentifikasi negara berkembang memiliki peran penting dalam berbagai aspek, terutama dalam konteks kebijakan pembangunan dan bantuan internasional. Klasifikasi ini membantu organisasi internasional, seperti PBB dan Bank Dunia, dalam merancang program yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial negara-negara tersebut (Sachs, 2015). Selain itu, pengelompokan ini juga menjadi dasar bagi pemberian bantuan internasional, termasuk bantuan teknis, keuangan, dan kemanusiaan yang dapat meningkatkan kapasitas nasional dan daya saing global negara berkembang (Collier, 2007).

Tujuan bab ini adalah untuk menyajikan ciri-ciri umum negara berkembang berdasarkan berbagai sumber yang relevan. Artikel ini akan

merangkum faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang umumnya ditemukan di negara-negara berkembang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara ini dalam konteks global.

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Negara berkembang umumnya memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah, yang mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, dan infrastruktur yang memadai, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitiannya, Marlow (2019) menjelaskan bahwa negara-negara berkembang umumnya mengalami pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju, seringkali disebabkan oleh ketidakstabilan politik, kurangnya investasi dalam pendidikan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Sejalan dengan penelitian tersebut, menurut Faruqee & Ghosh(2020) ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di negara berkembang seperti yang ditunjukkan oleh indikator PDB per kapita sering kali hanya sebagian kecil dari pendapatan per kapita di negara maju. Penurunan produktivitas dan akses pasar yang terbatas adalah beberapa faktor penyebabnya.

Di Indonesia sendiri Pembangunan Indonesia menyatakan bahwa pendapatan per kapita yang rendah di negara berkembang disebabkan oleh ketergantungan pada sektor primer dan rendahnya tingkat industrialisasi(Mulyadi, 2021). Negara-negara ini sering kali masih bergantung pada ekspor bahan mentah yang harganya fluktuatif. Hadi (2022) menyoroti bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang berkontribusi pada pendapatan per kapita yang rendah. Kurangnya akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan juga mempengaruhi kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan penelitian tersebut bahwa tingkat pendapatan per kapita yang rendah sering kali berkaitan dengan rendahnya kualitas institusi dan pemerintahan. Institusi yang lemah dapat menghambat investasi dan inovasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita(Sari, 2023). Meskipun beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, pendapatan per kapita mereka masih rendah

dibandingkan dengan negara maju, terutama karena ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional dan keterbatasan teknologi (Yuliana, 2024).

Struktur ekonomi mencerminkan bagaimana berbagai sektor ekonomi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto. Menurut Eka Nurdiano, struktur ekonomi adalah gambaran tentang bagaimana berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa, saling berhubungan dan berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan (Sembiring & Faried, 2019).

Struktur ekonomi suatu daerah ibarat kue. Setiap potongan kue (sektor) mewakili bagian dari keseluruhan kue (PDRB). Ukuran setiap potongan menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor tersebut terhadap total pendapatan daerah. Besarnya proporsi kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tingkat ketergantungan dan pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor, semakin besar pula perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan pengembangan sektor-sektor unggulan guna meningkatkan kontribusi terhadap PDRB.

Diversifikasi ekonomi merupakan kunci pembangunan yang berkelanjutan. Sektor industri telah berhasil berkontribusi dalam diversifikasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian. Pertumbuhan sektor industri yang pesat menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong industrialisasi dan modernisasi. Peran sektor industri dalam transformasi ekonomi nasional tercermin dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri. Analisis mendalam terhadap kontribusi subsektor industri dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah pembangunan industri di masa depan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, visi pembangunan industri nasional adalah menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025.

Perubahan adalah hal yang dinamis dan tak terelakkan. Dampak perubahan sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menghadapinya. Penerimaan yang baik akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan, sedangkan penolakan akan memicu konflik dan disintegrasi sosial. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika interaksi

sosial manusia. Jika sebelumnya hubungan sosial lebih ditekankan pada tatap muka langsung, kini komunikasi virtual melalui ponsel menjadi lebih dominan. Fenomena ini turut berkontribusi pada meningkatnya kecenderungan individualisme dalam masyarakat.

Perubahan sosial merupakan dinamika inheren dalam kehidupan bermasyarakat yang tak dapat dielakkan. Interaksi sosial yang kompleks menjadi pendorong utama terjadinya perubahan ini. Perubahan sosial merupakan fenomena universal yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Proses ini berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Sebagai entitas yang hidup dan berkembang, masyarakat senantiasa mengalami transformasi. Perubahan sosial merupakan cerminan dari dinamika internal dan eksternal yang membentuk masyarakat (Syarifudin, 2012).

Perubahan merupakan suatu konstanta dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial yang terjadi dapat bersifat individual maupun kolektif, dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Mengutip pendapat William F. Ogburn, ruang lingkup perubahan sosial meliputi seluruh aspek kebudayaan, baik material maupun non-material. Dinamika kehidupan manusia tidak lepas dari adanya perubahan. Perubahan sosial yang terjadi dapat bersifat kecil maupun besar, dan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ogburn berargumen bahwa perubahan sosial mencakup seluruh aspek kebudayaan, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan teknologi (Soerjono, 1994).

Sifat dinamis kehidupan menyebabkan segala sesuatu, termasuk manusia, mengalami perubahan terus-menerus. Baik sebagai individu maupun makhluk sosial, manusia akan selalu mengalami transformasi. Kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan perubahan.

Dinamika sosial tak hanya mengubah perilaku individu dan organisasi, namun juga norma serta struktur internal organisasi. Interaksi ini turut dipengaruhi oleh pendidikan. Sifat dinamis kehidupan manusia menjadikan perubahan sebagai fenomena universal yang penyebarannya begitu cepat dan luas, bahkan menjangkau aspek kehidupan yang paling modern sekalipun. Revolusi teknologi, yang seringkali tak disadari, memiliki dampak signifikan terhadap transformasi sosial, termasuk dalam ranah pendidikan.

Perubahan sosial, meskipun kecil, dapat memengaruhi struktur kehidupan sosial lainnya dan terjadi akibat perubahan pada unsur-unsur yang menjaga keseimbangan masyarakat. Unsur-unsur tersebut meliputi aspek geografis, biologis, ekonomi, dan budaya. Perubahan-perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman yang terus berubah secara dinamis (Agus, 2002).

Interaksi sosial menjadi landasan terjadinya perubahan sosial. Dahrendorf menekankan peran dominasi sebagai salah satu kekuatan pendorong perubahan. Meskipun demikian, faktor-faktor lain baik dari dalam maupun luar masyarakat juga turut berkontribusi dalam memicu perubahan. Sumber perubahan sosial, menurut perspektif ini, dapat diidentifikasi sebagai endogen atau eksogen (Donatus, 2005). Adapun sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dari faktor internal, antara lain:

1. Pertambahan jumlah penduduk, seperti yang terjadi akibat transmigrasi, dapat memicu perubahan signifikan dalam struktur sosial, khususnya pada lembaga-lembaga sosial. Kehadiran transmigran berpotensi membawa dampak positif, terutama jika mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat;
2. Pertentangan atau konflik akan selalu ada selama manusia hidup berkelompok. Konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola. Keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sering kali memicu persaingan yang pada akhirnya mengarah pada konflik. Ketika konflik terjadi dalam masyarakat, hal ini menyebabkan frustrasi dan kecemasan sosial, membuat individu menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dari hal-hal baru;
3. Inovasi kebudayaan memiliki dampak yang luas dan saling terkait pada berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, penemuan listrik telah memicu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seperti radio, televisi, dan komputer, yang pada gilirannya telah mengubah pola perilaku, sistem pendidikan, dan dinamika ekonomi masyarakat.

Selain faktor internal, perubahan sosial juga dapat dipicu oleh adanya pengaruh dari luar sistem sosial. Beberapa contoh faktor eksternal tersebut antara lain:

1. Kondisi lingkungan alam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur sosial, budaya, dan perilaku masyarakat. Diversitas lingkungan

alam memunculkan keberagaman dalam mata pencaharian, sehingga menghasilkan perbedaan yang mencolok antara kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan;

2. Konflik bersenjata antar negara seringkali mengakibatkan perubahan yang signifikan. Negara yang kalah perang umumnya dipaksa untuk tunduk pada kehendak negara pemenang, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Adopsi budaya asing dapat memicu transformasi signifikan dalam tatanan sosial. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan arus informasi, transparansi, dan interkoneksi ekonomi yang semakin intensif, pengaruh budaya asing telah merembes ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola konsumsi dan gaya hidup.

Perubahan dalam masyarakat bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau dari luar. Berdasarkan hal ini, kita bisa mengelompokkan perubahan sosial menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Immanent Change*, yaitu Perubahan yang terjadi secara alami dari dalam sistem itu sendiri, tanpa banyak pengaruh dari luar;
2. *Selective Contact Change*, yaitu Perubahan yang terjadi akibat kontak yang tidak disengaja dengan orang luar, sehingga membawa pengaruh ide-ide baru;
3. *Directed Contact Change*, yaitu Perubahan yang terjadi akibat adanya intervensi dari pihak luar untuk memperkenalkan ide-ide baru.

Jika dilihat dari proses perubahan itu sendiri memiliki tahap- tahap tertentu, yang dalam hal ini adatingkat tahap yaitu:

1. *Invention*, yaitu Tahap di mana inovasi atau gagasan baru muncul dan berkembang dalam masyarakat;
2. *Diffusion*, yaitu Tahap penyebaran inovasi yang melibatkan jaringan sosial;
3. *Consequence*, yaitu Tahap di mana inovasi menghasilkan perubahan dalam struktur sosial, budaya, atau institusi.

Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial menurut Soerjono Soekanto (Astuti et al., 2023) dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Perubahan lambat (Evolusi)
Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan, seperti peralihan dari atap alang-alang ke atap seng di pedesaan, menunjukkan bagaimana masyarakat secara bertahap menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa

adanya perencanaan yang matang. Perubahan ini bersifat alami dan merupakan bagian dari proses evolusi sosial.

2. Perubahan cepat (Revolusi)

Perubahan sosial dan budaya yang bersifat revolusioner memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur dasar masyarakat. Revolusi dapat terjadi secara spontan maupun terencana, serta dapat berlangsung secara damai atau melalui konflik bersenjata. Perang kemerdekaan merupakan salah satu contoh nyata dari revolusi yang melibatkan kekerasan.

3. Perubahan sosial yang direncanakan

Perubahan yang bersifat intentionality merupakan hasil dari perencanaan yang matang oleh aktor-aktor sosial tertentu. Aktor-aktor ini, yang dikenal sebagai agen perubahan, memiliki peran sentral dalam menginisiasi dan mengimplementasikan perubahan sosial. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan jalan raya merupakan contoh nyata dari perubahan yang direncanakan oleh pemerintah atau tokoh masyarakat.

4. Perubahan sosial yang tidak direncanakan

Perubahan sosial yang bersifat unintended merupakan peristiwa yang terjadi di luar kendali manusia dan seringkali membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Bencana alam dan konflik sosial merupakan contoh nyata dari perubahan yang tidak direncanakan, yang dapat menimbulkan kerusakan fisik dan sosial yang signifikan.

Produktivitas penelitian di negara-negara berkembang telah menjadi topik yang menarik bagi banyak peneliti dan pembuat kebijakan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap perbedaan produktivitas penelitian antara negara maju dan negara berkembang. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas penelitian di negara berkembang meliputi negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti fasilitas penelitian yang tidak memadai, akses terbatas ke sumber informasi dan literatur, dan kurangnya dana untuk proyek penelitian (Ashour et al., 2023). Tingkat pendidikan dan sumber daya manusia di negara berkembang umumnya lebih rendah daripada di negara maju. Hal ini dapat mengakibatkan kapasitas yang lebih rendah untuk penelitian dan inovasi. Praktik manajemen yang buruk di perusahaan-perusahaan di negara berkembang dapat menyebabkan produktivitas yang rendah. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang tidak efisien, kurangnya pendelegasian

pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan yang tidak memadai (Bloom et al., 2010).

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang unik dalam bidang pendidikan, termasuk sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, dan kesenjangan sosial ekonomi. Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya penelitian yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik negara-negara ini dan untuk menjembatani kesenjangan Pendidikan dengan negara-negara maju. Asia Tenggara, yang terdiri dari negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, merupakan wilayah yang beragam dengan berbagai tingkat pembangunan ekonomi, sistem pendidikan, dan infrastruktur penelitian. Produktivitas penelitian pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Tenggara telah berkembang, tetapi masih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara-negara terkemuka lainnya di kawasan ini. Sebuah tinjauan bibliometrik terhadap penelitian pendidikan di Asia Tenggara dari tahun 1996 hingga 2019 menunjukkan Tingkat pertumbuhan yang stabil dan publikasi yang selektif yang mendukung jurnal-jurnal terbaik diantara negara-negara terkemuka di kawasan ini. Namun, para peneliti pendidikan dari negara-negara berkembang sering kali mempublikasikan karya mereka di jurnal-jurnal tingkat rendah. Hubungan yang substansial antara produktivitas, dampak, dan kolaborasi penelitian juga diamati (Barrot, 2023).

Pada bidang penelitian Pengajaran Bahasa Inggris, negara-negara Asia Tenggara telah menghasilkan hampir 2% dari semua artikel yang diterbitkan dalam studi bahasa dan linguistik dan sekitar 1% dari keseluruhan kutipan di seluruh dunia (Ngoc & Barrot, 2022). Dalam bidang ilmu perpustakaan, Malaysia merupakan negara yang paling produktif dengan 287 artikel, diikuti oleh Singapura dengan 4.922 kutipan (Ibrahim et al., 2021). Di bidang penelitian tumor otak primer, ditemukan korelasi positif antara persentase PDB untuk penelitian dan pengembangan (R&D) dengan total publikasi (Mondia et al., 2020). Dalam penelitian sakit kepala primer, produktivitasnya rendah di Asia Tenggara, namun pergerakan menuju ekonomi berbasis pengetahuan dapat mendorong produktivitas penelitian di wilayah ini (Vega et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk menilai tingkat keberhasilan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi dalam berbagai bentuk modal, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Semakin besar investasi dan semakin maju teknologi yang digunakan, maka potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin tinggi (Nasution et al., 2024). Kualitas infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi. Jalan raya yang baik memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi. Akses terhadap listrik dan air bersih mendukung kegiatan produksi, sementara fasilitas kesehatan yang memadai meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Kurniawati & Asyurrahman, 2018).

Kondisi ini menjadi agenda penting pada WTO karena mencakup beberapa kegiatan, yaitu: (1) Bertujuan untuk mendukung pembangunan; (2) Pentingnya integrasi negara-negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral agar mendukung pembangunan ekonomi mereka dibahas dalam konferensi tingkat menteri WTO yang pertama; dan (3) Persiapan pembangunan (*Doha Development Agenda*) untuk menangani isu-isu perdagangan dan pembangunan penting seperti utang dan pembiayaan, perdagangan dan transfer teknologi, serta kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas, khususnya bagi negara-negara kurang berkembang dengan perlakuan khusus dan berbeda. Salah satu tantangan utama dalam perdagangan internasional adalah meningkatnya hambatan non-tarif. Aturan-aturan yang tidak efisien ini menghambat arus barang dan jasa antar negara, sehingga mengurangi kapasitas perdagangan suatu negara. Untuk mendorong pertumbuhan perdagangan global, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi hambatan non-tarif ini. Penghapusan hambatan non-tarif akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dunia.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internasional. Oleh karena itu, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif. Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) telah menetapkan aturan-aturan yang membatasi penggunaan instrumen proteksi perdagangan yang terlalu ketat. Tujuan utama dari fasilitasi perdagangan adalah untuk menghilangkan hambatan administratif yang menghambat aliran barang secara internasional. Melalui proses klarifikasi dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam GATT 1994, fasilitasi perdagangan bertujuan untuk memperlancar pergerakan barang lintas batas. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA)

merupakan tonggak sejarah dalam upaya global untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan efisien. Selain itu, perjanjian fasilitasi perdagangan ini juga merupakan bagian dari kesepakatan GATT yang lebih luas dalam WTO, di mana langkah-langkah fasilitasi perdagangan harus diterapkan pada setiap produk yang diperdagangkan melalui perdagangan internasional(Ukas et al., 2024).

Implementasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap perdagangan global, termasuk bagi Indonesia sebagai anggota WTO. TFA memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai fasilitasi perdagangan lintas batas dan menjabarkan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam GATT. Fleksibilitas diberikan kepada setiap negara anggota untuk menentukan jenis bantuan teknis dan kapasitas yang diperlukan dalam rangka implementasi TFA. Di Indonesia, kerangka hukum untuk pelaksanaan TFA telah terbangun dengan baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan perdagangan luar negeri.

Maka dari itu negara berkembang, sering juga disebut negara berpendapatan rendah atau menengah, memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari negara maju. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama negara berkembang yaitu: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara negara berkembang dan negara maju dalam hal tingkat pendapatan. Penduduk negara berkembang umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah, yang berdampak pada kualitas hidup mereka dan akses terhadap layanan publik yang memadai; (2) Struktur Ekonomi, berkembang biasanya didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam. Sektor industri dan jasa cenderung kurang berkembang; (3) Tingkat Kemiskinan yang Tinggi, Banyak warga negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perumahan; (4) Pertumbuhan Penduduk yang Pesat, Negara berkembang sering mengalami pertumbuhan populasi yang cepat, yang dapat memperburuk masalah kemiskinan dan menambah tekanan pada infrastruktur dan sumber daya; (5) Keterbatasan Infrastruktur, Infrastruktur di negara berkembang sering kali kurang memadai, termasuk dalam hal transportasi, energi, dan komunikasi; (6) Ketergantungan pada Bantuan Asing, Banyak negara berkembang bergantung pada bantuan internasional dan utang luar negeri untuk mendanai proyek pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar.

(7) Ketidakstabilan Politik dan Sosial, Beberapa negara berkembang mengalami ketidakstabilan politik dan sosial, termasuk konflik, korupsi, dan kelemahan dalam institusi pemerintah.

Kebijakan sering dianggap sebagai jantung dari setiap organisasi, pemerintahan, atau industry. Pada dasarnya, kebijakan adalah serangkaian prinsip, panduan, atau aturan yang ditetapkan untuk membimbing keputusan dan mencapai hasil yang di inginkan. kebijakan memainkan peran penting dalam membentuk Tindakan dan perilaku, serta memberikan kerangka kerja bagi individu atau kelompok untuk beroprasi dengan cara yang konsisten dan terstruktur. Dalam proses pembuatan kebijakan, identifikasi masalah adalah langkah awal. Setelah masalah diidentifikasi, solusi potensial akan dianalisis dan dibahas. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan, sering kali dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan adalah komprehensif dan efektif. Namun, memiliki kebijakan saja tidak cukup. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan benar dan secara konsisten. Implementasi adalah tahap di mana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Ini memerlukan koordinasi, sumber daya, dan kadang-kadang pelatihan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mengikuti kebijakan tersebut. Tentu saja, dunia berubah, dan kebijakan harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi kebijakan menjadi bagian penting dari siklus kebijakan. Evaluasi memungkinkan organisasi atau pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan, sedangkan revisi memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Keseluruhan proses ini, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi, memastikan bahwa kebijakan berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Di era yang semakin kompleks ini, pemahaman yang mendalam tentang konsep kebijakan dan bagaimana cara kerjanya menjadi kunci untuk sukses dalam berbagai bidang(Zein & Septiani, 2023)

BAB 5 FAKTOR

PEMBANGUNAN

Pada tahun 1776, Adam Smith sudah mulai membahas tentang cara mengembangkan perekonomian suatu negara dalam bukunya. Namun, pembahasannya belum begitu lengkap. Ilmu ekonomi pembangunan itu sendiri sebenarnya bukan sekadar gabungan dari berbagai ilmu ekonomi yang sudah ada, melainkan ilmu yang berdiri sendiri dengan cara pandang dan metode yang unik (Elina, 2023).

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kemauan politik dan kapasitas institusional negara tersebut. Sebelum memulai proses pembangunan, negara yang sedang berkembang perlu memenuhi sejumlah prasyarat dasar sebagai fondasi yang kuat. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan menghilangkan hambatan, tetapi juga memerlukan upaya proaktif untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan.

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sumber daya hayati hingga sumber daya mineral. Potensi sumber daya alam ini dapat menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian, sebagai sektor tradisional, masih berperan signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Fakta ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Secara esensial, aktivitas ekonomi merupakan transformasi faktor-faktor produksi menjadi output yang bernilai tambah, yang pada akhirnya akan menghasilkan aliran pendapatan bagi pemilik faktor produksi. Keberhasilan sektor pertanian dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jika perekonomian tumbuh, pendapatan masyarakat,

terutama petani, akan meningkat karena produksi dan produktivitas meningkat(Rodiainollah & Qomariyah, 2023).

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan manusia secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Peningkatan produksi barang dan jasa merupakan indikator pertumbuhan ekonomi modern. Upaya membantu negara-negara berkembang setelah perang dunia kedua belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kurangnya perhatian terhadap aspek sosial, politik, dan budaya dalam pembangunan(Siregar & Majid, 2023).

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara. Semakin tinggi produksi, maka umumnya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Salah satu cara mengukurnya adalah dengan melihat pendapatan nasional. Untuk mengetahui seberapa cepat ekonomi suatu negara berkembang, kita perlu membandingkan produksi barang dan jasa setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kita akan bahas lebih lanjut tentang konsep pembangunan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi adalah Upaya memahami pendapatan rata-rata masyarakat bisa terus meningkat dalam jangka waktu yang lama. Teori ini juga mengungkap bagaimana berbagai faktor ekonomi saling terkait dan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, teori ini memberikan penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana ekonomi bisa berkembang(Elina, 2023). Menurut Suryana(2000), beberapa ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi atau *economic development* dengan pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* dengan mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara ditemani oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural).

Usaha pembangunan yang sedang aktif dilakukan oleh negara-negara berkembang umumnya difokuskan pada upaya meningkatkan atau memperbaiki taraf hidup masyarakat, agar mereka dapat mencapai standar

kehidupan yang setara dengan masyarakat di negara-negara maju. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan per orang dan produksi barang dan jasa. Banyak faktor seperti sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan sistem ekonomi mempengaruhi tingkat produksi suatu negara (Simatupang, 2004).

Pembangunan ekonomi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu negara. Dalam konteks ekonomi, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari perbaikan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Faktor-faktor yang memengaruhi laju pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Sumber Daya Alam, merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, mineral, dan lahan subur, cenderung memiliki potensi besar untuk meningkatkan PDB. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan dapat menghambat pembangunan jangka panjang (Todaro & Smith, 2020); (2) Tenaga Kerja, Kualitas dan kuantitas tenaga kerja juga berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Negara dengan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi biasanya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja yang besar dan berkualitas memungkinkan negara untuk meningkatkan output produksi dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi (Smith, 2019); (3) Modal, Investasi modal, baik dalam bentuk fisik seperti infrastruktur maupun dalam bentuk finansial, merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Ketersediaan modal memungkinkan negara untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Modal yang memadai juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Mankiw, 2021); (4) Teknologi, Kemajuan teknologi berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Inovasi teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan membuka peluang pasar baru. Negara-negara yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tertinggal secara

teknologi (Acemoglu & Robinson, 2019); dan (5) Kelembagaan, mencakup sistem hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur perekonomian. Stabilitas politik, penegakan hukum, dan kebijakan yang mendukung investasi sangat mempengaruhi iklim usaha dan pembangunan ekonomi. Institusi yang kuat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (North, 1990).

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Upaya untuk meningkatkan pembangunan harus mencakup perbaikan di berbagai sektor, termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan kelembagaan. Kebijakan yang tepat dalam mengelola faktor-faktor ini akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial-budaya yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Faktor sosial-budaya mencakup berbagai elemen seperti nilai-nilai, norma, tradisi, dan praktik sosial yang ada dalam Masyarakat. Nilai dan norma sosial adalah bagian integral dari identitas budaya suatu masyarakat yang memengaruhi pola pikir dan perilaku individu maupun kelompok dalam berinteraksi dan membuat keputusan. Dalam konteks pembangunan, nilai dan norma sosial dapat menjadi pendorong atau penghambat pembangunan. Misalnya, nilai-nilai yang mendorong kerja keras, disiplin, dan inovasi dapat mempercepat proses pembangunan. Sebaliknya, norma yang mempertahankan status quo dan menghambat perubahan sosial dapat menjadi penghalang kemajuan.

Menurut Kartodirdjo (2005), norma dan nilai dalam masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan menerima inovasi lebih cenderung berkontribusi secara aktif dalam program pembangunan. Sebaliknya, masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai tradisional yang menolak perubahan akan sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan pembangunan modern. Sistem kepercayaan dan agama memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan, terutama dalam menentukan etos kerja, solidaritas sosial, dan perilaku ekonomi masyarakat. Agama sering kali menjadi pedoman moral yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks ekonomi dan pembangunan.

Dalam buku *“The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”* menunjukkan bahwa etika kerja Protestan yang menekankan kerja keras, kesederhanaan, dan penghematan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat Barat. Sebaliknya, di beberapa negara berkembang, pandangan religius tertentu yang mengutamakan kehidupan setelah mati daripada kesejahteraan duniawi dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif (Weber, 2022). Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mengubah pola sosial-budaya dan mendorong pembangunan. Melalui pendidikan, individu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Pendidikan juga berperan dalam mempromosikan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan partisipasi sosial, yang semuanya sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Menurut oleh Setyono (2019) pendidikan mampu mengubah pola pikir tradisional menjadi lebih rasional dan terbuka terhadap perubahan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok yang terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dalam perspektif sosial-budaya, peran gender sangat memengaruhi dinamika pembangunan. Di banyak masyarakat, norma-norma budaya yang membatasi peran perempuan dalam ranah publik menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan. Padahal, partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan sosial dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Kabeer (2015) bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ketika perempuan diberikan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Identitas budaya dan keberagaman etnis, bahasa, serta tradisi memiliki peran penting dalam pembangunan, terutama di negara-negara berkembang yang multikultural. Keberagaman budaya dapat menjadi sumber kekayaan sosial yang memperkaya inovasi dan kreativitas. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini juga dapat menimbulkan konflik sosial yang menghambat pembangunan.

Menurut Bhattacharyya (2018), pembangunan inklusif yang mempertimbangkan keanekaragaman budaya dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kohesi sosial. Program pembangunan yang mengakui dan menghormati identitas budaya masyarakat lokal cenderung lebih berhasil karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pola asuh, nilai-nilai keluarga, dan dukungan emosional yang diberikan dalam lingkungan keluarga dapat memengaruhi perkembangan individu dalam masyarakat. Keluarga yang mendukung pendidikan, etos kerja, dan keterampilan sosial dapat melahirkan generasi yang lebih siap berpartisipasi dalam pembangunan. Sejalan dengan pernyataan Adi (2020) menunjukkan bahwa pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga berpengaruh langsung terhadap pembentukan karakter dan sikap individu terhadap perubahan sosial. Keluarga yang mendukung pendidikan dan memiliki pola asuh demokratis cenderung menghasilkan individu yang lebih kritis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Dari berbagai perspektif yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial-budaya memainkan peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai, norma, sistem kepercayaan, pendidikan, gender, identitas budaya, dan dinamika keluarga adalah elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan aspek sosial-budaya cenderung lebih efektif karena lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan faktor sosial-budaya dalam pembangunan menjadi suatu keharusan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, lingkungan juga sangat penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Jika kita tidak menjaga lingkungan, pertumbuhan ekonomi kita bisa merusak alam. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan cara-cara yang ramah lingkungan, terutama di sektor industri dan pertanian. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, sistem pemerintahan yang baik, inovasi, dan perlindungan lingkungan juga sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar pembangunan ekonomi Indonesia semakin baik, pemerintah dan semua pihak yang terkait harus bekerja sama mengatasi

berbagai tantangan yang ada. Dengan memahami faktor-faktor penting seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan lingkungan, kita dapat merancang strategi pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia (Juliana et al., 2023).

Pengaruh faktor lingkungan terhadap eksplorasi sumber daya alam dan keterkaitannya dengan perubahan iklim di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin. Hasil penelitian sebelumnya, termasuk pentingnya Pembangunan keuangan, rente sumber daya alam, inovasi teknologi, investasi asing langsung, konsumsi energi, sumber daya manusia, dan perdagangan terhadap degradasi lingkungan (Ganda, 2022). Selain itu, hasil pencarian juga menyoroti perlunya mengurangi emisi dari penggunaan lahan di Indonesia dan mengidentifikasi sumber pendanaan untuk instrumen kebijakan yang sesuai dengan motivasi untuk memitigasi perubahan iklim global (Noordwijk et al., 2014). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan harus fokus pada transisi dari sumber energi tak terbarukan konvensional ke sumber energi terbarukan yang lebih hemat biaya dan dapat diandalkan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan lingkungan yang sehat (Akadiri et al., 2022). Selain itu, konservasi dan restorasi hutan bakau di Indonesia menjanjikan penyerapan karbon dalam jumlah yang signifikan (Arifanti et al., 2022). Akhirnya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Indonesia dapat membantu mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim (Basuki et al., 2022). Secara keseluruhan, masalah ini, namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya pengaruh faktor lingkungan terhadap eksplorasi sumber daya alam dan keterkaitannya dengan perubahan iklim di Indonesia.

Pengaruh faktor lingkungan terhadap eksplorasi sumber daya alam dan keterkaitannya dengan perubahan iklim di Indonesia merupakan isu penting yang menuntut penyelidikan yang mendalam. Makalah penelitian ini menyelidiki hubungan yang beragam antara kondisi lingkungan dan kegiatan eksplorasi sumber daya alam dalam konteks Indonesia, serta menganalisis implikasinya terhadap perubahan iklim. Dengan fokus khusus pada faktor lingkungan, penelitian ini berusaha untuk melihat peran mereka dalam membentuk keberlanjutan, kelayakan, dan dampak lingkungan dari praktik eksplorasi sumber daya. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai faktor lingkungan, termasuk kondisi geologi,

topografi, dan iklim, mempengaruhi upaya eksplorasi sumber daya alam di Indonesia. Faktor-faktor lingkungan ini sangat rumit dan memiliki banyak dampak pada kegiatan eksplorasi dan, akibatnya, dinamika perubahan iklim di wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur dan pemilihan lokasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek eksplorasi sumber daya dan meminimalkan dampak lingkungan di Indonesia. Interaksi yang kompleks antara faktor geologi, topografi, dan iklim mengharuskan pemilihan lokasi yang cermat dan pembangunan infrastruktur yang kuat. Sebagai contoh, daerah pegunungan di provinsi Papua telah menyebabkan Pembangunan infrastruktur yang kompleks, termasuk jalan dan terowongan, untuk akses ke daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (Pakasi, 1988; Sasaoka et al., 2017). Selain itu, distribusi sumber daya mineral, seperti batu bara dan bauksit, di berbagai wilayah di Indonesia berdampak pada biaya dan kelayakan transportasi. Kriteria pemilihan lokasi yang diusulkan untuk kawasan industri ramah lingkungan di Indonesia meliputi jarak, kondisi infrastruktur, faktor ekonomi, lingkungan, dan hukum (Uscha et al., 2021). Para pembuat kebijakan perlu mengadopsi kebijakan yang efektif dan kondusif untuk mengurangi dampak buruk dari faktor-faktor yang berdampak negatif terhadap keamanan mata pencaharian yang berkelanjutan (Singh & Issac, 2018).

Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia bukannya tanpa dampak lingkungan yang signifikan, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan tantangan terkait. Salah satu perhatian utama adalah pelepasan gas rumah kaca (GRK) selama ekstraksi, transportasi, dan pemanfaatan sumber daya. Pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam, menghasilkan emisi GRK, yang merupakan pendorong utama perubahan iklim (Nagara, 2017; Sadewo et al., 2022; Sadewo et al., 2022).

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia, sehingga menjadi kontributor besar terhadap emisi karbon global. Ekstraksi dan pembakaran batubara telah menyebabkan peningkatan emisi CO₂ yang signifikan, yang tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga pada dunia secara luas. Selain itu, perluasan perkebunan kelapa sawit, sebagian besar untuk produksi minyak kelapa sawit, telah mengakibatkan deforestasi dan peningkatan emisi gas rumah kaca (Maghfirani et al., 2022; Nurcahyaningih et al., 2022; Rizki & Setiawina, 2022).

Selain emisi GRK, eksplorasi sumber daya alam di Indonesia juga memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konversi hutan dan lahan gambut menjadi lahan pertanian dan industri telah menjadi pendorong deforestasi yang signifikan, melepaskan karbon yang tersimpan dalam ekosistem ini ke atmosfer (Qurbani & Rafiqi, 2022; Rahmawati et al., 2020; Rukmana et al., 2023). Selain itu, degradasi lahan yang disebabkan oleh ekstraksi sumber daya dapat berdampak pada ekosistem lokal, kualitas air, dan kesehatan tanah. Dampak-dampak ini selanjutnya berkontribusi pada perubahan iklim dengan mengubah siklus karbon dan air di wilayah yang terkena dampak (Arief et al., 2022; Herniti, 2021; Ismawati, 2021).

Meskipun berbagai kebijakan dan peraturan telah diterapkan untuk memitigasi dampak lingkungan dan iklim dari eksplorasi sumber daya alam di Indonesia, tantangan terkait penegakan hukum, kepatuhan, dan pemantauan masih tetap ada. Penebangan liar dan perubahan tata guna lahan masih menjadi isu utama, yang menekankan perlunya kerangka kerja peraturan yang lebih komprehensif dan ketat (Uribe-Jaramillo, 2016). Efektivitas kebijakan dan peraturan ini masih menjadi bahan perdebatan (Majid et al., 2021). Petani kecil, yang mengelola lebih dari 40% area kelapa sawit di Indonesia, diharapkan untuk mematuhi peraturan wajib kelapa sawit berkelanjutan (ISPO), tetapi secara rata-rata, petani kecil dianggap memiliki kepatuhan yang buruk terhadap indikator-indikator ISPO (Aisyah & Mulyo, 2021). Implementasi kebijakan Moratorium Hutan di tingkat provinsi terhambat oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi (Yudhanegara, 2021). Model sistem dinamik menunjukkan bahwa kebijakan moratorium secara nyata mengurangi emisi karbon dioksida dari deforestasi, tetapi pengurangan tersebut hanya bersifat sementara, dan tren emisi pada skenario kebijakan moratorium pada akhirnya akan Kembali ke tingkat *business as usual*. Pemerintah, perusahaan, pekebun, asosiasi kelapa sawit, dan INGO/LSM berupaya membangun sinergi dalam mencari solusi strategis dibawah skema sertifikasi ISPO (Dewi, 2021).

Meskipun literatur yang ada memberikan wawasan yang berharga mengenai pengaruh faktor lingkungan terhadap eksplorasi sumber daya alam dan perubahan iklim di Indonesia, terdapat beberapa kesenjangan penelitian dan area untuk eksplorasi, diantaranya:

1. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami variasi regional dalam factor lingkungan dan dampaknya terhadap eksplorasi sumber daya. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki tantangan geologi, topografi, dan iklim yang unik yang memerlukan perhatian khusus.
2. Studi yang meneliti dimensi sosial ekonomi dan politik dari eksplorasi sumber daya dan perubahan iklim di Indonesia masih relatif langka. Penyelidikan tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan kondisi lingkungan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.
3. Efektivitas kebijakan dan peraturan dalam memitigasi dampak lingkungan perlu dikaji secara menyeluruh. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan dan kepatuhan dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan.
4. Dengan munculnya bidang perdagangan karbon dan pendanaan lingkungan, mengeksplorasi potensi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alamnya untuk pembangunan berkelanjutan merupakan jalan yang menarik untuk penelitian lebih lanjut.

Faktor geologi, topografi, dan iklim ternyata memainkan peran penting dalam mempengaruhi kelayakan, biaya, dan keberlanjutan lingkungan dari proyek-proyek eksplorasi sumber daya alam. Pemahaman ini sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan eksplorasi yang menghormati kondisi lingkungan dan meminimalkan dampak yang merugikan. Meskipun Indonesia telah memperkenalkan kebijakan dan inisiatif yang patut dipuji, seperti Moratorium Hutan, *Low Carbon Development Initiative* (LCDI), dan skema sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh masalah penegakan hukum dan kepatuhan. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan mencapai eksplorasi sumber daya yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Faktor-faktor seperti investasi, inovasi teknologi, infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang stabil sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, akses ke sumber daya, dan pengelolaan utang perlu ditangani untuk mencapai pembangunan yang inklusif.

Sosial-budaya menyoroti pentingnya pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kesetaraan gender dan hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tantangan dalam pembangunan sosial termasuk mengatasi diskriminasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan. Lingkungan menekankan pada pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang mendukung konservasi, efisiensi energi, dan pengurangan polusi. Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, di mana eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dapat merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Secara keseluruhan, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan dan menyeimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

BAB 6 STRUKTUR EKONOMI

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pengembangan sektor-sektor produktif (Hasanah, 2021). Selain bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien, Indonesia kini telah beralih dari sistem pembangunan ekonomi terpusat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Indonesia telah mengadopsi sistem desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan (Guspenseldi, 2017). Pendekatan ini mengadopsi prinsip desentralisasi, yang memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya, khususnya dalam sektor ekonomi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui peningkatan PDB, masih menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti distribusi pendapatan dan perubahan struktur ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan. Jika semua daerah mendapatkan bagian yang sama dari hasil pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih stabil dan berkelanjutan. Menurut (Zasriati, 2022), Data PDRB dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB dengan harga berlaku mencerminkan nilai tambah yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB dengan harga konstan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu sebagai pembanding. Penggunaan PDRB dengan harga konstan sangat penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil. Penyusunan PDRB merupakan upaya untuk menyediakan data yang akurat mengenai perkembangan ekonomi suatu daerah. Informasi ini sangat berguna bagi pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat.

Selain pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan, masih ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Faktanya, pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang sesuai justru dapat menyebabkan ketimpangan (Rosi, 2024). Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan signifikan, sementara yang lain tumbuh lambat. Ketimpangan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kecenderungan investor memilih daerah perkotaan dengan fasilitas lengkap seperti transportasi, listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja terampil. Selain itu, ketimpangan juga disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata dari Pemerintah Pusat atau provinsi ke daerah. Kesenjangan dalam akses modal menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengusaha besar cenderung lebih diuntungkan dalam memperoleh sumber pendanaan dibandingkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Kenaikan ketidakpastian dalam perekonomian global dapat berdampak negatif pada prospek pertumbuhan ekonomi domestik. Adapun Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Faktor Produksi adalah efisiensi penggunaan tenaga kerja dan bahan baku dalam negeri menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan.
2. Iklim Investasi adalah kebijakan investasi yang kondusif dan berorientasi pasar sangat diperlukan untuk menarik investasi asing dan domestik.
3. Neraca Pembayaran adalah surplus neraca pembayaran akan memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar rupiah.
4. Kebijakan Moneter adalah kebijakan moneter yang akomodatif dan antisipatif terhadap perkembangan ekonomi global sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
5. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan akan mendukung pembiayaan pembangunan dan mengurangi risiko utang.

Teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang bertransformasi dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi yang lebih beragam, dengan sektor industri dan jasa sebagai penggerak utama. Mengadopsi istilah Kuznets, Chenery mendefinisikan transformasi struktural

sebagai serangkaian perubahan saling terkait dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri, dan penawaran agregat. Perubahan-perubahan ini merupakan bagian integral dari proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Louhenapessy, 2014).

Ada dua pendekatan utama dalam menganalisis transformasi ekonomi: teori dualisme ekonomi Lewis dan teori transformasi struktural Chenery. Teori Lewis mengasumsikan adanya dualitas antara sektor tradisional (pertanian) dan modern (industri), dengan migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, teori Chenery memberikan kerangka analisis yang lebih luas, mencakup perubahan dalam struktur produksi, konsumsi, dan perdagangan. Adanya perekonomian yang masih bergantung pada sektor pertanian dan pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan surplus tenaga kerja. Kondisi ini ditandai oleh produktivitas marginal tenaga kerja yang mendekati nol dan upah riil yang rendah.

Teori pola pembangunan yang dikemukakan oleh Chenery memiliki keselarasan dengan model dualisme ekonomi Lewis. Keduanya sepakat bahwa proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang melibatkan peralihan dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern (industri). Chenery dan Syrquin lebih lanjut menekankan bahwa transformasi struktural ini merupakan proses yang dinamis dan kompleks, melibatkan perubahan dalam berbagai aspek ekonomi, seperti struktur produksi, konsumsi, dan investasi. Menurut Suwarni(2006) seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita, masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi yang signifikan. Mereka mulai mengalihkan sebagian besar pengeluarannya dari kebutuhan pokok seperti makanan menuju barang-barang manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Meskipun teori Lewis dan Chenery memberikan kontribusi signifikan dalam memahami transformasi struktural, analisis struktur ekonomi tidak terbatas pada kedua teori tersebut. Dumairy menyoroti bahwa struktur ekonomi dapat diamati dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi (Hasang & Nur, 2020), setidaknya mencakup empat dimensi utama, antara lain:

1. Tinjauan Makro-sektoral;
2. Tinjauan Keuangan;
3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan; dan
4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

Sebagai bagian integral dari sistem sosial yang kompleks, sistem ekonomi suatu negara tidak berdiri sendiri melainkan saling terhubung dengan berbagai sistem sosial lainnya, terutama sistem politik. Fenomena ini merupakan suatu kecenderungan global yang menunjukkan adanya interdependensi antara kedua sistem tersebut. Terdapat korelasi yang kuat antara ideologi politik dan sistem ekonomi suatu negara. Negara dengan ideologi liberal umumnya mengadopsi sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Di sisi lain, negara dengan ideologi komunis cenderung mengadopsi sistem ekonomi sosialis yang memberikan peran sentral kepada negara dalam perencanaan dan pengendalian ekonomi. Meskipun demikian, dalam realitasnya, tidak ada negara yang secara murni menganut salah satu sistem ekonomi tersebut. Bahkan negara-negara yang dianggap sebagai representasi dari masing-masing sistem, seperti Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia, dan Indonesia telah melakukan berbagai modifikasi dan adaptasi terhadap sistem ekonomi mereka. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang lebih tepatnya kini dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan (Pancasila). Sistem ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dari kedua sistem ekonomi lainnya, yaitu kapitalisme dan sosialisme (Bank Indonesia, 2018).

A. IMPLIKASI STRUKTUR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KUALITAS HIDUP, DAN KESENJANGAN SOSIAL

Struktur ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan kesenjangan sosial. Struktur ekonomi yang ideal adalah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, di banyak negara berkembang, struktur ekonomi yang belum matang sering kali justru menyebabkan ketimpangan dan stagnasi dalam berbagai sektor (Todaro & Smith, 2020).

Pertumbuhan Ekonomi Struktur ekonomi yang dominan dalam sektor primer, seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam, biasanya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan ekonomi yang berbasis pada sektor manufaktur dan jasa (Arsyad, 2019). Hal

ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan nilai tambah dalam sektor primer, serta ketergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas global yang fluktuatif. Negara-negara dengan struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada industri dan teknologi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi (Mankiw, 2019). Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa diiringi dengan pemerataan pendapatan sering kali memperburuk kesenjangan sosial dan tidak selalu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier merupakan langkah yang esensial. Negara-negara yang berhasil menggeser struktur ekonominya menuju sektor industri dan jasa biasanya menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan dan Taiwan telah menunjukkan bagaimana transformasi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Rodrik, 2018). Namun, di sisi lain, negara-negara yang tetap bergantung pada sektor primer sering kali terjebak dalam *jebakan pendapatan menengah* yang menghambat pertumbuhan lebih lanjut.

Kualitas Hidup Struktur ekonomi yang berkembang ke arah industrialisasi dan modernisasi sektor jasa juga berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Perubahan ini sering kali disertai dengan peningkatan upah, perbaikan kondisi kerja, dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Indikator kualitas hidup seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering kali meningkat seiring dengan modernisasi ekonomi. Namun, tidak semua pertumbuhan ekonomi otomatis meningkatkan kualitas hidup, terutama jika pertumbuhan tersebut bersifat eksklusif dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

Selain itu, pengaruh struktur ekonomi terhadap kualitas hidup juga dapat dilihat dari distribusi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di negara-negara dengan struktur ekonomi yang tidak seimbang, kesenjangan akses ini sering kali sangat lebar. Wilayah yang lebih maju secara ekonomi biasanya memiliki akses lebih baik terhadap layanan publik, sementara daerah yang tertinggal sering kali mengalami keterbatasan akses (Sen, 2000). Akibatnya, meskipun suatu negara mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, manfaatnya tidak selalu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan.

Kesenjangan Sosial Struktur ekonomi juga berperan besar dalam mempengaruhi tingkat kesenjangan sosial di suatu negara. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan sering kali lebih tinggi di negara-negara dengan struktur ekonomi yang tidak merata, di mana sebagian besar kekayaan dan peluang ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau wilayah tertentu. Struktur ekonomi yang dominan di sektor ekstraktif atau sektor primer lainnya sering kali menciptakan distribusi pendapatan yang tidak merata karena keuntungan ekonomi terpusat pada segelintir pelaku pasar dan perusahaan besar (Piketty, 2014).

Kesenjangan sosial tidak hanya terkait dengan pendapatan, tetapi juga dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Struktur ekonomi yang tidak inklusif sering kali menyebabkan kelompok tertentu, seperti perempuan, pekerja informal, dan masyarakat pedesaan, sulit mengakses sumber daya ekonomi dan sosial (Stiglitz, 2019). Hal ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang sering kali lebih berpihak pada sektor formal dan investasi besar, sementara sektor informal yang menjadi tulang punggung sebagian besar populasi justru kurang mendapatkan dukungan.

Sebagai contoh, banyak negara berkembang yang mengalami urbanisasi cepat tanpa diiringi dengan perencanaan yang matang, sehingga memperburuk kesenjangan antara kota dan desa. Perbedaan akses terhadap infrastruktur, pekerjaan, dan layanan dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Struktur ekonomi yang terlalu berfokus pada pertumbuhan kota juga sering kali mengabaikan pengembangan wilayah pedesaan, menyebabkan migrasi besar-besaran yang dapat menciptakan masalah sosial baru, seperti kemiskinan perkotaan dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar (Fujita & Thisse, 2013).

Untuk mengurangi kesenjangan sosial, penting bagi pemerintah untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mendukung sektor-sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti industri manufaktur skala kecil dan menengah serta sektor jasa. Selain itu, diperlukan kebijakan redistribusi yang adil, seperti pajak progresif dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan mobilitas sosial (Atkinson, 2015).

Secara keseluruhan, struktur ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan kesenjangan

sosial suatu negara. Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor yang lebih produktif seperti industri dan jasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas hidup. Namun, tanpa perhatian terhadap pemerataan dan inklusivitas, perubahan ini juga berpotensi memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif, pemerataan kesempatan, dan akses yang adil terhadap sumber daya menjadi sangat penting dalam menciptakan struktur ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. KEBIJAKAN STRUKTUR EKONOMI

Kebijakan struktur ekonomi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah atau mengarahkan struktur perekonomian suatu negara agar lebih efisien, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini mencakup berbagai intervensi yang bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki keseimbangan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa (Rahman, 2022). Melalui kebijakan struktur ekonomi, pemerintah berupaya menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari kebijakan struktur ekonomi adalah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional, memperbaiki distribusi pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Salah satu tujuan penting dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi global, seperti sektor komoditas, dan mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, memperkuat kelembagaan ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi (Pratama & Dewi, 2021; Susanto et al., 2023). Instrumen kebijakan struktur ekonomi meliputi berbagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen utama dalam kebijakan ini antara lain kebijakan fiskal, kebijakan moneter, regulasi sektor riil, dan reformasi kelembagaan. Kebijakan fiskal mencakup alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur, subsidi untuk sektor prioritas, dan insentif pajak bagi investasi di sektor-sektor

strategis (Sari & Yuliana, 2020). Kebijakan moneter dapat mencakup pengendalian suku bunga dan likuiditas untuk mendorong investasi di sektor-sektor produktif.

Selain itu, regulasi sektor riil, seperti peraturan terkait ketenagakerjaan, tata ruang, dan lingkungan, juga menjadi bagian penting dari instrumen kebijakan struktur ekonomi. Reformasi kelembagaan, termasuk pembenahan birokrasi dan penegakan hukum, turut berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kombinasi dari instrumen-instrumen ini diharapkan mampu mendorong transformasi struktural yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Lestari & Nugroho, 2019). Sebagai contoh, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan struktur ekonomi untuk mempercepat transformasi ekonominya. Salah satu studi kasus yang menarik adalah penerapan kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan dan perkebunan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk primer Indonesia dengan mengolah bahan baku di dalam negeri sebelum diekspor. Penerapan kebijakan hilirisasi telah berhasil meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan menciptakan lapangan kerja baru.

Studi kasus lainnya adalah reformasi birokrasi dan deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Melalui paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak 2015, pemerintah telah menyederhanakan berbagai peraturan yang dinilai menghambat investasi, seperti perizinan usaha dan kepabeanaan. Langkah ini berhasil meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di tingkat global dan menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor strategis. Selain itu, penerapan kebijakan subsidi bahan bakar yang lebih terarah dan pengalihan anggaran subsidi ke sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, juga menjadi contoh kebijakan struktur ekonomi yang berdampak positif. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi beban fiskal negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik (Hidayat & Kurniawan, 2023).

Kebijakan struktur ekonomi merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Melalui berbagai instrumen kebijakan seperti fiskal, moneter, dan regulasi sektor riil, pemerintah dapat mengatasi berbagai tantangan

struktural yang dihadapi perekonomian. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mampu meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga memperbaiki distribusi pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan penegakan regulasi yang mendukung transformasi struktural.

Ketika terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi, baik itu pertumbuhan atau penurunan, sektor-sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa pemerintahan akan mengalami dampak yang paling signifikan. Studi menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia. Selain itu, analisis interkoneksi antar sektor menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan konstruksi memiliki keterkaitan yang paling erat dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama di wilayah Jawa. Selain itu, sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi, pergudangan, jasa keuangan, dan asuransi memiliki peran sentral dalam membentuk jaringan interkoneksi antar sektor ekonomi. Sektor-sektor ini tidak hanya berperan sebagai penerima dampak dari perubahan pada sektor lain, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memodifikasi aktivitas ekonomi pada sektor lainnya. Temuan penelitian ini juga mendukung hipotesis bahwa kedekatan geografis antara sektor-sektor dalam satu provinsi berkontribusi pada peningkatan frekuensi interaksi dan saling ketergantungan. Memahami interkoneksi antar sektor di setiap provinsi sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan pemahaman yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan dampak jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap keseluruhan sistem ekonomi. Sebagai contoh, sektor industri manufaktur di Pulau Jawa, yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini (Pasaribu, 2023).

Bentuk dan susunan perekonomian suatu negara tidak hanya memengaruhi dinamika domestik, tetapi juga berimplikasi terhadap kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan. Kebijakan perdagangan, seperti penurunan hambatan tarif, partisipasi dalam perjanjian perdagangan regional, dan peningkatan arus investasi asing langsung, telah terbukti efektif dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Akan tetapi, perlu diingat bahwa implementasi kebijakan perdagangan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial, diperlukan keseimbangan antara kebijakan liberalisasi yang mendorong persaingan global dan kebijakan proteksi yang melindungi industri domestik. Partisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas dan peningkatan investasi asing langsung memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, implementasi kebijakan perdagangan harus disertai dengan mekanisme pengelolaan yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti hilangnya lapangan kerja atau degradasi lingkungan. Kesadaran akan tantangan implementasi kebijakan perdagangan, seperti resistensi domestik dan ketidakpastian politik, merupakan prasyarat penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan efektif. Selain itu, pertimbangan terhadap aspek keberlanjutan dan lingkungan harus menjadi bagian integral dari perumusan kebijakan perdagangan. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, negara berkembang dapat memaksimalkan manfaat dari liberalisasi perdagangan sambil meminimalisir risiko dan dampak negatif, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Prahaski & Ibrahim, 2023)

BAB 7 HAMBATAN

PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi cita-cita para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga pemerintahan saat ini. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yakni, keberlanjutan secara ekologis, ekonomi dan sosial. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan akan dapat tercapai. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak selaras maka keambrokan jalannya pembangunan tidak dapat dielakkan.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, bangsa Indonesia menghadapi berbagai proses yang kompleks dan dinamis. Dalam upaya untuk mencapainya, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang sering kali muncul dari berbagai aspek-aspek yang menjadi syarat pembangunan berkelanjutan tersebut, seperti ekonomi, sosial, lingkungan. Dalam kondisi tersebut, aspek politik juga akan sangat mempengaruhi proses pembangunan. Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Bab ini akan membahas berbagai jenis hambatan yang dihadapi dalam pembangunan, faktor penyebabnya disertai strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

B. JENIS-JENIS HAMBATAN PEMBANGUNAN

Seperti dikatakan sebelumnya, pembangunan yang telah berjalan di Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi di masa depan. Sedangkan pembangunan

berkelanjutan menurut Martopo & Mitchell Sumarwoto dalam Sugandhy dan Hakim, 2007, h. 22) merupakan “perubahan yang menuju kearah positif atau lebih baik didalam aspek sosial, ekonomi yang pelaksanaannya tidak mengabaikan aspek ekologi atau lingkungan”. Namun pada kenyataannya, proses pembangunan tersebut sering terhambat oleh aspek-aspek tersebut, yakni, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik, yang akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

1. Hambatan Ekonomi

Aspek ekonomi memberikan memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya, infrastruktur, dan sistem keuangan seringkali menjadi hambatan dalam proses pembangunan berkelanjutan sebuah negara. Negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam sering kali mengalami konflik kekerasan (Marzuki, 1996). Sedangkan menurut Homer-Dixon (1994), keterbatasan sumber daya juga muncul akibat rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya, tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk, serta kurangnya akses terhadap sumber-sumber daya yang dapat di perbaharui. Situasi ini dapat menimbulkan migrasi dan bahkan terjadi pengusiran oleh penduduk setempat yang berujung kepada perang antar suku.

Masih menurut sumber yang sama (Homer-Dixon, 1994), kasus-kasus konflik di Indonesia telah terjadi beberapa tahun silam. Seperti kasus Timika di Irian Jaya akibat dari perang antar suku. Kasus Kedung Ombo yang terjadi akibat penolakan penggusuran tanah yang akan dijadikan waduk Kedung Ombo. Kasus Puiiau Panggang di Jakarta berawal dari sengketa tanah antar warga. Kasus Pulau Yamdena di Maluku juga merupakan konflik perebutan sumber daya alam. Kasus Bentian di Kalimantan Timur akibat adanya konflik perebutan lahan adat. Kasus banjir besar di Jakarta akibat meluapnya Sungai Ciliwung, kasus banjir di daerah Yogyakarta Selatan, dan kasus kurangnya air sumur di daerah Yogyakarta akibat pesatnya pembangunan hotel-hotel dan *guest house* di daerah Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh kesulitan dalam memproduksi barang dan jasa sehingga menyebabkan daya beli menurun (Ishak, 2018). Penurunan daya beli merupakan akibat dari meningkatnya pengangguran. Penurunan produk barang dan jasa terjadi manakala

perusahaan menutup operasionalnya karena kurang tenaga kerja atau bahan baku. Perusahaan yang bangkrut mengakibatkan kurangnya produksi barang dan jasa seperti pada kasus perusahaan manufaktur *Tupperware*, Kodak, dan seterusnya.

Selain itu, infrastruktur yang buruk, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi sehingga menghambat tujuan awal pembangunan (Aryani, 2024). Pada tahun 2022, Bank Dunia melaporkan bahwa investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas suatu negara (<https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022>). Oleh karena itu, penting bagi pihak pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan pelaku proyek infrastruktur dan perencanaan penataan ruang lainnya.

2. Hambatan Sosial

Aspek sosial juga memainkan peran penting dalam pembangunan. Dampak positif yang muncul dari modal sosial yang tinggi diantaranya 1) pemerintah dapat memiliki akuntabilitas yang lebih kuat; 2) akan mendorong efektifitas pemerintahan; dan 3) munculnya beragam determinan sehingga negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi (Haridison, 2021). Namun demikian, aspek sosial juga dapat melahirkan hambatan dalam proses pembangunan. Hambatan sosial ini dapat muncul dari ketidakadilan, kesenjangan pendapatan, dan diskriminasi dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi (Maulana, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan aspek keadilan sosial ketika merumuskan kebijakan dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan sosial yang merupakan ketimpangan mencolok dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang berlangsung di antara kelompok masyarakat (Fabela & Khairunnisa, 2024). Selanjutnya, Bourdieu (1984) menyatakan bahwa kesenjangan sosial tercermin dari distribusi modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial yang tidak merata (Fabela & Khairunnisa, 2024). masih dalam sumber yang sama, sebaliknya, teori fungsionalis dari Talcott Parsons (1951) mengemukakan bahwa “kesenjangan sosial diperlukan untuk mempertahankan

keseimbangan dan stabilitas masyarakat terhadap teori ini menunjukkan bahwa sistem stratifikasi sering kali menghasilkan ketidakadilan yang merugikan kelompok tertentu” (Fabela & Khairunnisa, 2024).

Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di beberapa negara dan telah berlangsung sejak zaman lampau. Hasil pengamatan (Fabela & Khairunnisa, 2024) menunjukkan bahwa kesenjangan sosial juga terjadi di Indonesia yang dapat diamati melalui “distribusi pendapatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan”. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan tingkat ketimpangan signifikan yang dibuktikan oleh indeks Gini Indonesia (0,385) pada tahun 2020 (Fabela & Khairunnisa, 2024). Ketimpangan tersebut memacu meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, “dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan rata-rata tertinggi ke-15” (Hayati & Purba, 2023). Untuk mengurangi kesenjangan sosial ini, maka peran pemerintah sangat penting dalam mengoptimalkan proses interaksi antar individu, antara individu dan kelompok masyarakat serta antar kelompok masyarakat.

Kasus tersebut diatas selaras dengan Piketty (2014) yang berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang termarginalkan sering kali tidak mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan lainnya. Hal ini akan berdampak negatif pada produktivitas dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dampak negatifnya, terutama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Hambatan Politik

Reformasi politik tahun 1998 merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan di Indonesia. Lahirnya reformasi 1998 atas dasar sistem birokrasi yang korup, adanya kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru di Indonesia. Saat itu, para aktifis merasakan bahwa pembangunan Indonesia yang bersih dari tiga isu tersebut terhambat oleh kepemimpinan Orde Baru yang terlalu lama. Namun sepertinya isu-isu tersebut semakin marak di era reformasi ini. Artinya, perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia terhambat nuansa politik yang mempengaruhi

penyelenggaraan pemerintahan yang semakin marak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (Yusriadi, 2018).

Stabilitas politik sangat penting bagi keberhasilan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Tentu saja, ketidakstabilan politik, korupsi, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pembangunan manusia. Menurut Acemoglu dan Robinson (2015), “negara-negara dengan institusi politik yang kuat dan stabil cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik”. Oleh karena itu, reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.

Terkait dengan pembangunan manusia, peran politik juga akan menentukan tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia. Hambatan politik yang tentu saja menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mengakibatkan mundurnya indeks pembangunan manusia. Dikutip dari (Linawati et al., 2021), stabilitas politik sangat berpengaruh secara signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dari aspek ekonomi. Oleh karena itu, semua hambatan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan yang ada.

Disisi lain, hambatan politik juga terjadi dalam sistem demokratis terutama kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik masih belum maksimal sehingga menghambat proses pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Ada beberapa faktor yang menghambat perempuan mendapatkan kesempatan dalam pemilihan calon legislatif, diantaranya: 1) adanya budaya patriarki; 2) partai politik itu sendiri; 3) media; 4) tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan (Nimrah & Sakaria, 2015). Khususnya dalam pemilihan calon legislatif, masyarakat semakin menganggap bahwa politik adalah “dunianya laki-laki dan perempuan harusnya berada dalam wilayah domestik sehingga perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki” (Nimrah & Sakaria, 2015). Faktor-faktor tersebut membuat harapan perempuan untuk ikut dalam dunia politik semakin jauh.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HAMBATAN PEMBANGUNAN

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial secara berencana yang meliputi berbagai aspek baik mental dan fisik, serta meliputi berbagai dimensi. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kemajuan bangsa, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, serta membangun masyarakat modern dan berwawasan lingkungan. Tujuan pembangunan untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat akan terhambat karena beberapa faktor, diantaranya, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta kebijakan dan regulasi.

1. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni merupakan faktor kunci dalam pembangunan. Kualitas sumber daya manusia dibentuk melalui pendidikan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang bermartabat. Pendidikan yang rendah dan keterampilan yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern. Selain itu, pendidikan yang tidak memadai akan mengarah kepada sumber daya manusia yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) tidak memiliki kesadaran berkefektifitas; 2) tidak mampu berinovasi; 3) tidak memiliki kemampuan berfikir kritis; 4) tidak memiliki kemampuan *problem solving*; 5) tidak mampu berkomunikasi dan berkolaborasi (Hasan et al., 2023).

Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini dapat meliputi kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam sistem pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat yang menyebabkan rendahnya kualitas murid (Fajri & Afriansyah, 2019)). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh krisis akhlak dan kurangnya nilai-nilai budi pekerti luhur. Untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas seringkali terabaikan pendidikan karakter terabaikan. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pembentukan karakter yang berkualitas untuk mendukung proses pembangunan. Oleh karena itu, pencegahan

terhadap penurunan dekadensi moral yang lebih parah dapat diupayakan melalui Pendidikan Karakter bangsa (Suwartini, 2017).

Mengingat rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab penghambat pembangunan, maka strategi yang tepat guna perlu diterapkan terkait kualitas pendidikan. Salah satu strategi untuk mengatasi hambatan pembangunan tersebut dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Program pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keterampilan dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan produktif. Selain itu, pendidikan karakter tidak boleh diabaikan untuk mencegah krisis moral bangsa Indonesia. Investasi dalam pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di pasar global.

2. Infrastruktur

Infrastruktur yang buruk dapat menghambat pembangunan, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai ini dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi. Contoh kasus kondisi infrastruktur yang buruk pernah dialami Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data empiris, infrastruktur di Jawa Barat saat itu menunjukkan kondisi yang buruk/ tidak memadai (Maqin, 2014). Kondisi infrastruktur yang kurang memadai tersebut akan mengakibatkan berkurangnya daya tarik investor dan wisatawan yang akan terlibat dalam pembangunan suatu wilayah. Pada akhirnya, aktivitas perekonomian masyarakat akan terganggu dan pembangunan berkelanjutan tidak berjalan sesuai tujuan.

Negara-negara yang berinvestasi dalam infrastruktur cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Indonesia sendiri masuk kategori negara yang lemah dalam investasi infrastruktur. Fakta ini selaras dengan hasil penelitian *World Competitiveness Report*, pada tahun 2008 yang melaporkan bahwa peringkat daya saing infrastruktur Indonesia terus mengalami penurunan dibandingkan negara lain. Padahal, menurut *World Economic Forum* pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada di atas negara Cina, Thailand, Taiwan, dan Srilanka. Kemunduran ini akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti halnya penelitian Lopez (2003) yang menemukan bahwa di negara-negara Amerika Latin kemunduran

investasi infrastruktur publik akan menimbulkan perekonomian yang *stagnan*, ketimpangan sosial serta kerusakan lingkungan (Maqin, 2014)

Sementara itu, laporan Bank Dunia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan energi dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi (<https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022>). Di beberapa wilayah termasuk kabupaten/ kota di Indonesia telah dilakukan upaya pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi untuk aksesibilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti di Palembang, pembangunan infrastruktur memberi dampak signifikan dalam aksesibilitas dan konektivitas sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Anisa et al., 2024). Selain itu, di masa pemerintahan saat ini telah dibangun secara masif sumber-sumber tenaga Listrik untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan infrastruktur yang meliputi sarana transportasi dan energi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas sangat penting. Investasi dalam infrastruktur merupakan solusi yang tepat dan harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Membangun dan memelihara infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Menurut Susilowati et al. (2022), pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi asing.

3. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau regulasi yang rumit dapat menciptakan hambatan bagi investasi. Kualitas regulasi yang tidak efektif akan menimbulkan iklim investasi yang tidak menarik bagi investor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kepercayaan investor tidak akan pernah meningkat. Jika demikian, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk meningkatkan iklim investasi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Musmulyadi dkk., 2023). Oleh karena itu, reformasi regulasi untuk menyederhanakan dan meningkatkan kepastian hukum yang sejalan dengan praktik internasional tentu saja sangat sangat diperlukan.

Kualitas reformasi kebijakan yang rendah tidak akan mampu menciptakan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan. Terlebih, regulasi yang tidak jelas dan kurang transparan tidak mudah dipahami sehingga menimbulkan iklim investasi yang tidak kondusif. Dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam bidang ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam mengelola dan mengatur perizinan untuk investasi asing di Indonesia menjadi sangat penting. Adanya perbaikan regulasi, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif, akan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Prawira et al., 2024). Secara keseluruhan, hukum berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Rodrik (2015), kebijakan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Seperti kebijakan Zona Ekonomi Khusus (SEZ) yang telah banyak digunakan di seluruh dunia sebagai alat strategis untuk pembangunan ekonomi, menarik investasi asing langsung, menciptakan peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional (Javaid et al., 2023). Ada pula kebijakan mengenai Kawasan Ekonomi Segitiga Reba, yang meliputi Kabupaten Subang, Majalengka, dan Cirebon. Kebijakan kawasan tersebut merupakan proyek strategis nasional yang penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Jawa Barat (Mubarak, 2023). Terlepas dari dampak positif kebijakan tersebut, penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu diperhatikan agar terjaga keseimbangan ekosistem dan tercipta kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, reformasi kebijakan yang solutif sangat krusial untuk menghindari terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Reformasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

D. KESIMPULAN

Hambatan pembangunan merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk diatasi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis hambatan seperti masalah ekonomi, social, dan infrastruktur, negara-negara dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah mengidentifikasi hambatan-hambatannya, negara perlu segera memahami faktor-faktor penyebabnya agar segera dapat merumuskan strategi-strategi yang harus diterapkan. Strategi-strategi tersebut harus tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB 8 PRASYARAT

PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional sebagai upaya sadar pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara terencana, terukur, dan akuntabel. Pemerataan tingkat pendapatan penduduk menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sedangkan keberhasilan pembangunan disebabkan oleh perumusan kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tujuan sosial, dan demokrasi politik. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat memerlukan berbagai prasyarat yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang saling terkait. Dalam konteks negara berkembang, memahami prasyarat pembangunan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Bab ini akan membahas berbagai prasyarat yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. PRASYARAT EKONOMI

Ekonomi merupakan prasyarat utama dalam pembangunan sebuah negara yang bertujuan agar proses Pembangunan semakin kokoh. Pembangunan ekonomi dipandang penting agar mencapai tingkat pertumbuhan optimal selalu berkembang dan tumbuh agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan akan semakin kokoh jika ditunjang oleh stabilitas makroekonomi, infrastruktur yang memadai, dan akses terhadap modal.

1. Stabilitas Makroekonomi

Stabilitas makroekonomi merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Beberapa indikator makroekonomi adalah pendapatan nasional meliputi produk domestik bruto dan produk nasional bruto, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, dan kestabilan nilai mata uang domestik atau kurs Inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil, dan defisit anggaran yang terkendali menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi (Sukirno, 2004). Oleh karena itu, bisnis perbankan tidak akan lepas dari pengaruh makroekonomi ini.

Menurut Bank Dunia tahun 2022, stabilitas makroekonomi membantu meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini meliputi bagaimana mengelola hutang negara agar stabilitas makroekonomi semakin kondusif (Isna dkk., 2024). Tidak hanya itu, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, penurunan pengangguran, dan inflasi yang rendah atau stabilitas harga dapat mewujudkan stabilitas ekonomi makro (Hakiki dkk., 2024). Dengan demikian, tujuan negara akan tercapai karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan stabil.

Kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas ini. Kebijakan ini mencakup pengelolaan mata uang dan nilai tukar secara komprehensif. Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sangat signifikan karena kebijakan fiskal membantu dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga melalui pengaturan belanja dan penerimaan negara (Sari dkk., 2024). Masih menurut sumber yang sama, distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus penting dari kebijakan fiskal sebagai instrument utama dalam pengelolaan perekonomian suatu negara (Ibid).

Stabilitas ekonomi negara bukan hanya disebabkan adanya peran bank konvensional, namun bank syariah juga sangat besar perannya dalam membangun stabilitas makroekonomi nasional (Ningrum et al., 2024). Seperti ketentuan tentang zakat, ghanimah, fa'i, dan jizyah, menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi, dan larangan transaksi riba,

merupakan kebijakan fiskal .(Ramadhan dkk., 2023). Masalah inflasi di Indonesia dapat diatasi secara lebih efektif karena pengelolaan makroekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam untuk mencapai stabilitas harga dan ekonomi (Bintara & Wahyudi, 2023). Dengan demikian, Indonesia akan mencapai stabilitas ekonomi melalui pemahaman yang komprehensif mengenai inflasi dan solusi yang sesuai dengan nilai nilai ekonomi syariah.

2. Infrastruktur yang Memadai

Infrastruktur yang baik meliputi transportasi, komunikasi, dan energi, merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Infrastruktur yang memadai meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi. Di beberapa wilayah di Indonesia telah merasakan manfaat yang signifikan dari peran infrastruktur yang memadai dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Anisa et al., 2024) Semakin meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan infrastruktur akan menciptakan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari adanya privatisasi pembangunan dan pengembangan jalan tol.

Menurut laporan Bank Dunia tahun 2022 (<https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022>), investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Tanpa infrastruktur yang baik, biaya transaksi akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Pengaruh infrastruktur yang memadai terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh aksesibilitas yang baik. Kondisi negara dengan aksesibilitas yang mumpuni ini akan terwujud apabila ketersediaan sarana transportasi dan energi yang memadai menjadi perhatian pemerintah.

3. Akses terhadap Modal

Akses terhadap modal juga merupakan faktor penting lainnya dalam pembangunan ekonomi. Modal tersebut meliputi pendapatan-pendapatan asli daerah yang bisa menjadi sumber keuangan negara (Sitompul & Lubis, 2013). Sumber pendapatan daerah tersebut menjadi bukti kemandirian suatu wilayah yang akan memperlancar proses pembangunan berkelanjutan. Selain itu, investasi swasta merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan investasi swasta diperlukan peran belanja modal dan pendapatan asli daerah untuk membangun system keuangan nasional

(Arini & Kusuma, 2019). Negara-negara yang memiliki sistem keuangan yang kuat dan inklusif cenderung lebih mampu mengumpulkan dan mendistribusikan sumber daya ke sektor-sektor produktif.

Selain investai, peningkatan daya saing ekonomi untuk pemangunan berkelanjutan tidak lepas dari peran inovasi. Menurut IMF tahun 2021, sistem keuangan yang efisien dapat mendorong investasi dan inovasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi (<https://g.co/kgs/u8nCGsj>). Inovasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk, serta membuka peluang baru untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya produksi. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk adanya kebijakan dari pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat umum (Al Aidhi dkk., 2023).

C. PRASYARAT SOSIAL

Sumberdaya yang berkualitas dan memiliki kesehatan fisik dan mental menjadi prasyarat pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sumberdaya yang ada sekaligus potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang berkualitas membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang memadai, kesehatan yang baik, dan berkeadilan sosial.

Modal sosial juga sangat penting untuk pembangunan ekonomi, manusia dan sosial, serta politik. Modal sosial sangat diperlukan dalam proses pembangunan untuk 1) meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat; (2) berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi; (3) berdampak terhadap tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya (Haridison, 2021). Dampak positif dari modal sosial ini berupa terwujudnya pemerintah dengan akuntabilitas yang lebih kuat sehingga negara berfungsi secara lebih efektif dan mempunyai legitimasi.

1. Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Masyarakat yang terdidik dan terampil lebih mampu beradaptasi dengan perubahan

ekonomi dan teknologi. Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif.

Pemerintah harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan warga negaranya agar mencapai sumberdaya yang berkualitas. Pendidikan dan keterampilan mendorong pembentukan modal manusia untuk proses pembangunan berkelanjutan. Pendidikan akan melahirkan keterampilan-keterampilan, seperti 1) berkefektifitas; 2) berinovasi; 3) berfikir kritis; 4) *problem solving*; dan 5) berkomunikasi dan berkolaborasi (Hasan et al., 2023). Dengan dibekali oleh keterampilan-keterampilan tersebut, gagasan pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing akan terwujud. Sumber daya inilah yang akan menopang proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat yang baik juga merupakan prasyarat untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kesehatan yang buruk dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya kesehatan. Penguatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan sanitasi, peningkatan kualitas kesehatan dan mitigasi bencana di lingkungan kerja, peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui kesehatan lingkungan, program pengurangan stunting, dsb. Terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan untuk semua kalangan usia.

Menurut Bloom dkk., (2004), investasi dalam kesehatan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas kesehatan masyarakat yang baik menjadi faktor penting dalam pembangunan manusia dan menjadi penentu dari indeks pembangunan manusia (IPM) karena kesehatan akan berdampak pada kualitas modal manusia (*human capital*) atau modal sosial (Sjafii, 2009). Investasi kesehatan yang meningkat akan mengakibatkan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga tingkat kemiskinanpun akan menurun. Oleh karena itu, program kesehatan yang efektif dan aksesibilitas layanan

kesehatan sangat penting untuk mendukung Pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3. Keadilan Sosial

Keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan sosial merupakan prasyarat penting untuk pembangunan yang inklusif. Kesenjangan sosial merupakan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Akibat dari kesenjangan sosial berupa ketidakadilan sosial yang berujung kepada ketidakpuasan dan konflik, yang pada gilirannya menghambat proses pembangunan. Kesenjangan sosial terjadi manakala muncul distribusi pemanfaatan kekayaan sumberdaya negara yang tidak merata. Penyebab lainnya berupa kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dan berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi negara, namun justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih buruk di negara tersebut (Fabela & Khairunnisa, 2024)

Penyebab lainnya dikemukakan oleh (Piketty, 2014) bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Kondisi yang menimbulkan kemiskinan tersebut berawal dari beberapa faktor, diantaranya, ketimpangan ekonomi atau ketidaksamaan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kemiskinan, atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus bertambahnya pengangguran (Amanullah & Wantini, 2024). Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan redistribusi pendapatan sangat diperlukan harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah.

D. PRASYARAT POLITIK

Prasyarat politik memiliki peran penting dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, juga diperlukan pembangunan politik agar memenuhi prasyarat politik. Pembangunan politik ini ditujukan mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik yang ada di negara tersebut. Pencapaian pembangunan politik ini berupa terwujudnya kondisi masyarakat yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk

mewujudkan pembangunan politik yang ideal maka tujuan pembangunan diarahkan kepada stabilitas politik dan kebijakan yang mendukung.

1. Stabilitas Politik

Stabilitas politik merupakan prasyarat penting dalam pembangunan. Instabilitas politik dapat mengganggu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan institusi politik yang kuat dan stabil cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Menurut Acemoglu and Robinson (2015), negara-negara yang memiliki institusi politik yang kuat dan stabil cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan.\

Pembangunan politik lebih populer diterapkan untuk untuk negara-negara yang sedang berkembang. Alasannya adalah di negara-negara sedang berkembang belum terdapat kondisi yang rasional, integratif dan demokratis. Fenomena ini mengakibatkan timbulnya instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik sehingga pembangunan politik menjadi solusi untuk mengatasi permasalahannya (Kadir, 2014). Namun demikian, stabilitas yang hanya merupakan stagnasi dan dukungan sepihak terhadap status quo tidak dapat dikatakan pembangunan (Kadir, 2014). Stabilitas politik harus diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk kondisi kemajuan ekonomi yang dilandasi oleh perencanaan dan kepastian dalam kategori aman.

2. Kebijakan yang Mendukung

Kebijakan pemerintah harus mendukung kepada perlindungan hak-hak investor dan regulasi yang ramah bisnis juga merupakan prasyarat yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, regulasi mengenai penyelesaian konflik yang berimbang antara investor dan penerima manfaat harus menjadi tujuan dari kebijakan yang akan dirumuskan. Dalam aspek makroekonomi, seperti bidang perbankan, hak konsumen dan investor serta lingkungan kerja harus berbasis *green banking* (Mahendra dkk., 2024). Isu-isu tersebut harus menjadi agenda pemerintah dalam upaya pembangunan politik agar menjadi prasyarat politik yang dapat menunjang pembangunan nasional berkelanjutan.

Menurut Rodrik (2015),kebijakan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Pengembangan kebijakan investasi dan inovasi mencakup hukum lokal, nasional, dan

internasional. Dalam perumusan konsep kebijakan dapat menerapkan konsep kebijakan konvensional dan konsep kebijakan syariah yang diadopsi dari kebijakan-kebijakan Hukum Islam. Dukungan kebijakan ini harus memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

E. PRASYARAT LINGKUNGAN

Aspek lingkungan merupakan menjadi prasyarat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan agar terwujud kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat sebagai modal pembangunan. Setiap tahapan pembangunan tidak lepas dari ijin lingkungan karena hal tersebut merupakan wujud integrasi antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam ruang lingkup pembangunan berkelanjutan. Namun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja telah menghapus istilah “ijin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan”. Sehingga pemerintah perlu memikirkan tentang keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

1. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan merupakan prasyarat penting dalam proses pembangunan berkelanjutan untuk memastikan keadilan lingkungan masyarakat terjaga kualitasnya baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Mengingat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa paradoks baru terhadap keberlanjutan ekologis di Indonesia, maka langkah untuk merespons perubahan politik hukum perlindungan lingkungan dalam UU Cipta Kerja perlu diperhatikan agar tetap mendukung keberlanjutan ekologis, berupa arah kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan yang lebih merefleksikan keadilan lingkungan (Danang et al., 2021). Keadilan Lingkungan, Partisipasi Publik, Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses pembangunan.

Menurut Dasgupta & Treasury (2022), keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Tidak cukup hanya sebatas pengetahuan hukum untuk mengatur pembangunan berwawasan lingkungan, namun pengetahuan terkait lingkungan hidup dan penataan ruang harus dilibatkan saat perumusan muatan-muatan materi hukum untuk keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu perlu ada konsep pembaruan dan harmonisasi perundang-undangan antara bidang lingkungan dan tata ruang untuk menjamin proses pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam yang baik juga merupakan prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan harus berasaskan keadilan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam ini juga mencakup pemanfaatan segala sumber daya alam yang ada di darat, laut, perairan darat, pesisir, udara, dan ruang angkasa. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak lepas dari norma-norma yang berlaku baik berupa hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional. Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945). Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pembangunan.

Sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, sementara pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Seperti pengelolaan sumber daya alam dari pengolahan lahan yang baik akan menghasilkan output seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Begitu pula sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan untuk tujuan mendapatkan sumber devisa yang hasilnya dapat digunakan untuk biaya pembangunan. Adapun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tanpa memperhitungkan norma-norma yang ada akan mengakibatkan menurunnya kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

F. KESIMPULAN

Prasyarat pembangunan mencakup berbagai faktor yang saling terkait, termasuk stabilitas makroekonomi, infrastruktur yang memadai, pendidikan, kesehatan, stabilitas politik, dan keberlanjutan lingkungan. Memahami dan menerapkan prasyarat-prasyarat ini sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB 9 PENDAPATAN

NASIONAL DAN

PENDAPATAN PER KAPITA

A. PENDAHULUAN

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita merupakan dua indikator penting dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Pada umumnya, pendapatan nasional atau Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dapat diketahui dari total nilai barang dan jasa yang diproduksi selama periode satu tahun. Dengan memahami Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional maka kondisi suatu negara kan diketaui dengan mudah. Sedangkan pendapatan per kapita merupakan ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu di suatu negara. Jenis pendapatan ini juga mencerminkan kemakmuran penduduk sebuah negara. Bab ini akan membahas konsep, metode pengukuran, serta pentingnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dalam konteks pembangunan ekonomi.

B. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional diartikan sebagai total pendapatan yang dihasilkan oleh semua faktor produksi dalam suatu negara. Dengan adanya pendapatan nasional dapat diketahui kontibusi masing-masing sektor ekonomi yang berada di semua wilayah sebuah negara. Selain itu, dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan investasi maupun investor yang akan membantu pembangunan berkelanjutan suatu negara. Konsep ini mencakup berbagai komponen utama pendapatan nasional (Hasan dkk., 2023; Yoshanda, 2020) meliputi Produk Domestik Bruto/ *Gross Domestict Product* (GDP), Produk Nasional Bruto/ *Growth National Product* (GNP), Produk Nasional

Neto/ *Net Natonal Produk* (NNP), Pendapatan Nasional Netto/ *Net National Income* (NNI), Pendapatan Perseorangan/ *Personal Income* (PI), dan Pendapatan yang siap dibelanjakan/ *Disposable Income* (DI) :

1. **Produk Domestik Bruto/ *Gross Domestict Product* (GDP):** Nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam batas geografis suatu negara dalam periode tertentu. Hal yang harus diperhatikan dalam menghitung GDP jumlah pasar, yakni, jangan sampai ada perhitungan ganda atau *double accounting* karena konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri.
2. **Produk Nasional Bruto/ *Growth National Product* (GNP):** Nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Terkait perhitungan besarnya GNP berdasarkan harga pasar, perhitungan ganda harus dihindari karena dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa dihasilkan oleh warga negara yang berada didalam negeri maupun diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Perhatikan contoh berikut ini!

GDP (Miliar rupiah) negara A sebesar 6.500.900, pendapatan penduduk negara A yang ada di negara B sebesar 200.500, dan pendapatan penduduk asing

di negara A sebesar 325.800

Maka jumlah GNP adalah:

$GNP = GDP + \text{Pendapatan netto dari luar negeri}$

$= 6.500.900 + (200.500 - 325.800)$

$= 6.500.900 - 125.300$

$= 6.375.600$

3. **Produk Nasional Neto/ *Net Natonal Produk* (NNP):** Pendapatan nasional yang telah dikurangi dengan penyusutan (*depresiasi*) dari modal yang digunakan dalam produksi. Penyusutan dimaknai sebagai berkurangnya kondisi barang yang sudah lama karena pemakaian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

Perhatikan contoh berikut ini!

Penyusutan alat di perusahaan A sebesar 11.400, maka jumlah NNP adalah:

$$\begin{aligned}\text{NNP} &= \text{GNP} - \text{penyusutan} \\ &= 6.375.600 - 11.400 \\ &= 6.364.200\end{aligned}$$

4. **Pendapatan Nasional Netto/ *Net National Income (NNI)***: Pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain, contoh pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.

Perhatikan contoh berikut ini!

Pajak penjualan barang sebesar 125.000, dan subsidi sebesar 30.000, maka jumlah NNI adalah:

$$\begin{aligned}\text{NNI} &= \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung} + \text{Subsidi} \\ &= 6.364.200 - 125.000 + 30.000 \\ &= 6.269.200\end{aligned}$$

5. **Pendapatan Perseorangan/ *Personal Income (PI)***: Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Pendapatan perseorangan dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan pajak perseroan, laba yang tidak dibagi, iuran pensiun; dan asuransi. *Personal Income (PI)* dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{PI} = \text{NNI} + \text{Transfer Payment} - (\text{iuran sosial} + \text{asuransi} + \text{laba ditahan} + \text{pajak perseroan})$$

Perhatikan contoh berikut ini!

Transfer payment sebesar 30.000, pajak perseroan 25.000, laba ditahan 41.500, iuran pensuin 23.800, asuransi sebesar 50.000. aka jumlah PI adalah:

$$\begin{aligned}\text{PI} &= \text{NNI} + \text{Transfer Payment} - (\text{iuran sosial} + \text{asuransi} + \text{laba ditahan} + \text{pajak perseroan}) \\ &= 6.269.200 + 30.000 - (23.800 + 50.000 + 41.500 + 25.000) \\ &= 6.269.200 + 30.000 - 140.300 \\ &= 6.439.500\end{aligned}$$

6. Pendapatan yang siap dibelanjakan/ *Disposable Income (DI)*:

Pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan yang diperoleh dari *personal income* setelah dikurangi dengan pajak langsung. Adapun pajak langsung merupakan pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Cara perhitungannya sebagai berikut:

$$DI = PI - \text{pajak langsung}$$

Perhatikan contoh berikut ini!

Pajak pendapatan sebesar 132.900, maka jumlah DI adalah:

$$\begin{aligned} DI &= PI - \text{pajak langsung} \\ &= 6.439.500 - 132.900 \\ &= 6.306.600 \end{aligned}$$

C. METODE PENGUKURAN PENDAPATAN NASIONAL

Ada tiga metode utama untuk mengukur pendapatan nasional, diantaranya metode produksi (*production approach*), metode pendapatan (*income approach*), dan metode pengeluaran (*expenditure approach*) (Pratiwi dkk., 2023).

1. Metode Produksi (*Production Approach*)

Metode ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, dan jasa. Perhitungan pendekatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menghitung nilai barang akhir dengan rumus berikut ini:

$$Y = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + \dots + (Pn \times Qn)$$

Keterangan :

Y = *national Income* (pendapatan nasional)

P = harga barang dan jasa

Q = jumlah barang dan jasa

1,2,3, dan n = jenis barang dan jasa

Perhatikan contoh berikut ini!

Industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membeli 1500 kapas dari petani kapas dengan harga 150.000 per meter

- 2) Kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000
- 3) Benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000
- 4) Kain diolah menjadipakaian garment dengan harga 250.000
- 5) Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000

Pendapatan nasional metode produksi (nilai tambah) adalah:

1. Petani kapas : $1500 \times \text{Rp}150.000$ = Rp225.000.000
2. Benang : $(1500 \times \text{Rp}170.000) - (1500 \times \text{Rp}150.000)$ = Rp 30.000.000
3. Kain : $(1500 \times \text{Rp}200.000) - (1500 \times \text{Rp}170.000)$ = Rp 45.000.000
4. Pakaian : $(1500 \times \text{Rp}250.000) - (1500 \times \text{Rp}200.000)$ = Rp 75.000.000
5. Pasar : $(1500 \times \text{Rp}300.000) - (1500 \times \text{Rp}250.000)$ = Rp 75.000.000 +

Pendapatan nasional = Rp450.000.000

2. Metode Pendapatan (*Income Approach*)

Metode ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, termasuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan / penerimaan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor – faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Pendapatan/Penerimaannya berupa sewa (*rent*), upah (*wage*) bunga (*interest*), dan laba (*profit*). Rumus perhitungannya yaitu,

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

R = *rent* (sewa)

W = *Wages* (upah)

I = *Interest* (bunga)

P = *profit* (keuntungan)

Perhatikan contoh berikut ini!

Diketahui data-data sebagai berikut (dalam miliar)

Sewa tanah	: Rp 30.000,00
Upah	: Rp250.000,00
Bunga modal	: Rp50.000,00

Laba usaha : Rp40.000,00
Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (*Income Approach*)!

Jawab:

$$Y = R + W + I + P$$

$$Y = \text{Rp}30.000,00 + \text{Rp}250.000,00 + \text{Rp}50.000,00 + \text{Rp}40.000,00 \\ = \text{Rp}370.000,00$$

3. Metode Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Metode ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir dalam suatu negara. Ini termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan empat komponen pendapatan nasional menurut metode pengeluaran (Sentosa, 2020). Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat diselesaikan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

C = konsumsi

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

Dengan menjumlahkan keseluruhan dari pengeluaran tersebut dalam satu periode tertentu (biasanya dalam satu tahun) akan diperoleh pendapatan nasional.

Perhatikan contoh berikut ini!

Diketahui data sebagai berikut (dalam miliar)

Pengeluaran konsumen	:Rp125.000,00
Tingkat investasi	: Rp150.700,00
Pengeluaran pemerintah	: Rp130.000,00
Nilai ekspor	: Rp225.250,00
Nilai impor	: Rp170.500,00

Hitunglah besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*)!

Jawab:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = \text{Rp}125.000,00 + \text{Rp}150.700,00 + \text{Rp}130.000,00 + (\text{Rp}225.250,00 - \text{Rp}170.500,00)$$

$$Y = \text{Rp}405.700,00 + \text{Rp}54.750,00$$

$$Y = \text{Rp}460.450,00$$

4. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{\text{Pendapatan Nasional}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan untuk membandingkan standar hidup antar negara.

D. PENTINGNYA PENDAPATAN NASIONAL DAN PENDAPATAN PER KAPITA

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita pada dasarnya memiliki hubungan satu sama lain. Pendapatan nasional merupakan ukuran nilai yang dikeluarkan dari barang dan jasa sebagai produk dari suatu negara. Biasanya pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Pendapatan nasional dapat pula diartikan sebagai jumlah seluruh jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Memahami hal ini sangat penting karena keduanya merupakan indikator kesejahteraan, perencanaan ekonomi, dan perbandingan internasional.

1. Indikator Kesejahteraan

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita merupakan indikator penting untuk menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara. Seperti dikemukakan oleh Syafruddin dan Darwis (2021) bahwa pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan suatu negara karena beberapa alasan: 1) Dapat memahami struktur perekonomian negara sehingga

berkontribusi pada pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih efisien; dan
2. Mempertimbangkan kondisi ekonomi antara lokal atau wilayah agar pemerintah dapat menemukan kesenjangan ekonomi dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya.

Negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi umumnya memiliki standar hidup yang lebih baik dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Saputra & Mahmudi (2012) menyatakan bahwa “*Product Domestic Bruto* (PDB) riil mengukur output barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya”. Masih menurut sumber yang sama, negara dengan PDB lebih tinggi mempunyai “hampir segalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil, lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet”.

2. Alat Perencanaan Ekonomi

Data pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi. Menurut Syafruddin & Darwis (2021), “informasi pendapatan nasional membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi data tentang pendapatan nasional yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik”(Syafruddin & Darwis, 2021). Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan pendapatan nasional.

Dengan memahami komponen pendapatan nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan perhatian dan investasi lebih lanjut, seperti yang dikemukakan oleh Firdaus (2012) bahwa:

“Pergerakan empat komponen pendapatan nasional seperti, Konsumsi Masyarakat, Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor Netto selalu diperhatikan oleh para ahli ekonomi. Naik turunnya komponen ini akan ikut menentukan naik turunnya pendapatan nasional . Artinya, apabila seluruh komponen itu naik maka naik pula Pendapatan Nasional dan sebaliknya apabila seluruh komponen itu turun, akan turun pula Pendapatan Nasional. Dengan kata lain, bahwa

perubahan-perubahan tersebut akan tergantung pada perimbangan kekuatan masing-masing komponen”.

3. Perbandingan Internasional

Pendapatan per kapita juga digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antar negara. Menurut Syafruddin dan Darwis (2021), dengan mengevaluasi kondisi ekonomi dari berbagai negara yang merujuk kepada pendapatan nasionalnya memungkinkan untuk membandingkan kondisi ekonomi suatu negara dengan kondisi ekonomi negara lainnya sehingga tercipta kebijakan ekonomi yang lebih efisien. Hal ini membantu negara untuk mengetahui kelemahan-kelemahan negara lain. Sedangkan kekuatan dan kelebihan-kelebihan negara lain dapat dijadikan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Membantu dalam memahami perbedaan dalam perkembangan ekonomi dan menentukan negara mana yang mungkin membutuhkan bantuan internasional. Bantuan internasional dapat berupa hutang untuk pembangunan ekonomi negara tersebut. Selain itu, suatu negara yang membutuhkan ekspor dan impor akan barang-barang dan jasa tertentu akan sangat mudah untuk diidentifikasi. Investasi tidak kalah pentingnya dalam peningkatan komponen pendapatan negara. Secara garis besar, pendapatan suatu negara dapat ditingkatkan dengan adanya bantuan internasional dari aspek investasi, ekspor, dan impor (Firdaus, 2012).

E. TANTANGAN DALAM PENGUKURAN PENDAPATAN NASIONAL

Meskipun pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi indikator penting untuk mengetahui kesejahteraan suatu negara, ada beberapa tantangan dalam pengukurannya:

1. **Ekonomi Informal:** Banyak aktivitas ekonomi tidak yang tercatat dalam statistik resmi, terutama di negara berkembang. Seringkali angka statistik tidak akurat dan sampel yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan estimasi pendapatan nasional yang rendah.
2. **Penyusutan dan Depresiasi:** Metode pengukuran yang memperhitungkan penyusutan seringkali terabaikan. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan kondisi kesehatan ekonomi suatu negara.

3. Distribusi Pendapatan: Pendapatan per kapita yang tidak akurat dapat mengakibatkan rendahnya distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Hal ini akan menunjukkan pendapatan per kapita tinggi di suatu negara tetapi terjadi ketimpangan yang tinggi dan kesejahteraan tidak merata.

F. KESIMPULAN

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita merupakan indikator penting dalam ekonomi karena keduanya membantu dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara. Dengan memahami konsep dan metode pengukuran kedua indikator ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi keadaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam pengukurannya, data ini tetap menjadi alat penting untuk pembuat kebijakan dan peneliti ketika merencanakan dan mengevaluasi proses pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton University Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishers.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2015). The rise and decline of general laws of capitalism. *Journal of Economic Perspectives*, 29(1), 3–28.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019a). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019b). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Press.
- Adi, R. (2020). Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Psikologi Sosial*, 15(3), 67-75.
- Aghion, P., & Howitt, P. (2009). *The Economics of Growth*. MIT Press.
- Agus, S. (2002). *Perubahan Sosial, Sketsa Teori*. Tiara Wacana Yogya.
- Aisyah, D. D., & Mulyo, J. H. (2021). Understanding the palm oil smallholders characteristics and their compliance towards the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): A case study in North Sumatera, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 637(1), 12041.
- Akadiri, S. S., Adebayo, T. S., Riti, J. S., Awosusi, A. A., & Inusa, E. M. (2022). The effect of financial globalization and natural resource rent on load capacity factor in India: an analysis using the dual adjustment approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(59), 89045–89062.
- Akyüz, Y., & Gore, C. (1996). The Investment-Profits Nexus in East Asian Industrialization. *World Development*, 24(3), 461–470. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00154-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00154-5)
- Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan daya saing ekonomi melalui peranan inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134.

- Alkire, S., Kanagaratman, U., & Suppa, N. (2021). The Global Multidimensional Poverty Index (MPI): 2018 Revision. The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2021 Sabina, 31(7), 1800–1806. Retrieved from https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI_MPI_MN_51_2021_4_2022.pdf
- Amanullah, W. A., & Wantini, W. (2024). Analisis kesenjangan sosial di sekolah: Perspektif sosiologi pendidikan Islam (Studi kasus di SDN Bhayangkara Yogyakarta). *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 43–55.
- Anisa, S. N., Aulia, S., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>.
- Arief, S., Rusdi, M., & Basri, H. (2022). Analisis Konversi Lahan Gambut di Ekosistem Rawa Tripa. *Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 7(1), 649–653.
- Arifanti, V. B., Kauffman, J. B., Subarno, Ilman, M., Tosiani, A., & Novita, N. (2022). Contributions of mangrove conservation and restoration to climate change mitigation in Indonesia. *Global Change Biology*, 28(15), 4523–4538.
- Arifin, Z. (2021). Memahami Hakikat Manusia: Tinjauan Filosofis dan Implikasinya dalam Pembangunan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 78–92.
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap investasi swasta di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28–38.
- Arlington, V. . (2020). Gartner Survey Reveals 82% of Company Leaders Plan to Allow Employees to Work Remotely Some of the Time. Retrieved from <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. (Edisi Keli). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Aryani, R. (2024). Analisis hukum tentang tanggung jawab pihak ketiga dalam investasi infrastruktur. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1078–1088.

- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0)
- Ashour, L., Schoumann-Alkhatib, A., Alshawabkeh, A., Alsouri, M., Sawalmeh, M., Hatamleh, H., & Sawahreh, H. (2023). Highlighting the Need for MD-PhD Programs in Developing Countries. *Avicenna Journal of Medicine*.
- Asrori. (2020). *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. CV. Pena Persada (Vol. 5).
- Astuti, R. S., Al-Jannah, S., Amin, A., & Mukhlisuddin. (2023). Hakekat Perubahan Sosial. *Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1481-1489.
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What Can Be Done?*. Harvard University Press.
- Bakewell, O. (2014). Relaunching migration systems. *Migration Studies*, 2(3), 300–318. <https://doi.org/10.1093/migration/mnt023>
- Banerjee, A. V., Duflo, E., & Kremer, M. (2020). The Influence of Randomized Controlled Trials on Development Economics Research and on Development Policy. *The State of Economics, the State of the World*, d, 439–487. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11130.003.0015>
- Bank, W. (2022). *Poverty and Shared Prosperity Course correctino. Managing Automation (Vol. 24)*.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth (2nd ed)*. MIT Press.
- Barrot, J. S. (2023). Research on education in Southeast Asia (1996–2019): a bibliometric review. *Educational Review*, 75(2), 348–368.
- Basuki, T. M., Nugroho, H. Y., Indrajaya, Y., Pramono, I. B., Nugroho, N. P., Supangat, A. B., . . . Purwanto. (2022). Improvement of Integrated Watershed Management in Indonesia for Mitigation and Adaptation to Climate Change: A Review. *Sustainability*, 14(16), 9997.
- Benedikt, C., & Osborne, M. A. (2016). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting & Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>

- Bhattacharyya, D. (2018). Cultural Diversity and Inclusive Development. *Development Studies*, 54(6), 923-939.
- Bintara, Y. P., & Wahyudi, A. (2023). Mekanisme pengendalian inflasi: Pendekatan Islam dalam memelihara stabilitas harga. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3).
- Bintoro. (1995). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung. Brownill,.
- Black, R., Adger, N., Arnell, N., Drecon, S., Geddes, A., & Thomas, D. (2011). The effect of environmental change on human migration', *Global Environmental Change*.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: A production function approach. *World Development*, 32(1), 1–13.
- Bloom, N., Mahajan, A., McKenzie, D., & Roberts, J. (2010). Why do firms in developing countries have low productivity? *American Economic Review*, 100(2), 619–623.
- BPS. (2022). *Gini Ratio Provinsi 2002-2022*.
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. *Economia y Empresa*, 47.
- Calderón-Garcidueñas, L., González-Maciél, A., Reynoso-Robles, R., Hammond, J., Kulesza, R., Lachmann, I., ... Maher, B. A. (2020). Quadruple abnormal protein aggregates in brainstem pathology and exogenous metal-rich magnetic nanoparticles (and engineered Ti-rich nanorods). The substantia nigrae is a very early target in young urbanites and the gastrointestinal tract a key brainstem . *Environmental Research*, 191(August). <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110139>
- Castles, S., & Miller, M. J. (1998). *The age of migration: international population movements in the modern world*. Macmillan Press LTD (Vol. 70). <https://doi.org/10.2307/2620738>
- Cattaneo, C., Beine, M., Fröhlich, C. J., Kniveton, D., Martinez-Zarzoso, I., Mastroiello, M., ... & Schraven, B. (2019). Human migration in the era of climate change. *Review of Environmental Economics and Policy*, 13(2), 189–206.

- Chang, H. J., & Grabel, I. (2021). *Rethinking Economic Development: Challenging Orthodoxies*. Polity Press.
- Channel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World Inequality Report 2022*.
- Chen, M., Sui, Y., Liu, W., Liu, H., & Y. Huang. (2020). Urbanization patterns and poverty reduction: A new perspective to explore the countries along the Belt and Road. In *Habitat International* (p. 96).
- Chōgorō Maide. (2016). Ricardo's theory of value and distribution. In *Ricardo and the History of Japanese Economic Thought* (1st Editio, p. 63). Routledge.
- Coale, A. J., & Hoover, E. M. (2015). *Population Growth and Economic Development*. Princeton University Press.
- Collier, P. (2007). *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof>
- Collier, P. (2020). *Future Of Capitalism: Facing the New Anxieties*. Harpercollins.
- Conceição, P. (2024). *REPORT 2023 / 2024 Reimagining cooperation in a polarized world*.
- Czaika, M., & Reinprecht, C. (2020). Drivers of migration: A synthesis of knowledge. *IMI Working Paper Series*, 163(April), 1–45.
- D. Gollin. (2014). *Agricultural Productivity and Economic Development*. Academic Press.
- D. P O'Brien. (2020). *The Classical Economists Revisited*. New Jersey: Princeton University Press.
- Danang, H., Dan, P., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 297 - 322 , 7(2), 297–322.
- Dasgupta, P., & Treasury, H. M. (2022). The economics of biodiversity: The Dasgupta review. *Odisha Economic Journal*, 54(2), 170–176.

- de Haas, H. (2021). A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. *Comparative Migration Studies* (Vol. 9). *Comparative Migration Studies*. <https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4>
- Dewi, G. D. (2021). Multi-stakeholder engagement in the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) framework. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 729(1), 12085.
- Dijk, J. . Van. (2020). *The digital divide*. John Wiley & Sons.
- Djiofack, C. Z., & Niyibizi, P. A. (2021). Rwanda Economic Update: Protect and Promote Human Capital in a post-COVID-19 World. World Bank Group, (16). Retrieved from <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/593761612554686869/rwanda-economic-update-protect-and-promote-human-capital-in-a-post-covid-19-world>
- Donatus, P. (2005). *Pengantar Sosiologi*. CV. Kasih Indah.
- Easterly, W. (2001). The middle class consensus and economic development. *Journal of Economic Growth*, 6(4), 317–335. <https://doi.org/10.1023/A:1012786330095>
- Elina, M. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Eureka Media Aksara.
- Evensky, J. (2015). *Adam Smith's Wealth of Nations: A Reader's Guide*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Evensky, J. (2021). *The Wealth of Nations in Historical Perspective*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak kesenjangan sosial di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>.
- Fajri, I., & Afriansyah, H. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
- Faruqee, H., & Ghosh, S. (2020). Income Disparities and Economic Development. *World Development*. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1826419>

- Fields, G. S. (2019). *Poverty and Inequality in Developing Countries*. Princeton University Press.
- Firdaus. (2012). Analisis pendapatan, pertumbuhan dan struktur ekonomi nasional. *Jurnal Plano Madani* , 1(1), 63–73.
- Forum, W. E. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. World Economic Forum. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
- Frank, A. . (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Fujita, M., & Thisse, J. F. (2013). *Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Globalization*. Cambridge University Press.
- Fulmer, J. E. (2009). What is the World Infrastructure? PEI Infrastructure Investor, 30–32. Retrieved from <https://30kwe1si3or29z2y020bgbet-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/03/what-in-the-world-is-infrastructure.pdf>
- Ganda, F. (2022). The nexus of financial development, natural resource rents, technological innovation, foreign direct investment, energy consumption, human capital, and trade on environmental degradation in the new BRICS economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(49), 74442–74457.
- Garip, F., & Asad, A. L. (2015). Migrant Networks. *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*, (May 2015), 1–13. <https://doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0220>
- Geissoderfer, M., Pieroni, M. ., Pigosso, D. ., & K.Soufani. (2020). Circular business models: A review. *Journal of Cleaner Production*, 2(77), 123.
- GI Hub. (2021). *Infrastructure Monitor 2021*. Global Infrastructure Hub.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>

- Guspeneldi, A. (2017). Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam. *Law and Policy Transformation*, 2(1), 28.
- Hadi, M. (2022). Pendapatan Per Kapita dan Tantangan Ekonomi di Negara Berkembang. *Ekonomi dan Keuangan*, 20(1), 45-58. <https://doi.org/10.2345/jek.v20i1.1234>
- Hakiki, A., Suhaimi, B., Mu'ammam, N., Kurniasari, D., Indonesia, U., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2024). Analisis kebijakan moneter, fiskal dan inflasi pada pertumbuhan ekonomi (Vol. 4, Issue 1).
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). The economic impacts of learning losses.
- Hardiman, F. . (2023). Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Haridison, A. (2021). Modal sosial dalam pembangunan. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.363>
- Haridison, A. (2021). Modal sosial dalam pembangunan. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.363>.
- Hasan, A., Harahap, A. S., Az-Zahra, M. T., Rahmawati, Ibrahim, M., & Zahra, A. A. (2023). Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. *Eco-Iqtishodi*, 4(2), 19–34.
- Hasan, M., Nasution, N., Sofyan, S., Guampe, F. A., Rahmah, N., Mendo, A. Y., Elpisah, E., Musthan, Z., Sulistyowati, R., & Kamaruddin, C. A. (2023). Pendidikan dan sumber daya manusia: Menggagas peran pendidikan dalam membentuk modal manusia. Penerbit Tahta Media.
- Hasanah. (2021). Pemetaan Sektor Unggulan di Kota Pontianak Menggunakan Metode Tipologi Klassen dan Hasil bagi Lokasi. *Prosiding Seminar Nasional SATIESP 2021*, 156.
- Hasang, I., & Nur, M. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Ahlimedia Book.
- Hayati, N. F., & Purba, N. S. (2023). Analisis kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan pembangunan di negara Indonesia. *J. Ilmu Komputer, Ekon. Dan Manaj*, 3(1), 551–563.

- Herniti, D. (2021). Upaya Pengelolaan Lingkungan Penggalian dan Pengambilan Material Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Gendol Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Rekayasa Lingkungan*, 21(1).
- Hickel, L. (2020). *Less is More: How Degrowth Will Save the World*. London: Penguin Random House.
- Hidayat, A., & Kurniawan, M. (2023). Redirecting Fuel Subsidies for Economic Development: A Case Study of Indonesia. *Indonesian Economic Review*, 15(3), 45-60.
- Hidayat, R. (2022). Pembangunan di Era Global: Menyeimbangkan Aspek Lokal dan Transnasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 45–60.
- Hodgson, G. M. (2009). Malthus, Thomas Robert (1766-1834) (In Biograp). Thoemmes.
- Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S., Krüger, N., Herrler, T., Erichsen, S., ... Pöhlmann, S. (2020). SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. *Cell*, 181(2), 271-280.e8. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052>
- Hollander, S. (1973). *The Economics of Adam Smith*. University of Toronto Press.
- Homer-Dixon, T. F. (1994). Environmental scarcities and violent conflict: Evidence from cases. *International Security*, 19(1), 5–40.
- Ibrahim, C., Hardiyati, R., Ayunda, W. A., & Fadhli, R. (2021). Comparative Study of AseanCountries Research Productivity in Library Science. *Webology*.
- ILO, I. L. O. (2019). Work for a brighter future. RBEST: Revista Brasileira de Economia Social e do Trabalho (Vol. 1). <https://doi.org/10.20396/rbest.v1i0.12537>
- IOM. (2022). World Migration Report 2022. World Migration Report (Vol. 2022). <https://doi.org/10.1002/wom3.30>
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.

- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.*
- IRENA and ILO. (2022). *Renewable energy and jobs: Annual review 2022, International Renewable Energy Agenc.* Retrieved from <https://www.aer.gov.au/system/files/AER - Guidance Note for coal production assessment - July 2023 - FINAL v1.02.pdf>
- Ishak, K. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasinya terhadap indeks pembangunan di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22–38.
- Ismawati, L. (2021). *Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Gumuk di Kabupaten Jember Jawa Timur: Keselarasan Teknologi Eksplorasi, Pengelolaan dan Wawasan Lingkungan. Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI.*
- Isna, N. P., Ramadhani, R. D., Margaretha, T., Mulalugina, S., Amin, F. F., Athfal, D. H., & Yuningsih, N. Y. (2024). *Perbandingan manajemen utang Sri Lanka dan Indonesia terhadap World Bank (Bank Dunia). Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7).
- J.D Sachs. (2019). *The Age of Sustainable Development.* amerika: Columbia University Press.
- Javaid, L., Kousar, N., Anjum, F., Nida, N., Anwar, M., & Javaid, U. (2023). Sociological study on residents' perception of special economic zone regarding the consequent change in the area: A case study of district Faisalabad. *Journal of South Asian Studies*, 11(1), 61–76.
- Jones, C. I., & Vollrath, D. (2013). *Introduction to Economic Growth* (3rd ed.). W.W. Norton & Company.
- Joyosemito, I. S., Akihiro, T., & Toyohiko, N. (2014). System dynamics model development for evaluation of the moratorium policy on new forest and peatland concessions under bilateral cooperation in Indonesia: palm oil industry sector case study. *Journal of Sustainable Energy & Environment*, 5(1), 1–12.
- Juliana, I., Safitri, N. L., & Fadillah, W. (2023). *Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia: Mengungkap Faktor-Faktor Kualitatif yang Mendorong Pertumbuhan. Harmoni : Jurnal Ilmu Komunikasi dan*

- Sosial, 1(2), 01-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.436>
- Kabeer, N. (2015). Gender Equality and Women's Empowerment: Central to the Post-2015 Development Agenda. *International Development*, 27(6), 873-889.
- Kadir, G. (2014). *Pengertian pembangunan politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kartodirdjo, S. (2005). *Sejarah Perkembangan Sosial-Budaya di Indonesia*. Gramedia .
- Kattel, R., & Mergel, I. (2019). Estonia's Digital Transformation. *Great Policy Successes*, (September 2019), 143-160. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198843719.003.0008>
- Kentikelenis, A. E., & Babb, S. (2019). The making of neoliberal globalization: Norm substitution and the politics of clandestine institutional change. *American Journal of Sociology*, 124(6), 1720-1762. <https://doi.org/10.1086/702900>
- Kevin P Gallagher, & Richard Kozul-Wright. (2021). *The Case for a New Bretton Woods*. Wiley and Computer Publishing.
- Koentjaraningrat. (2020). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koltko-Rivera, M. E. (2006). Rediscovering the later version of Maslow's hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. *Review of General Psychology*, 10(4), 302-317. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.10.4.302>
- Kurniawati, S., & Asyurrahman. (2018). *Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat*. *Prosiding SATIESP*, 127-143.
- Kurz, H. . (2016). *Economic Thought: A Brief History*. Columbia University Press.
- Kurz, H. D., & Salvadori, N. (2019). David Ricardo: Classical Economic Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 45-46.
- Lestari, A., & Nugroho, S. (2019). Structural Reform Policies in Emerging Economies: Lessons from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 11(1), 34-50.

- Lestari, A., & Suryani, R. (2023). Stabilitas Ekonomi di Negara Berkembang: Strategi dan Implementasi. *Pembangunan Nasional*, 12(3), 210-225. <https://doi.org/10.7890/jpn.2023.12.3.210>
- Lin, J. Y., & Wang, Y. (2023). New structural economics: The third generation of development economics. *Cambridge Journal of Economics*, 47(1), 1–28.
- Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, Muh. G. (2021). Dampak tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi kasus negara berkembang OKI. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Louhenapessy, D. J. (2014). Perhitungan Indeks Perubahan Struktur (Structural Changes Index) pada. *Citra Ekonomika*, 8(1), 1-19.
- M. Ahyan Kose, Peter Nagle, Franziska Ohnsorge, & Naotaka Sugawa. (2021). *Global Waves of Debt : Causes and Consequences*. World Bank.
- Mabogunje, A. . (1970). System approach to a theory of rural-urban migration. *Geographical Analysis* 2.
- Maghfirani, H. N., Hanum, N., & Amani, R. D. (2022). Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 314–321.
- Mahendra, A. T., Candra, M., Masdiani, E., & Apriandika, R. (2024). *Corporate governance, kebijakan Green Banking, dan kinerja lingkungan bank*. CV. Gita Lentera
- Majid, N. A., Ramli, Z., Md Sum, S., & Awang, A. H. (2021). Sustainable palm oil certification scheme frameworks and impacts: A systematic literature review. *Sustainability*, 13(6), 3263.
- Maneschi, A. (2018). *Comparative Advantage in International Trade: A Historical Perspective*. New York: Edward Elgar Publishing.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2024). Community-Based and -Driven Development: A Critical Review. *The World Bank Research Observer*, 19(1), 1–39.

- Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Sanghvi, S. (2017). Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. McKinsey Global Institute, (December), 1–148. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/~media/Bab489a30b724becb5dedc41e9bb9fac.ashx>
- Maqin, A. (2014). Pengaruh kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika Journal*, 10(1), 10–18.
- Marlow, M. L. (2019). Economic Development and the Relationship between GDP and Income Inequality. *Economic Perspectives*, 33(4), 23–42. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2012.00267.x>
- Marzuki, S. (1996). Kelangkaan sumberdaya dan konflik kekerasan. *Unisia*, 49–55.
- Massey, D. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal, (September). <https://doi.org/10.2307/2938462>
- Massey, D. S., Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, & Adela Pellegrino, J. E. T. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population Council.
- Maulana, I. R. (2023). Kesenjangan sosial dalam distribusi kekayaan: Tantangan bagi pembangunan berkelanjutan. *Literacy Notes*, 1(2), 1–12.
- McKinsey & Company. (2016). Bridging Global Infrastructure Gaps, (June), 60. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps>
- Mondia, M. W., Espiritu, A. I., & Jamora, R. D. (2020). Primary brain tumor research productivity in Southeast Asia and its association with socio economic determinants and burden of disease. *Frontiers in Oncology*.
- Mubarak, Z. (2023). Web-based spatial information system for fisheries potential in Cirebon Regency. *Cebong Journal*, 2(3), 95–100.
- Mulyadi, S. (2021). Analisis Ekonomi Pembangunan di Negara Berkembang. *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 15(2), 103–117. <https://doi.org/10.1234/jep.v15i2.5678>

- Musmulyadi, M., Agustina, S., br Haloho, K. S. D., Hudri, Z., Wurdiantho, R., Siregar, T. F., Yohanes, R., Tambunan, R., & Siregar, Y. S. (2023). Tantangan regulasi hukum investasi di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 32380–32384.
- Nagara, G. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan). *Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 19–44.
- Nasution, A., Siregari, M. F., Widiani, A., & Harahap, N. (2024). Pengaruh Kebijakan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. *JRIME: JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 2(1), 306-317. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i1.1153>
- Ngoc, B. M., & Barrot, J. S. (2022). Current landscape of English language teaching research in Southeast Asia: A bibliometric analysis. *The Asia-Pacific Education Researcher*.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173–181.
- Ningrum, D. P. S., Hasanah, S. A. H., Zaroh, Y., & Firdaus, N. (2024). Pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas mata uang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Noordwijk, M. V., Agus, F., Dewi, S., & Purnomo, H. (2014). Reducing emissions from land use in Indonesia: motivation, policy instruments and expected funding streams. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 19, 677–692.
- North, D. . (2020). *Understanding the Economic Evolution of Societies*. Cambridge University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Nurchayaningsih, T. W., Rahayu, A., Purwiyanta, M., & Purwiyanta, M. S. (2022). Pengaruh Harga Internasional Batubara, Harga Internasional Minyak Bumi dan Gross Domestic Product Per Capita Terhadap

- Permintaan Ekspor Batubara Indonesia Ke Jepang Tahun 2000-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 933–950.
- Nuzzo, J. B., Mullen, L., Snyder, M., Cicero, A., & Inglesby, T. V. (2019). Preparedness for a high-impact respiratory pathogen pandemic. *John Hopkins Center for Health Security*, (September), 1–84. Retrieved from https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf
- OECD. (2018). Improving infrastructure to boost productivity and well-being (pp. 115–162). https://doi.org/10.1787/eco_surveys-isr-2018-7-en
- Organization, I. L. (2021). *ILO Monitor: COVID-19 and the world of work Seventh edition*.
- Orum, A. ., Gottdiener, M., & Johnstone, C. (2019). *Introduction to Cities: How Place and Space Shape Human Experience (3rd ed.) (3rd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Ostry, J. ., Berg, A., & Tsangarides, C. . (2019). Redistribution, inequality, and growth.
- Otto, I. M., Donges, J. F., Cremades, R., Bhowmik, A., Hewitt, R. J., Lucht, W., ... Schellnhuber, H. J. (2020). Social tipping dynamics for stabilizing Earth's climate by 2050. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(5), 2354–2365. <https://doi.org/10.1073/pnas.1900577117>
- Pakasi, P. P. (1988). *Economic Aspects Of Soybean Production And Marketing In Indonesia*.
- Pasaribu, L. S. (2023). Identifikasi Struktur Ekonomi Sektoral Dan Regional Seluruh Provinsi Di Indonesia Menggunakan Analisis Network. *Bina Ekonomi*, 27(2), 194-208.
- Patel, R., King, J., Phelps, L., & Sanderson, D. (2017). What Practices Are Used To Identify And Prioritize Vulnerable Populations Affected By Urban Humanitarian Emergencies? *Oxfam GB*, Not applic(Not applicable), 1–50. Retrieved from <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/what-practices-are-used-to-identify-and-prioritize-vulnerable-populations-affec-620190>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. In *Pemerintah Indonesia*.

- Perrings, C. A. (2023). *Development economics*. Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.D.38>
- Pierre Friedlingstein et al. (2022). *Global Carbon Budget 2022*. Retrieved from <https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/>
- Piguet, E. (2013). From “Primitive Migration” to “Climate Refugees”: The Curious Fate of the Natural Environment in Migration Studies. *Annals of the Association of American Geographers*, 103(1), 148–162.
- Piketty, I., & Saez, E. (2020). Inequality in the long run. *Science*, 344(6186), 838–843.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang. *Minfo Polgan*, 12(2), 2474. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13292>
- Praseto, B., & Suryono, A. (2022). Pendekatan Holistik dalam Pembangunan Berbasis Manusia. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 301–315.
- Pratama, A. (2022). Reformasi Ekonomi dan Tantangan Negara Berkembang. *Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 25-38. <https://doi.org/10.5678/jkep.2022.11.1.25>
- Pratama, B., & Dewi, F. (2021). Economic Diversification through Industrial Policy in Indonesia. *Asian Economic Journal*, 18(4), 233-250.
- Pratiwi, R. R., Ramadhanti, D., Sholihah, A., & Kustiawati, D. (2023). Kenaikan ekspor dan impor tahun 2022 terhadap pendapatan nasional Indonesia. *ETNIK : Jurnal Ekonomi-Tekhnik*, 2(2), 117–124.
- Prawira, A. Y., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2024). Peranan hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing demi tercapainya pembangunan ekonomi. *YUSTISI*, 11(1), 248–260.
- Pressman, S. (2006). *Fifty Major Economists: A Reference Guide*. Routledge.
- Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan. *Media Iuris*, 5(2).

- Rahman, Z. (2022). Structural Economic Policy and Its Impacts on National Competitiveness. *Scopus Indexed Economic Studies*, 9(3), 78-95.
- Rahmawati, R., Putir, P. E., Damiri, M., & Tanduh, Y. (2020). Keragaman fungi mikoriza arbuskula (fma) di lahan gambut konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit: Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (FMA) in Peatland Conversion Forest Nature Become A Palm Oil Plantation. *HutanTropika*, 15(1), 8–19.
- Ramadhan, A. R., Nawary, A., & El Farabi, M. N. Z. (2023). Konsep kebijakan ekonomi Nabawi dalam membangun stabilitas perekonomian negara: Analisis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perspektif hadis. *PROSIDING SEMINAR PROGRAM STUDI ILMU HADITS STDI IMAM SYAFI'I JEMBER*, 22–43.
- Ravallion, M. (2020). On measuring global poverty. *Annual Review of Economics*, 12, 167–188. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081919-022924>
- Reinert, E. S. (2021). *How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay Poor*. Norwaigia: Anthem Press.
- Rigaud, K. K., de Sherbinin, A., Jones, B., Bergmann, J., Clement, V., Ober, K., ... & Midgley, A. (2021). *Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration*. World Bank.
- Rizki, M. K., & Setiawina, N. D. (2022). Pengaruh Jumlah Produksi, Kurs Dollar, dan Permintaan dalam Negeri Batubara terhadap Jumlah Ekspor Batubara Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, 11(6), 659–668.
- Roberts, T., & Hernandez, K. (2019). Digital Access is not Binary: The 5'A's of Technology Access in the Philippines. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 85(4). <https://doi.org/10.1002/isd2.12084>
- Robeyns, I. (2020). Wellbeing, place and technology. *Wellbeing, Space and Society*, 1(June), 100013. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2020.100013>
- Rodiaminollah, M., & Qomariyah, L. N. (2023). Pembangunan Sektor Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 49-55.
- Rodrik, D. (2015). *Economics rules: The rights and wrongs of the dismal science*. WW Norton & Company.

- Rodrik, D. (2018). *Economic Transformation in East Asia*. Princeton University Press.
- Roemer, J. E., & Trannoy, A. (2016). Equality of opportunity: Theory and measurement. *Journal of Economic Literature*, 54(4), 1288–1332. <https://doi.org/10.1257/jel.20151206>
- Rosi, A. I. (2024). Analisis Struktur Ekonomi Dan Disparitas Produk Domestik Regional Bruto Antar Wilayah Di Provinsi Jambi. *Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1863-1869. <https://doi.org/DOI Issue: 10.46306/jbbe. v17i2>
- Rudy P.Tambunan, Chotib, Syarifah F.Syaukat, Y. N. (2014). *Urban Demography*. Jakarta: Kemitraan Agenda Habitat Indonesia Habitat Agenda Partners Indonesia.
- Rukmana, A. Y., Priyana, Y., Rahayu, M., Jaelani, E., & Manik, D. E. (2023). Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekosistem Kewirausahaan: Studi Kasus Inkubator Bisnis di Indonesia. *Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(3), 216–225.
- S. Kim. (2008). *Spatial inequality and economic development : theories, facts, and policies* (Commission on growth and development working paper; Commission on Growth and Development Working Paper No. 16).
- S. Vertovec. (2021). Transnationalism and migration. In A. Triandafyllidou (Ed.) *Handbook of Migration and Globalisation*. Edward Elgar Publishing.
- Sachs, J. . (2021). *The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions*. Columbia University Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/sach17314>
- Sachs, J. D. (2023). *The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions*. Columbia University Press.
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D, & Nakicenovic, N Rockström, J. (2019). Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, 2(9), 805–814.

- Sadewo, D. N., Arifianto, T., Sunardi, S., Moonlight, L. S., & Wasito, B. (2022). Penggunaan Solar Tracker untuk Analisis Pencarian Daya Maksimal pada Panel Surya. *Kajian Teknik Elektro*, 7(2), 43–47.
- Saidi, Y., Labidi, M. A., & Ochi, A. (2023). Economic Growth and Extreme Poverty in Sub-Saharan African Countries: Non-Linearity and Governance Threshold Effect. *Journal of the Knowledge Economy*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01421-7>
- Santoso, B. E., & Moenek, R. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN Eko Budi Santoso, Reydonizar Moenek. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 99–100.
- Saputra, B., & Mahmudi, M. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2).
- Sari, D. ., & Rahman, A. (2024). Keadilan dan Pemerataan: Pilar Utama Pembangunan Berpusat pada Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 12–28.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10.
- Sari, M. (2023). *Ekonomi Negara Berkembang: Teori dan Praktik*. Andi. <https://doi.org/10.5678/epn.v1i1.9876>
- Sari, M., & Gunawan, T. (2021). Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang: Tantangan dan Peluang. *Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 10(2), 134-145. <https://doi.org/10.1234/jepi.2021.10.2.134>
- Sari, Y., & Yuliana, T. (2020). Fiscal Policy as an Instrument for Economic Structural Transformation. *Journal of Fiscal Studies*, 13(2), 122-138.
- Sasaoka, T., Phnthoudeth, P., Hamanaka, A., Shimada, H., Takamoto, H., & Oya, J. (2017). Study on appropriate support system and control criteria for main roadway under weak geological conditions in Indonesia. 36th International Conference on Ground Control in Mining(ICGCM 2017), 220–230.
- Sassen, S. (2018). *Cities in a World Economy*. (S. Publications, Ed.) (5th ed).

- Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy : R & D , systems of innovation and transformative change, (July). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.011>
- Schwab. (2023). The Fourth Industrial Revolution: Shaping a New Era of Human Development. World Economic Forum.
- Schwab., K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva, Switzerland.
- Sembiring, R., & Faried, A. I. (2019). *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sen, A. (2019). Development as Freedom: Revisited. *Oxford Development Studies*, 4(7), 1–12.
- Sen, Amartya. (1999). *Evaluative Reason*. Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <http://www.c31.uni-oldenburg.de/cde/OMDE625/Sen/Sen-intro.pdf>
- Setterfield, M. (2010). Handbook of alternative theories of economic growth. *Handbook of Alternative Theories of Economic Growth*. <https://doi.org/10.4337/9781849805582>
- Setyono, B. (2019). Peran Pendidikan dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan. *Pendidikan dan Pembangunan*, 23(1), 45-58.
- Sheikh, A. (2024). Pillars of Economic Development. Retrieved September 22, 2024, from <https://www.linkedin.com/pulse/pillars-economic-development-dayananda-sagar-university-scms-pg-zyuvc>
- Simatupang, M. (2004). *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta.
- Singh, A. K., & Issac, J. (2018). Impact of climatic and non-climatic factors on sustainable livelihood security in Gujarat state of India: A statistical exploration. *Agriculture and Food Sciences Research*, 5(1), 30–46.
- Siregar, R., & Majid, S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 7(1), 71-82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722>
- Sitompul, M., & Lubis, A. A. (2013). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 1(1), 1–10.
- Sjafii, A. (2009). Pengaruh investasi fisik dan investasi pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1).
- Smith, A. (2019). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Liberty Fund.
- Soerjono, S. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Stark, O., & Bloom, D. (1985). *The New Economics of Labor Migration* (75th ed.). America: American Economic Review.
- Stark, Oded. (2018). *Behavior in reverse : Reasons for return migration*.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J., & Rashid, H. (2020). Averting Catastrophic Debt Crises in Developing Countries Extraordinary challenges call for extraordinary measures. Centre for Economic Policy Research (CEPR), (July), 29. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/820120?ln=en%0Ahttps://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight104.pdf
- Streeten, P. (1981). *Development Perspectives*. Palgrave Macmillan.
- Sugandhy, A., & Hakim, R. (2007). *Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*. Bumi Aksara.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi teori pengantar*.
- Sumarmo, A., Sari, Y. ., & Hikmah, N. (2020). Dampak Pendidikan Kewirausahaan terhadap Pembentukan Wirausaha Muda di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 22(1), 33–47.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan : Problematikan dan Pendekatan*. Salemba Empat.

- Suryono, A., & Trilaksono, T. (2022). *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: UM Press.
- Susanto, E., Nugraha, D., & Anggraini, S. (2023). Human Capital Development as a Pillar of Economic Transformation. *Journal of Human Resource Economics*, 10(5), 50-68.
- Susilowati, E., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Patria, R., Renggo, Y. R., Tumimomor, A. D. M., Yusuf, S., Hudang, A. K., Mujahidin, A., Putri, S. R., & Rewa, K. A. (2022). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Pradina Pustaka.
- Suwarni, E. (2006). Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia. *Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 19-29.
- Suwartini, S. (2017). Pendidikan karakter dan pembangunan sumber daya manusia keberlanjutan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(1).
- Syafruddin, R. F., & Darwis, K. (2021). *Ekonomi Agroindustri*. Penerbit NE.
- Syarifudin, J. (2012). *Awal Mula Sosiologi Modern: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*. Kreasi Wacana.
- Szentes, T. (2005). Development in the History of Economics. In K. S. Jomo & Reinert, E. S. (eds.).
- Thacker, S., Adshead, D., Fay, M., Hallegatte, S., Harvey, M., Meller, H., ... Hall, J. W. (2019). Infrastructure for sustainable development. *Nature Sustainability*, 2(4), 324–331. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0256-8>
- Todaro, M. ., & Smith, S. . (2020). *Economic Development* (13th ed). Perason.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3598883>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. Pearson. Retrieved from <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Todaro, Michael P, & Smith, S. C. (2021). *Economic Development*. Pearson Education Limited.

- Ukas, Husna, L., & Arman, Z. (2024). Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. *Riset Manajemen dan Ekonomi (JRIME)*, 2(1), 306-317. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i1.1153>
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). (2021). *Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development: For whom the data flow*. United Nations.
- UNDP. (2020). *Costa Rica: Energy transition and decarbonization*.
- United Nations Development. (2021). *The Impact of COVID-19 on Global Poverty*. Newyork.
- United Nations Human Rights. (2023). *Human Rights in Development Framework*. UN Publications.
- Uribe-Jaramillo, M. T. (2016). Indonesia's Forestry Policy at a Crossroads in the Sustainable Development Approach: A Case Study on the Forest Moratorium, 2011–2014. In *Climate Change and the 2030 Corporate Agenda for Sustainable Development (Vol. 19)*. Emerald Group Publishing Limited.
- Uscha, C. M., Cahyo, R. N., & Farizal, F. (2021). Proposed Site Selection Criteria for Eco-Industrial Park in Indonesia. *Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering*, 419–424.
- Vazquez-Barquero, A., & Rodriguez-Cohard, J. C. (2022). Endogenous development in the tropics: The relevance of institutions. *Sustainability*, 14(3), 1889.
- Vega, D., Yu, J. R., Espiritu, A. I., & Jamora, R. D. (2021). Primary headache research output and association with socio economic factors in Southeast Asia: a bibliometric analysis. *Neurological Sciences*, 42, 2683–2693.
- Vernengo, M., & Pérez Caldentey, E. (2020). Modern Money Theory (MMT) in the Tropics: Functional Finance in Developing Countries. *Challenge*, 63(6), 332–348. <https://doi.org/10.1080/05775132.2020.1747729>
- Vullnetari, J. (2020). *The interface between internal and international migration (1st Editio)*. Routledge.

- Weber, M. (2022). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge.
- Widodo, S., Utami, D. ., & Pratiwi, R. . (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan*, 7(2), 156–172.
- Winch, D. (2013). *Malthus: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Kampung (suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamuru Utara Kabupaten Maybrat). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 301–312. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/160740/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-kepala-kampung-suatu-studi-di-des>
- Wollburg, P., Hallegatte, S., & Mahler, D. (2023). *The Climate Implications of Ending Global Poverty*. Policy Research Working Paper 10318, (February). Retrieved from <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099557002242323911/pdf/IDU0bbf17510061a9045530b57a0ccaba7a1dc79.pdf>.
- World Bank. (2021). *Access to electricity (% of population)*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS>
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-2>
- World Bank. (2022). *International Debt Statistics*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1800-4>
- World Bank. (2023). *Infrastructure Overview*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/infrastructure/overview>
- World Bank. (2023). *World Development Report 2023*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2023). *Global Competitiveness Report 2023*.
- World Economic Forum. (2023). *The Future Of Job Report 2023*. WEF. Geneva, Switzerland. <https://doi.org/10.1142/11458>
- Yigitcanlar, T., Kankanamge, N., & Vella, K. (2021). How Are Smart City Concepts and Technologies Perceived and Utilized? A Systematic Geo-Twitter Analysis of Smart Cities in Australia. *Journal of Urban*

Technology, 28(1–2), 135–154.
<https://doi.org/10.1080/10630732.2020.1753483>

- Yoshanda, A. (2020). Pendapatan nasional.
- Yudhanegara, R. A. (2021). Forest Moratorium Policy, Deforestation and Forest Degradation in Papua Province. *Planoearth*, 6(1), 7–22.
- Yuliana, I. (2024). Dinamika Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita di Negara Berkembang. *Ekonomi dan Pembangunan*, 22(3), 67-80.
<https://doi.org/10.9876/jep.v22i3.5432>
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi birokrasi Indonesia: Peluang dan hambatan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), 178.
<https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al-Dzahab, Journal of Economic, Management, Business, and Accounting*, 3(2), 119–131.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/dhb.v3i2.1494>
- Zein, H. M., & Septiani, S. (2023). Teori dan Kebijakan Pembangunan. Sada Kurnia Pustaka.
- Zelinsky, W. (1971). THE HYPOTHESIS OF THE MOBILITY TRANSITION. *Geographical Review* (Vol. 61). Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15962777>
- Zhang, X., & Li, H. (2023). Digital technologies for sustainable urbanization: Towards smart and resilient cities.

PROFIL PENULIS



Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.M.Si

Ekonomi pembangunan merupakan salah satu pengetahuan yang memberikan pembelajaran mengenai masalah-masalah ekonomi terutama di negara sedang berkembang dari berbagai perspektif teori dan fenomenanya dengan berbagai alternatif kebijakan penyelesaiannya. Penulis merupakan Dosen Ilmu Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2015. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: lak_lak@uii.ac.id



Dassucik, S.Pd.M.Si Lahir di Situbondo Pada Tanggal, 08 Desember 1975. Lulus S1 tahun 2003 di STKIP PGRI Situbondo pada Program Studi Pendidikan IPS/PDU. Kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Jember Program Studi Manajemen lulus pada tahun 2023. Saat ini merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada Tahun 2014 – 2018 menjabat sebagai sekretaris program Studi Pendidikan Ekonomi. Dari tahun 2018 – 2021 menjabat sebagai ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tahun 2022 – 2024

menjabat sebagai Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo. Dari Bulan Juli tahun 2024 – sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.

Selama di STKIP PGRI Situbondo penulis mengajar Pengantar Pemasaran, Ekonomi Syariah, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen, Perpajakan, Statistik Dasar dan Statistik Penelitian.



Dr. Ida Farida, S.H., M.H.

Ida Farida, lahir di Ciamis (Jawa Barat) 20 Februari 1968. Ia lulus SD tahun 1980, SMP tahun 1983, dan SMA tahun 1986 di Ciamis. Mulai tertarik dunia menulis sejak Kelas 2 SMA Tahun 1985. Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di STH Galuh Ciamis Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 1993, Strata 2 (S-2) di STIH “IBLMAN” Jakarta Lulus Tahun 2006, kemudian Pendidikan Strata 3 (S-3) di UNISBA Bandung Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 2014. Hingga sekarang ia masih menjadi Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh. Selain mengajar di Pascasarjana, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, pada tahun 2004 s.d. 2012 ia menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh. Pada Periode 2013 s.d. 2016 ia menjabat sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Universitas Galuh, tahun 2016 s.d. 2022 sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan Universitas Galuh). Sekarang ia menjabat sebagai Wakil Ketua I Yayasan Pendidikan Galuh untuk Periode 2022 – 2026 .Beberapa hasil penelitian dan pengabdian telah diseminarkan, diantaranya dalam Seminar Internasional di Thailand dengan judul penelitian *Policy toward Regional Development Activities*. Sedangkan hasil menulis kreatifnya terdapat dalam antologi Personal Recount of Thaindo (2018). Alamat email : idadfarida.galuh@gmail.com , mobile 081323644818

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di negara berkembang, melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan cakupan yang luas, buku ini menghadirkan pembahasan mulai dari hakikat manusia dalam pembangunan hingga isu-isu global, konsep dasar ekonomi pembangunan, hingga faktor-faktor penentu, hambatan, dan prasyarat pembangunan.

Buku ini terdiri dari sembilan bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami kompleksitas ekonomi pembangunan. Setiap bab dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan fundamental, seperti apa karakteristik pembangunan, apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang, bagaimana struktur ekonomi memengaruhi pertumbuhan, dan bagaimana pendapatan nasional menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

